

**ANALISIS POLA KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN BADAN  
USAHA MILIK DESA SUMBER SEJAHTERA**  
*(Studi Pada Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dengan Minat  
Reformasi Pemerintahan

**Disusun Oleh :**

**Nita Pramastuti**  
**145120601111053**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**MALANG**

**2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS POLA KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN BADAN  
USAHA MILIK DESA SUMBER SEJAHTERA**  
*(Studi Pada Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*

### SKRIPSI

Disusun oleh:

**Nita Pramastuti**

**145120601111053**

**Telah Disetujui Oleh Pembimbing**

Pembimbing Utama



**Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si**  
**NIK.2013048811042001**

Pembimbing Pendamping



**Andi Setiawan, S.IP., M.Si**  
**NIK.2013048708211001**

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS POLA KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER SEJAHTERA

*(Studi Pada Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*

### SKRIPSI

Disusun oleh:  
Nita Pramastuti  
145120601111053

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana Ilmu Pemerintahan  
pada tanggal 10 Desember 2018

#### Tim Penguji

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

  
Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si  
NIK. 2016077910241001

Anggota Majelis Penguji 1

  
Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA  
NIK.2018078912271001

Anggota Majelis Penguji 2

  
Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si  
NIK. 2013048811042001

  
Andi Setiawan, S.IP., M.Si  
NIK. 2013048708211001

Malang, 10 Desember 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Ulfir Ludigdo, SE., M.Si. Ak-  
NIP.196908141994021001

## PERNYATAAN

Nama: Nita Pramastuti

NIM: 145120601111053

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “Analisis Pola Kemitraan Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera (Studi Pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)” adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi tersebut telah diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam lembar daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 10 Desember 2018

Yang Memberi Pernyataan,



Nita Pramastuti  
145120601111053

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas Ahmad dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ANALISIS POLA KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER SEJAHTERA (STUDI PADA DESA PUJONKIDUL KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG). Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun dalam upaya untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Orantua dan keluarga saya yang selalu memberikan dukungan baik berupa doa, semangat dan finansial kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
1. Ibu Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si., selaku pembimbing utama dan Bapak Andi Setiawan, S.IP., M.Si selaku pembimbing pendamping atas segala perhatian dan bimbingannya serta arahan-arahan yang diberikan kepada penulis dalam upaya menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si dan Bapak Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA atas bantuan dan kesediaan serta saran-saran yang diberikan kepada penulis dalam ujian skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si.Ak, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas kesediannya penulis belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Jajaran Pemerintah Desa Pujonkidul, BUMDES Sumber Sejahtera, BNI Kantor Cabang Pembantu Unit Universitas Brawijaya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Teman-teman kos Mapanja, Aini, Rosa, Ajeng, Ninda, Bikha, Wilda, Siska, dan sepupuku Vina



6. Tidak lupa kepada para teman-teman Ilmu Pemerintahan 2014, Sriana, Alde, Prilla, Wulan, Citta, Erina, Devi, Irfan, dan lain sebagainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga laporan hasil penelitian skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya Ilmu Pemerintahan yang berorientasi pada permasalahan inovasi pelayanan publik.

Malang, 10 Desember 2018

Nita Pramastuti



## ABSTRAK

**Nita Pramastuti. Analisis Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). Skripsi. Pembimbing I: Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si. Pembimbing II: Andi Setiawan, S.IP., M.Si. Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya.**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kemitraan yang dijalankan dalam mengelola unit usaha BUMDES di Desa Pujonkidul. Kajian ini dianalisis menggunakan konsep kemitraan menurut Farazmand dengan model kemitraan yang terdiri dari model otonom, interdependensi, globalisasi-konvergensi, *hybrid*, dan elit. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan salah satu unit usaha BUMDES Sumber Sejahtera dilakukan dengan cara kemitraan bersama Bank Negara Indonesia (BNI). Kemitraan tersebut diinisiasi oleh pemerintah desa Pujonkidul. Masyarakat desa Pujonkidul dapat merasakan kemudahan dalam mengakses perbankan melalui kemitraan yang dilakukan oleh BUMDES dengan BNI tersebut. Keberadaan BUMDES Sumber Sejahtera juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Akan tetapi, kemitraan yang dilakukan bersama BNI tersebut kurang memberikan pendapatan yang besar dalam pendapatan asli desa di Pujonkidul. Faktor pendorong dalam pengelolaan BUMDES ialah adanya dukungan dari pemerintah desa setempat, serta adanya kebutuhan masyarakat dalam kemudahan mengakses perbankan. Faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDES Sumber Sejahtera adalah minimnya Sumber Daya Manusia yang terlibat, dan pelaksanaan pelatihan yang kurang bagi masyarakat.

*Kata kunci : Kemitraan, BUMDES, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan*

## ABSTRACT

***Nita Pramastuti. An Analysis of Partnership Pattern in Management Village Business Entity (Study On Pujonkidul Village sub-district Pujon Malang Regency). Thesis. Supervisor I: Irma Fitriana Ulfah , S.IP., M.Si. Supervisor II: Andi Setiawan , S.IP., M.Si. Government Science. Faculty of Social Science and Politics Science. University of Brawijaya.***

---

*This research aims to determine the partnership pattern implemented in manage business units in BUMDES Pujonkidul Village. This study was analyzed using partnership concept from Farazmand with a partnership model such as autonomous models, interdependence, globalization-convergence, hybrids, and elite. This type of research is qualitative descriptive with observation, interview, and documentation as data collection techniques. The results research show that management business unit BUMDES Sumber Sejahtera is carried out partnership with Bank Negara Indonesia (BNI). The partnership an initiated by government village Pujonkidul. The villagers of Pujonkidul could feel convenience in accessing the banking through partnerships carried out by BUMDES with the BNI. The existence of BUMDES Sumber Sejahtera can also open the employment opportunities specifically to the Pujon Kidul's society. However, the partnerships carried out with BNI are giving less income especially to the village's original income in Pujon Kidul. Supporting factors in management of BUMDES is the existence support from the local village government, as well as the society needs in ease of accessing the banking. Obstacle factors in BUMDES Sumber Sejahtera management is minimum Source Power Humans are involved, and the implementation less training especially for the village society.*

*Keyword : Partnership , BUMDES, Village Government, Finance Institution.*

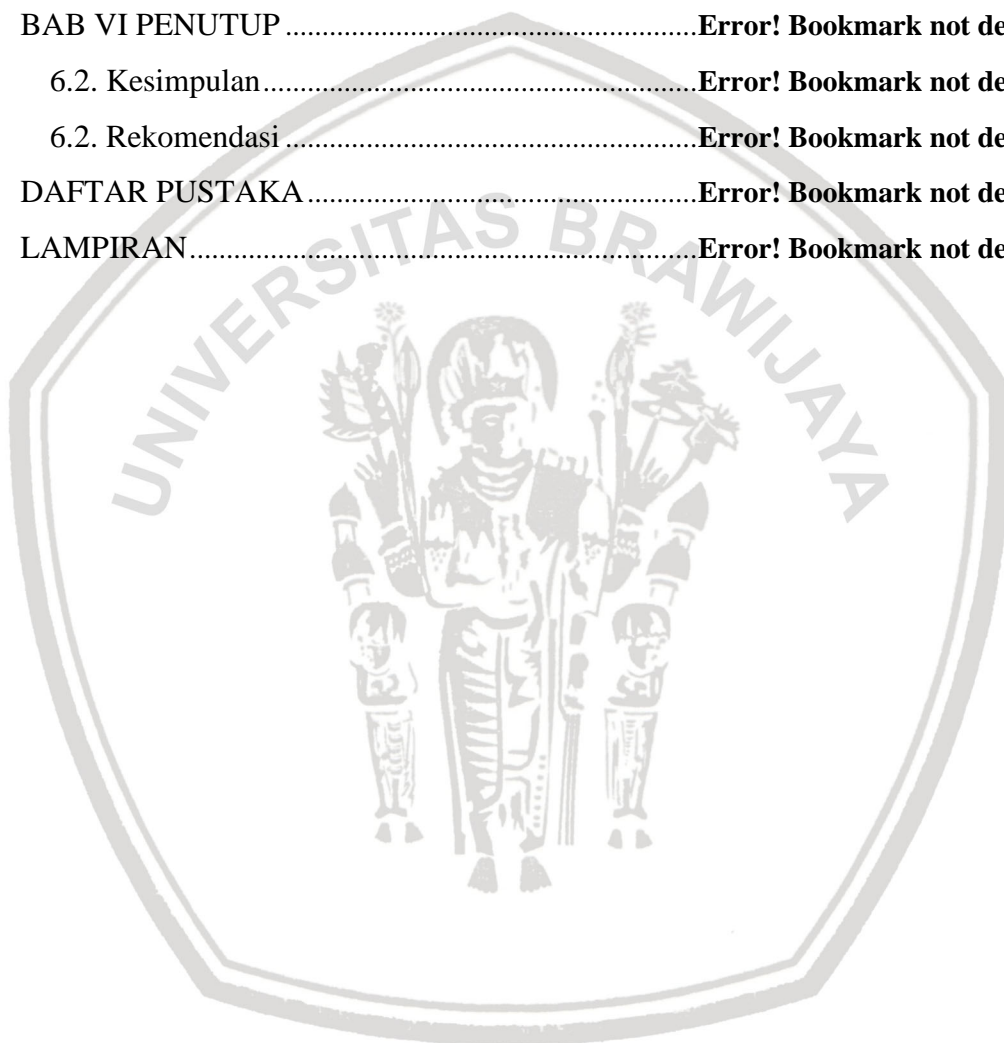


## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR ISTILAH.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1. Manfaat Akademis.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.2. Manfaat Praktis.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1. Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
2.2. Kerangka Teoritis.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Kemitraan.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Badan Usaha Milik Desa.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Lembaga Keuangan Bank.....	Error! Bookmark not defined.
2.3. Alur Pikir Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
3.1. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2. Fokus Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.3. Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

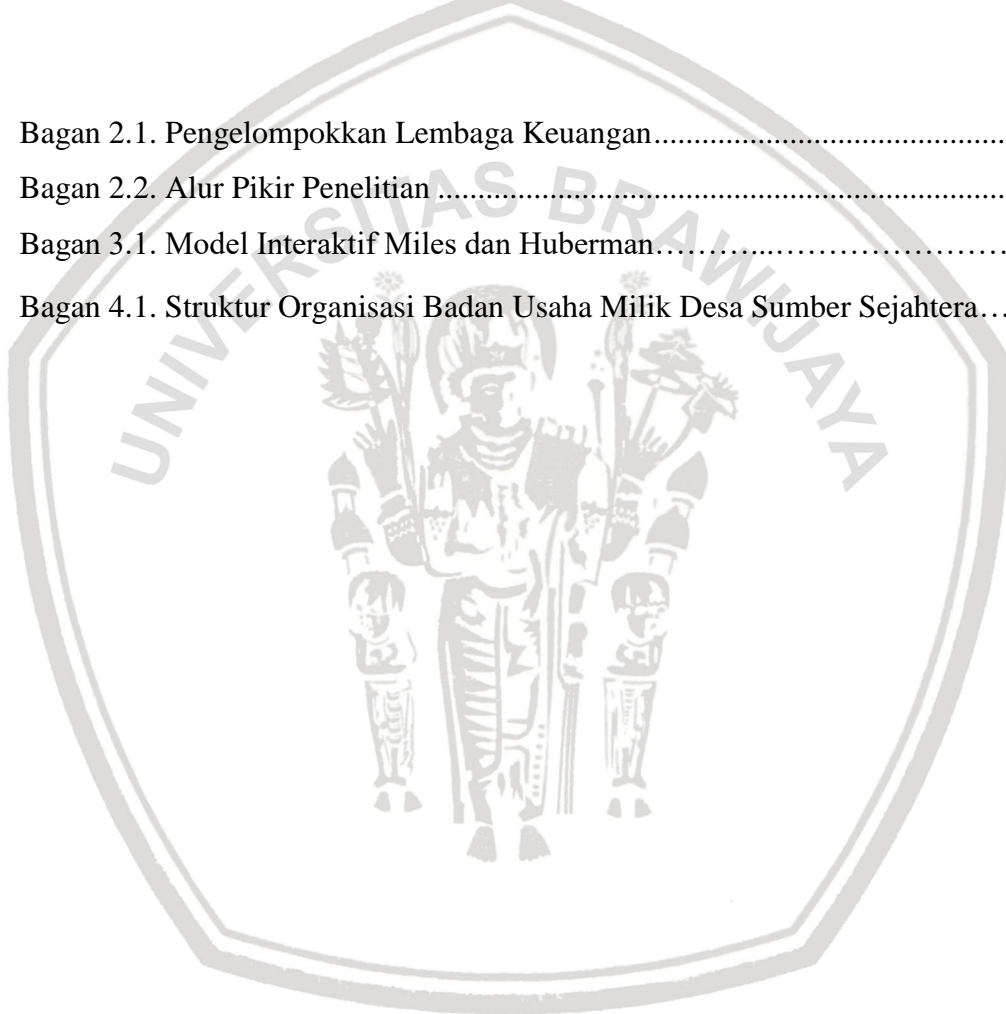
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4.1. Data Primer .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4.2. Data Sekunder.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.5.1. Observasi .....	39
3.5.2. Wawancara.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.5.3. Dokumentasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.6. Teknik Penentuan Informan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.7. Teknik Analisis Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1. Kondisi Geografis.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2. Kondisi Demografi/ Kependudukan Desa Pujonkidul..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3. Pendidikan Masyarakat Desa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4. Mata Pencaharian Masyarakat Desa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.5. BUMDES Sumber Sejahtera.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.5.1. Landasan Hukum Pembentukan BUMDES.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.5.2. Visi dan Misi BUMDES Sumber Sejahtera.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.5.3. Maksud dan Tujuan Pembentukan BUMDES Sumber Sejahtera.	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.5.4. Unit Usaha BUMDES Sumber Sejahtera .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.5.5. Sarana BUMDES Sumber Sejahtera.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V ANALISIS POLA KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER SEJAHTERA ....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1. Pola Kemitraan dalam Pengelolaan BUMDES Sumber Sejahtera dengan BNI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.1. Inisiasi Kemitraan BUMDES Sumber Sejahtera dengan BNI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

5.1.2. Hubungan Saling Ketergantungan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.3. Pengaruh Konvergensi Global .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan BUMDES Sumber Sejahtera .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2.1. Faktor Pendukung .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2.2. Faktor Penghambat .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB VI PENUTUP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6.2. Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6.2. Rekomendasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LAMPIRAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



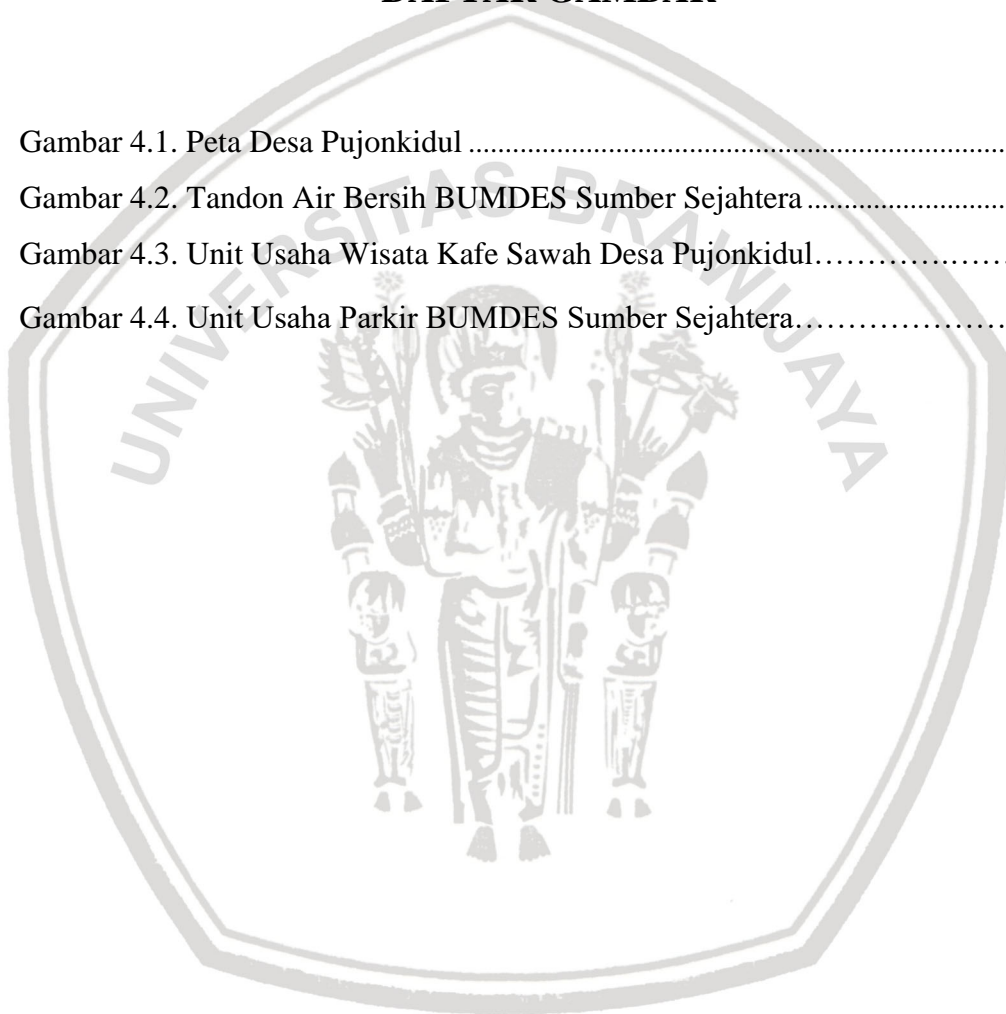
## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Pengelompokkan Lembaga Keuangan.....	31
Bagan 2.2. Alur Pikir Penelitian .....	33
Bagan 3.1. Model Interaktif Miles dan Huberman.....	43
Bagan 4.1. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera.....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Desa Pujonkidul .....	46
Gambar 4.2. Tandon Air Bersih BUMDES Sumber Sejahtera .....	56
Gambar 4.3. Unit Usaha Wisata Kafe Sawah Desa Pujonkidul.....	57
Gambar 4.4. Unit Usaha Parkir BUMDES Sumber Sejahtera.....	60





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar BUMDES di Kabupaten Malang tahun 2017 .....	3
Tabel 1.2. Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pujonkidul Tahun 2016 dan 2017 .....	7
Tabel 1.3. Pendapatan BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul tahun 2017	8
Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian .....	41
Tabel 4.1. Luas Lahan Berdasarkan Prosentase Kesuburan Tanah Desa Pujonkidul .....	47
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun tahun 2017 .....	48
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2017.....	48
Tabel 4.4. Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pujonkidul tahun 2017.....	49
Tabel 4.5. Mata Pencarian Masyarakat Desa Pujonkidul tahun 2017.....	51
Tabel 4.6. Daftar Sarana BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul.....	61
Tabel 5.1. Daftar Nasabah BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul.....	72
Tabel 5.2. Skema <i>fee</i> Layanan Agen46 BNI.....	76
Tabel 5.3. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Berdirinya BUMDES Sumber Sejahtera.....	87
Tabel 5.4. Daftar Pekerja BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul.....	87

## DAFTAR ISTILAH

ADD	: Alokasi Dana Desa merupakan anggaran keuangan dari pemerintah untuk desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak daerah serta dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten
Agen46 BNI	: Mitra BNI baik itu perorangan atau yang telah berbentuk badan hukum yang menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat.
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rincian penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai jalannya pemerintahan diwilayahnya
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang berisi tentang sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.
Bank umum	: Bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya
BNI	: Bank Negara Indonesia, salah satu bank yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar modalnya milik pemerintah
BUMDES	: Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
BUMN	: Badan usaha milik negara dimana modal keseluruhan dari bank tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya dibawah Undang-Undang tersendiri
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i> merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk rasa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar termasuk kehidupan sosialnya

Dana Desa	: Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kemudian di transfer ke pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk di salurkan ke masing-masing desa yang ada di wilayahnya guna membiayai pembangunan desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Inklusi keuangan	: Bentuk pendalaman terkait layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat kelas menengah kebawah untuk memanfaatkan produk dan jasa keuanganforal seperti sarana menyimpan uang yang aman, transfer, menabung, maupun pinjaman
Kemitraan	: Strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan
Unit usaha Laku pandai	: Singkatan dari layanan keuangan tanpa kantor yang merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan untuk penyediaan layanan perbankan atau keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank)
Layanan gerak BNI	: Armada yang memberikan layanan perbankan dari Bank Negara Indonesia untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan yang diinginkan
Lembaga keuangan	: Lembaga yang setiap bidang usahanya bergerak dalam bidang keuangan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan sektor keuangan mulai dari menghimpun dana, menyalurkan dana, maupun jasa-jasa keuangan lainnya
Literasi keuangan	: Rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik
PADes	: Pendapatan Asli Desa yang dapat berasal dari hasil pengelolaan aset dan kekayaan milik desa
Pemerintah desa	: Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa
Peraturan Desa	: Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
Pujonkidul	:

- Tap Cash* : Uang elektronik pengganti uang tunai yang dapat di isi ulang, serta dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pada tempat-tempat yang bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia
- TPST : Tempat Pengolahan Sampah Terpadu merupakan tempat dilaksanakannya pengumpulan, pemilahanm penggunaan ulang, pendaur ulangan, dan pemrosesan akhir sampah



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Desa seringkali identik dengan adanya kehidupan masyarakat didalamnya yang cenderung tradisional, memiliki kehidupan sosial yang tinggi, dan mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani atau nelayan. Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Desa memiliki wewenang untuk dapat mengatur kekayaan yang dimilikinya untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat di dalamnya.

Dalam keikutsertaan melaksanakan pembangunan nasional maka desa juga dituntut untuk dapat melakukan pembangunan dalam segala bidang di wilayahnya. Salah satu yang dapat menjadi sumber dalam pembangunan ditingkat desa ialah pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendapatan Asli Desa atau selanjutnya disebut dengan PADes merupakan sumber pendapatan desa yang berasal dari hasil kekayaan yang dimiliki oleh desa. PADes terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa yang lainnya. Salah satu yang dapat dijadikan sebagai sumber PADes adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Secara teknis BUMDES diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang



Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUMDES dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa.<sup>1</sup> Hal tersebut tidak lain dikarenakan setiap desa setidaknya harus memiliki pendapatan yang bersumber dari kekayaan yang dimiliki oleh wilayahnya masing-masing. Bentuk pemanfaatan kekayaan tersebut dapat berupa pendirian dan pengelolaan BUMDES. BUMDES dapat dikelola bersama dengan pihak ketiga baik itu dari pemerintah, swasta maupun BUMDES dari desa lainnya.

Namun, kenyataannya masih dapat dijumpai desa-desa yang belum sepenuh hati untuk mendirikan dan mengelola BUMDES. Sehingga, dapat mempengaruhi pendapatan yang bisa saja diperoleh desa melalui BUMDES. Salah satu contoh yang dapat dijumpai terkait masih sedikitnya jumlah pendirian dan pengelolaan BUMDES oleh desa ialah terjadi di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang merupakan salah satu pemerintahan daerah di wilayah Jawa Timur yang terdiri dari 33 Kecamatan dengan 378 desa didalamnya. Akan tetapi, dari 378 desa yang berada di wilayah Kabupaten Malang, hingga tahun 2017 menurut data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang, jumlah BUMDES yang terdapat di Kabupaten Malang sebanyak 68. Berikut ini merupakan tabel daftar BUMDES di Kabupaten Malang tahun 2017.

---

<sup>1</sup> Permendesa No. 4 tahun 2015 Pasal 2

**Tabel 1.1.**  
**Daftar Desa yang Memiliki BUMDES di Kabupaten Malang Menurut**  
**Kecamatan tahun 2017**

NO	KECAMATAN	DESA	UNIT USAHA
1.	Ampelgading	Desa Sidorenggo	Simpan Pinjam, Wisata dan UPKu
2.	Bantur	1. Desa Rejosari	Pasar Desa, Kelompok Tani dan Kelompok Ternak
		2. Desa Rejoyoso	HIPPAM dan UPKu
		3. Desa Srigonco	UPKu, HIPAM dan Wisata
		4. Desa Bandungrejo	Pasar Desa dan HIPPAM
3.	Bululawang	1. Desa Kasembon	UPKu dan Kelompok Tani
		2. Desa Sudimoro	UPKu dan Kelompok Tani
		3. Desa Kuwolu	HIPPA, Kelompok Tani dan UPKu
4.	Dampit	1. Desa Amadanom	UPKu , Kelompok Tani dan HIPAM
		2. Desa Majangtengah	-
5.	Dau	Desa Kalisongo	HIPAM, Simpan Pinjam dan Kelompok Tani
6.	Donomulyo	1. Desa Banjarejo	Pasar Desa, HIPAM dan UPKu
		2. Desa Tulungrejo	-
7.	Gedangan	1. Desa Sindurejo	HIPAM, Kelompok Ternak dan UPKu
		2. Desa Sidodadi	Wisata
		3. Desa Gajahrejo	-
8.	Gondanglegi	1. Desa Putukrejo	HIPAM, Wisata, Kelompok Tani dan UPKu
		2. Desa Ketawang	-
9.	Jabung	1. Desa Kemantren	Pasar Desa, Kelompok Tani, Kelompok Ternak dan Usaha Jasa
		2. Pandansarilor	-
		3. Gadingkembar	-
10.	Kalipare	1. Desa Arjowilangun	Pasar Desa, UPKu, HIPAM, Kelompok Ternak dan Usaha Jasa
		2. Desa Sukowilangun	HIPAM, UPKu dan Kelompok Ternak
11.	Karangploso	-	-
12.	Kasembon	Desa Bayem	-
13.	Kepanjen	1. Desa Jatirejoyoso	Simpan Pinjam
		2. Desa Kemiri	UPKu
14.	Kromengan	1. Desa Jambuwer	Kelompok Tani

		2. Desa Ngadirejo	-
15.	Lawang	Desa Ketindan	HIPAM
16.	Ngajum	Desa Palaan	-
17.	Ngantang	1. Desa Tulungrejo	Simpan pinjam dan Kelompok Tani
		2. Desa Sumberagung	HIPAM, Kelompok Ternak dan UPKu
		3. Desa Pandansari	HIPAM, UPKu, Kelompok Ternak
		4. Desa Purworejo	-
		5. Desa Mulyorejo	-
18.	Pagak	1. Desa Gampingan	Kelompok Tani, Pasar Desa, HIPAM, Wisata
		2. Sbr. Manjing Kulon	-
19.	Pagelaran	1. Desa Sidorejo	Simpan Pinjam
		2. Desa Karangsuko	Wisata, HIPAM, UPKu
20.	Pakis	-	-
21.	Pakisaji	Desa Jatisari	HIPAM dan UPKu
22.	Poncokusumo	1. Desa Poncokusumo	Kelompok Tani dan HIPAM
		2. Desa Pajaran	Simpan Pinjam, Kelompok Tani dan HIPAM
		3. Desa Pandansari	Kelompok Tani, Kelompok Ternak, HIPAM dan UPKu
		4. Desa Ngadas	HIPAM, Wisata, Usaha Jasa dan Kelompok Tani
23.	Pujon	1. Desa Pujonlor	Simpan Pinjam
		2. Desa Ngroto	Simpan Pinjam, Kelompok Tani dan HIPAM
		3. Desa Pujonkidul	HIPAM, Wisata, UPKu dan Usaha Jasa
		4. Desa Bendosari	HIPAM, Wisata, UPKu dan Usaha Jasa
		5. Desa Pandesari	HIPAM, Wisata, UPKu dan Usaha Jasa
		6. Desa Tawangsari	-
24.	Sbr. Manjing wetan	-	-
25.	Singosari	1. Desa Baturetno	HIPAM dan UPKu
		2. Desa Tunjungtirto	HIPAM, UPKu, Kelompok Tani dan Usaha Jasa
26.	Sumberpucung	1. Desa Jatiguwi	Kelompok Tani dan HIPA
		2. Desa Sumberpucung	UPKu, HIPAM dan Usaha Jasa
		3. Desa Karangates	-
27.	Tajinan	1. Desa Pandanmulyo	Simpan Pinjam
		2. Desa Randugading	Simpan Pinjam, HIPAM dan Kelompok Tani

28.	Tirtoyudo	1. Desa Sumbertangkil	HIPAM, UPKu, Kelompok Ternak dan Usaha Jasa
		2. Desa Tlogosari	Pasar Desa, UPKu, Kelompok Ternak dan Usaha Jasa
29.	Tumpang	-	-
30.	Turen	1. Desa Sananrejo	UPKu, HIPAM, Wisata dan Kelompok Tani
		2. Desa Gedogwetan	Pasar Desa
		3. Desa Sanankerto	Wisata, HIPAM, UPKu dan Usaha Jasa
31.	Wagir	1. Desa Dalisodo	Kelompok Tani dan HIPAM
		2. Desa Gondowangi	HIPAM, UPKu dan Usaha Jasa
32.	Wajak	1. Desa Beringin	Pasar Desa dan Simpan Pinjam
		2. Desa Kidangbang	HIPAM, Kelompok Tani, Kelompok Ternak dan UPKu
		3. Desa Sukoanyar	HIPAM, Kelompok Tani, Kelompok Ternak dan UPKu
		4. Desa Codo	Kelompok Tani, Kelompok ternak, HIPAM, UPKu dan Pasar Desa
33.	Wonosari	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>68</b>	

*Sumber : data diolah penulis berdasarkan rekapitulasi data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang, 2018*

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa jumlah BUMDES yang berdiri di Kabupaten Malang bahkan belum ada setengah dari jumlah desa yang ada secara keseluruhan. Salah satu yang menjadi alasan bagi desa yang belum mendirikan BUMDES ialah kurang adanya kemantapan dalam pengelolaannya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sie Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang kepada peneliti sebagai berikut : “desa itu masih apa ya ragu..”<sup>2</sup>. Ragu yang dimaksud adalah pihak dari pemerintah desa masih belum siap dalam membentuk BUMDES sebagai lembaga ekonomi masyarakat desa. Akan tetapi, untuk saat ini dalam

<sup>2</sup> Wawancara bersama Pak Oni Eko Cahyono. Kasie Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Malang. Pada 19 Januari 2018/ 09:59 WIB

pengolahan usaha BUMDES juga dapat dilakukan dengan cara menjalin kemitraan bersama pihak pendukung lainnya.

Sebelumnya pernah dilakukan penelitian terkait dengan BUMDES yang ada di Kabupaten Malang tepatnya di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang oleh Coristya Berlian Ramadana dan kawan-kawan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa salah satu BUMDES di Kabupaten Malang yakni BUMDES desa Dau yang berlandaskan hukum Peraturan Desa Dau nomor 2 tahun 2008 memiliki tujuh unit usaha yang dikelola. Unit usaha tersebut terdiri dari usaha pertanian, peternakan, simpan pinjam, pengelolaan sampah, jasa, home industry, dan pasar. Akan tetapi, dari ke tujuh unit usaha tersebut hanya satu unit usaha yang dapat berjalan dengan baik yakni unit usaha simpan pinjam. Pada penelitian yang peneliti lakukan di Desa Pujonkidul ini tergolong kedalam salah satu penelitian baru yang membahas tentang BUMDES di Kabupaten Malang.

Peneliti memilih desa Pujonkidul yang terletak di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian tentang BUMDES. Hal tersebut dikarenakan Desa Pujonkidul merupakan salah satu dari 68 jumlah desa di Kabupaten Malang yang memiliki BUMDES untuk dikelola sebagai salah satu penunjang Pendapatan Asli Desa. Desa Pujonkidul memiliki BUMDES yang bernama Sumber Sejahtera dengan enam unit usaha di dalamnya. Unit usaha tersebut terdiri dari unit usaha penyediaan air bersih, unit usaha laku pandai, unit usaha pertanian, unit usaha wisata, unit usaha tempat pengolahan sampah terpadu, dan unit usaha parkir wisata.



Secara langsung keberadaan BUMDES Sumber Sejahtera di Desa Pujonkidul dapat membantu dalam perbaikan perekonomian desa dan masyarakatnya. Sejak berdiri pada tahun 2015 yang terbentuk melalui Peraturan Desa Pujonkidul nomor 6 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pujonkidul, BUMDES tersebut terbukti mampu memberikan bantuan dalam peningkatan jumlah PADesa Pujonkidul pada tahun 2016 dan 2017. Berikut merupakan perbandingan peningkatan jumlah PADesa Pujonkidul tahun 2016 dan 2017.

**Tabel 1.2.**  
**Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pujonkidul Tahun 2016 dan 2017**

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	
	2016	2017
1. PENDAPATAN		
1.1. PADes	57.600.000,00	85.000.000,00
1.1.2. Hasil Usaha Desa (BUMDES)	57.600.000,00	85.000.000,00
1.2. Pendapatan Transfer	1.163.332.926,00	1.379.073.919,00
1.3. Lain-lain pendapatan desa yang sah	29.200.000,00	31.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.250.132.926,00	1.495.573.919,00
2. BELANJA		
2.1. Belanja Desa	1.263.618.288,71	1.481.882.927,00
JUMLAH BELANJA	1.263.618.288,71	1.481.882.927,00
SURPLUS/ (DEFISIT)	13.485.362,71	13.690.992,00
3. PEMBIAYAAN		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	13.485.362,71	36.309.008,00

Sumber : diolah penulis melalui Peraturan Desa Pujonkidul No.3 tahun 2016 dan <http://pujonkidul.desa.id/2017/05/31/apbdes-2017>

Berdasarkan tabel perbandingan di atas dapat di ketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah pada kolom pendapatan dari tahun anggaran 2016 ke tahun 2017. Peningkatan pendapatan desa tersebut berasal dari hasil usaha desa yakni BUMDES. Pada 20 Mei 2018 melalui [www.sie.pujonkidul.desa.id](http://www.sie.pujonkidul.desa.id) peneliti mencari *update* data terbaru terkait pendapatan yang diperoleh desa diketahui

bahwa penghasilan dari BUMDES yang masuk dalam pendapatan asli desa pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.3.**  
**Pendapatan BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul Tahun 2017**

No.	Unit	Pendapatan (dalam rupiah)
1	Kafe Sawah	201.050.998
2	Air	13.508.600
3	Edukasi	11.175.000
4	Permodalan Petani	2.445.000
5	TPST	4.530.000
6	<i>Live in</i>	28.885.000

Sumber : dikelola penulis melalui [www.sie.pujonkidul.desa.id](http://www.sie.pujonkidul.desa.id) ,2018

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa meskipun masih tergolong BUMDES yang baru berdiri dapat memberikan sumbangan yang besar kepada desa. Salah satu unit usaha BUMDES yang menyumbang paling besar kepada PADesa Pujonkidul ialah unit usaha wisata yakni Kafe Sawah. Pengelolaan unit usaha wisata Kafe Sawah merupakan awal mula masuknya salah satu *Corporate Social Responsibility* atau CSR dari salah satu bank milik pemerintah ke Desa Pujonkidul yakni Bank Negara Indonesia (BNI). Selain keberhasilan BUMDES dalam menyumbang PADesa Pujonkidul, peneliti memilih Desa Pujonkidul sebagai lokasi penelitian ialah di karenakan salah satu unit usahanya di kelola dengan melakukan kemitraan bersama bank. Unit usaha laku pandai BUMDES Sumber Sejahtera di kelola dengan kemitraan bersama BNI dalam wujud Agen46 BNI.

Pada Peraturan Desa Pujonkidul nomor 6 tahun 2015 Pasal 37 di sebutkan bahwa BUMDES Sumber Sejahtera dapat melakukan kerjasama usaha dengan

satu atau lebih BUMDES lain dan/atau dengan pihak ketiga.<sup>3</sup> Berdasarkan dasar hukum tersebut maka BUMDES dapat melakukan kemitraan dengan pihak lainnya dalam pengelolaan unit usaha. Kebijakan mengenai BUMDES di Kabupaten Malang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 tahun 2006. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan PADes dan kesejahteraan masyarakat desa perlu untuk dibentuk BUMDES yang mandiri dan tangguh.

Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi desa yang ingin mengelola asetnya dengan baik melalui BUMDES dapat meminta bantuan pendampingan dari beberapa BUMN yang telah ditunjuk, salah satunya dari bidang perbankan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Oni Eko Cahyono selaku Kasie Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang menyatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Desa telah menunjuk beberapa lembaga keuangan bank yang tergabung dalam BUMN untuk ikut serta mendorong pendirian dan pengelolaan BUMDES. Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan beliau.

*“Ya Kementerian Desa, wilayah Jawa Timur yang nangani BNI, wilayah Jawa Tengah yang menangani BRI, macam-macam bank kemitraan itu. Tapi itu modelnya bukan hanya CSR itu hanya kerjasama yang saling menguntungkan. Itu kerjasama yang saling menguntungkan.”<sup>4</sup>*

Peran dari adanya lembaga keuangan melalui kemitraan dengan menggandeng BUMDES di rasakan perlu dalam mewujudkan jalannya

---

<sup>3</sup> Peraturan Desa Pujonkidul nomor 6 tahun 2015 Pasal 37 ayat 1

<sup>4</sup> Wawancara bersama Pak Oni, Kasie Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa, DPMD, pada 19 Januari 2018/ 09:59 WIB

kepemerintahan yang baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Kemitraan yang di jalin oleh pihak BUMDES Pujonkidul dengan BNI sampai saat ini sudah dalam tahap pelaksanaan. Kemitraan tersebut telah dilaksanakan mulai tahun 2016 dimana awal mulanya CSR BNI yang masuk ke Desa Pujonkidul dalam pengelolaan Kafe Sawah. Beberapa layanan kemitraan yang di jalankan berupa kegiatan perbankan, mulai dari simpan pinjam, transaksi perbankan baik itu setoran maupun penarikan, pembayaran tagihan listrik, BPJS, PDAM.

Bank Negara Indonesia (BNI) telah melakukan kerjasama dengan berbagai desa di Indonesia dalam memberikan dorongan untuk mendirikan suatu usaha di masing-masing desa yang dapat menambah pemasukan desa dalam bentuk suatu badan usaha milik desa. BNI betekad untuk selalu konsisten dalam membantu pengembangan BUMDES, salah satunya dengan memanfaatkan dana CSR untuk mendesain BUMDES menjadi unit usaha yang bisa berkembang di desa.<sup>5</sup> Melalui BUMDES yang melakukan mitra dengan BNI maka dapat dijadikan sebagai salah satu langkah dari BNI untuk menerapkan program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menjadikannya Agen<sup>46</sup>.

Beberapa yang menjadi alasan kenapa perlu untuk dilakukan kemitraan dalam pengelolaan BUMDES menurut Prayitno selaku Direktur BUMDES Sumber Sejahtera adalah semakin mudahnya bagi masyarakat desa untuk dapat mengakses perbankan yang saat ini sudah menjadi kebutuhan. Keunggulan yang

---

<sup>5</sup> Laporan Tahunan 2016 PT BNI, Tbk. Hlm. 658. Diakses melalui [www.bni.co.id](http://www.bni.co.id) pada 2 Januari 2018 pada 12:19 WIB

dapat dirasakan dengan menjalin kemitraan bersama perbankan ialah terkait dengan jarak tempuh, efisiensi waktu, dan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat desa. Berikut merupakan penjelasan Prayitno kepada peneliti terkait kemitraan yang dijalin dengan BNI.

*“Banyak program-program yang harus memang melalui bank itu, dari pada warga kita... ya warga kita ke kecamatan ya, ojeknya orang tua-tua berapa? Rp. 20.000, kalau disini wes dekat gak kepanasan seperti itu. Dan juga poin yang pertama adalah menabung itu, kita galakkan juga, banyak.. kita targetnya ibu-ibu hanya sistem menabung yang sudah ada di desa itu kan dalam tanda kutip tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu tergantung yang megang. Kalau sudah kita koneksikan dengan bank.. safety-nya ya kan gitu..kita belajar disitu silahkan menabung, ngambilnya monggo (silahkan) anda mau ngambil di ATM mana saja gak harus BUMDES dibawa lari nanti. Jadi nasabahnya sudah... 400 mungkin sudah ada”<sup>6</sup>*

Keberadaan BNI sebagai mitra bagi BUMDES Sumber Sejahtera di harapkan dapat membantu dalam mendorong perekonomian desa dan masyarakatnya. Akan tetapi, ketika peneliti berada di lapangan merasakan bahwa keberadaan salah satu unit usaha yang dikelola dengan bermitra bersama bank tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan peningkatan terhadap jumlah pendapatan asli desa. Bahkan, sebagian besar pendapatan yang diperoleh desa dari BUMDES tersebut berasal dari unit usaha yang tidak melakukan mitra dengan pihak lain. Sehingga, dapat dikatakan bahwa BUMDES Sumber Sejahtera milik Desa Pujonkidul besar bukan karena bermitra dengan BNI melainkan dari kerja keras masyarakat Pujonkidul yang terlibat di dalam pengelolaan tersebut.

Kemitraan yang dijalin antara BUMDES dengan BNI kurang begitu menunjukkan keberhasilan yang secara signifikan terhadap pendapatan desa.

---

<sup>6</sup> Wawancara bersama Pak Prayitno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018/11:58 WIB



Keuntungan yang dapat dirasakan dari adanya kemitraan yang dijalin tersebut lebih kepada kemudahan akses yang diperoleh masyarakat desa dalam menggunakan layanan perbankan saja. Banyak yang melihat keberhasilan dalam pengelolaan BUMDES Sumber Sejahtera berdasarkan dari salah satu unit usaha saja yang sudah terbukti dapat menambah pendapatan desa, sehingga keberadaan unit usaha lainnya kurang mendapat perhatian. Kemudian, bagaimana dengan unit usaha lainnya yang bahkan salah satu diantaranya melakukan kemitraan dengan pihak lain dalam pengelolaannya. Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pola Kemitraan Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini berdasarkan uraian yang telah di jelaskan dalam latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

- 1.1.1. Bagaimana pola kemitraan dalam pengelolaan BUMDES di Desa Pujonkidul yang di lakukan bersama dengan Bank Negara Indonesia ?
- 1.1.2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan BUMDES?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan di Desa Pujonkidul adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Mengetahui model kemitraan yang di jalankan dalam mengelola BUMDES di Desa Pujonkidul;
- 1.3.2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan BUMDES Desa Pujonkidul.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini terbagi menjadi dua yakni, manfaat akademis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan terdiri dari sebagai berikut :

##### **1.4.1. Manfaat Akademis**

1. Memperoleh pemahaman baru terkait pengelolaan BUMDES yang dilakukan secara kemitraan dengan BUMN;
2. Memperoleh gambaran mengenai apa saja yang dapat menjadi penghambat dan pendukung dalam pengelolaan BUMDES.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah desa lainnya yang belum mulai merintis pendirian BUMDES. Hal tersebut dikarenakan keberadaan BUMDES sedikit banyak juga memiliki manfaat bagi pemasukan desa dan masyarakat desa;
2. Manfaat lain dari penelitian ini adalah kedepannya diharapkan bagi masyarakat yang belum berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDES untuk

dapat turut serta, karena pendapatan yang diperoleh nantinya juga akan di rasakan oleh masyarakat itu sendiri.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai tiga hal penting sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap penelitian yang terjadi di lapangan, penulis membaginya menjadi tiga bagian. *Pertama*, penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan oleh orang lain dengan tema yang sama sehingga penulis dapat menjadikannya sebagai perbandingan. *Kedua*, kerangka teoritis yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu konsep kemitraan dan konsep Badan Usaha Milik Desa untuk melakukan analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan. *Ketiga*, alur pikir penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai konsep teoritik yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian.

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian sub bab pembahasan mengenai penelitian terdahulu penulis memanfaatkan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh orang lain dengan tema yang sama seperti yang diambil oleh penulis. Sehingga, dengan adanya penelitian terdahulu tersebut penulis dapat menjadikannya sebagai perbandingan atau acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Berikut ini merupakan kumpulan dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan acuan mengenai penelitian terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

*Pertama*, penelitian dengan judul “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”. Penelitian tersebut dilakukan oleh

Coristya Berlian Ramadana dan kawan-kawan dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu, Administrasi, Universitas Brawijaya. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah, berdirinya BUMDES di Desa Landungsari telah dilandasi oleh hukum yakni Perdes No. 2 tahun 2008 tentang Pembentukan BUMDES. Usaha yang dikembangkan melalui BUMDES tersebut meliputi bidang pertanian, peternakan, simpan pinjam, pengelolaan sampah, jasa, *home industry*, dan pasar. Namun, dari tujuh bidang usaha yang ada hanya satu bidang yang berjalan yaitu simpan pinjam. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan diketahui bahwa hasil dari didirikannya BUMDES belum dapat meningkatkan pendapatan desa.<sup>1</sup>

Kedua, judul penelitian “*Pola Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan Reklamasi Pantai di Kota Makassar*” oleh Afni A. Penelitian tersebut menanggapi perihal pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dan PT. Yasmin Bumi Asri dalam kebijakan reklamasi pantai di Kota Makassar. Dalam kemitraan tersebut, swasta berperan sebagai pihak pengembang dimana dalam pelaksanaan kemitraannya PT Yasmin Bumi Asri akan mengerjakan seluruh proses pelaksanaan reklamasi sekitar 157,23 Ha. Pemanfaatan lahan hasil reklamasi tersebut dibagi menjadi dua yakni yang digunakan oleh pemerintah sekitar 50,6 Ha sedangkan yang dimanfaatkan oleh

---

<sup>1</sup> Coristya Berlian Ramadana, dkk. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6. Diakses melalui <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/189> pada 4 Oktober 2017 pukul 15:41 WIB



pihak swasta seluas 102,7 Ha. Faktor yang dapat mempengaruhi dalam kemitraan yang di jalin oleh pemerintah dan swasta tersebut adalah adanya bantuan modal dan peralatan serta kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi yang menjadi penghambat dalam kemitraan tersebut adalah belum adanya perizinan reklamasi dari pemerintah pusat.<sup>2</sup>

*Ketiga, judul penelitian “Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang)”* oleh Fandy Kurniawan, dan kawan-kawan. Dalam menanggapi permasalahan dalam sektor pariwisata bukan hanya menjadi tanggungjawab dari pemerintah saja, namun peran dari masyarakat dan sektor swasta juga sangat dibutuhkan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadi kesepakatan yang telah disetujui antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang, pihak swasta dan masyarakat desa sekitar terkait dengan kerjasama pengembangan dan pemanfaatan Tirta Wisata. Dengan adanya kerjasama yang dijalin tersebut ternyata mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang. Kerjasama yang dilakukan tersebut merupakan salah satu strategi promosi oleh Disporabudpar dalam memperkenalkan potensi dan menarik minat wisatawan untuk mengunjungi Tirta Wisata.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Afni A. *Pola Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan Reklamasi Pantai di Kota Makassar*. Skripsi, Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. 2017. Diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/24458> pada 19 Maret 2018 pukul 5:40 WIB

<sup>3</sup> Fandy Kurniawan, dkk. *Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No 1, Jurusan Administrasi Publik, FIA, UB. Diakses melalui <https://adiministrasipublik.studentjournal.ub.ac.id> pada 4 November 2017 pukul 6:58 WIB

*Keempat*, dengan judul penelitian “*Strategi Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri dalam Pengelolaan Objek Wisata Umbul Ponggok di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*” oleh Sri Astuti Apriyani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi BUMDES Tirta Mandiri dalam pengelolaan objek wisata Umbul Ponggok adalah BUMDES membuka unit UKM disekitar lokasi wisata, membuka tempat parkir di lahan milik warga sekitar wisata, mengadakan pelatihan untuk karyawan BUMDES, pemasangan CCTV di lokasi wisata Umbul Ponggok. Beberapa strategi tersebut dilaksanakan berdasarkan agenda program kerja yang telah ditentukan dengan anggaran yang berasal dari BUMDE Tirta Mandiri.<sup>4</sup>

*Kelima*, judul “*Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*” oleh Edy Yusuf Agunggunanto, dan kawan-kawan. Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Landasan hukum dalam berdirinya BUMDES di Kabupaten Jepara adalah Peraturan Daerah No. 15 tahun 2010 tentang BUMDES. Pemerintah Kabupaten telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 4,8 Miliar pada tahun 2014 untuk bantuan pengelolaan BUMDES di seluruh Kabupaten Jepara. Jenis usaha yang ada di Kabupaten Jepara adalah simpan pinjam, bank sampah, pengelolaan air bersih desa, budidaya ternak kambing, dan perdagangan produk hasil olahan. Kendala

---

<sup>4</sup> Sri Astuti Apriyani. *Strategi Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri dalam Pengelolaan Objek Wisata Umbul Ponggok di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses melalui <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/viewFile/3568/3254> pada 4 November 2017 pukul 7:11 WIB

dalam pengelolaan BUMDES adalah keterbatasan modal sehingga BUMDES tidak mampu menjalankan beragam jenis usaha dan kurangnya pengetahuan pengurus dalam manajemen BUMDES.<sup>5</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan sebelumnya, berikut ini adalah ringkasan dari penjelasan yang akan menggambarkan mengenai perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan selanjutnya. Lebih jelasnya perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1.**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). (Coristya Berlian Ramadana, dkk. )	Berdirinya lembaga perekonomian masyarakat atau BUMDES dilandasi oleh Perdes No. 2 tahun 2008 tentang Pembentukan BUMDES. Terdapat tujuh unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES namun hanya satu unit usaha yang masih berjalan. Dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa hanya satu unit usaha yang berjalan maka berdirinya BUMDES tersebut masih dianggap belum mampu meningkatkan	Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki lokasi yang sama yakni di Kabupaten Malang, yang membedakan penulis mengambil lokasi desa yang lainnya di Kabupaten Malang. Lokasi penelitian yang akan penulis ambil telah memiliki BUMDES dengan omset yang lebih dari cukup sehingga dapat membantu untuk menambah pendapatan asli desa.

<sup>5</sup>Edy Yusuf Agunggunanto. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol. 13, No. 1. Universitas Diponegoro. Diakses melalui <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/395> pada 4 Oktober 2017 pukul 18:54 WIB

		pendapatan desa.	
2	Pola Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan Reklamasi Pantai di Kota Makassar (Afni A, 2017)	Kemitraan yang dijalankan melibatkan pemerintah Sulawesi Selatan dan PT Yasmin Bumi Asri. Dalam kemitraan tersebut PT Yasmin Bumi Asri bertindak sebagai pihak pengembang yang melaksanakan proses reklamasi pantai. Sedangkan pemerintah Sulawesi Selatan berwenang dalam kebijakan yang dijalankan	Peneliti lebih memfokuskan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan BNI dalam pengelolaan BUMDES yang ada di Desa Pujonkidul
3	Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang). ( Fandy Kurniawan, dkk)	Terjadi kesepakatan yang telah disetujui antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang, pihak swasta dan masyarakat desa sekitar terkait dengan kerjasama pengembangan dan pemanfaatan Tirta Wisata. Dengan adanya kerjasama yang dijalin tersebut ternyata mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.	Kemitraan dalam pengelolaan BUMDES yang menjadi lokasi penelitian penulis melibatkan lembaga keuangan bank (BNI) yang juga merupakan BUMN. Sehingga dapat dikatakan kemitraan yang dijalin tersebut terdiri dari pemerintah (BUMN) dengan pemerintah desa
4	Strategi Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri dalam Pengelolaan Objek Wisata Umbul Ponggok di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten (Sri Astuti Apriyani)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi BUMDES Tirta Mandiri dalam pengelolaan objek wisata Umbul Ponggok adalah BUMDES membuka unit UKM disekitar lokasi wisata, membuka tempat parkir	Pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada strategi apa saja yang dilakukan oleh pengelola BUMDES, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih kepada model kerjasama atau



		di lahan milik warga sekitar wisata, mengadakan pelatihan untuk karyawan BUMDES, pemasangan CCTV di lokasi wisata Umbul Ponggok.	kemitraan yang dijalin oleh pemerintah desa dengan BUMN
5	Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). (Edy Yusuf Agunggunanto, dkk., )	Pendirian BUMDES di Kabupaten Jepara dilandasi oleh Perda No. 15 tahun 2010 tentang BUMDES. Meskipun pada tahun 2014 pemerintah telah memberikan dana sebesar Rp. 4,5 Miliar namun yang masih menjadi kendala dalam pengembangan usaha yang dijalankan BUMDES ialah keterbatasan modal. Selain itu minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pengurus juga menjadi penghambat berkembangnya BUMDES setempat.	Salah satu unit dari BUMDES yang akan penulis jadikan lokasi penelitian ini telah menghasilkan omset yang tidak sedikit sehingga mampu untuk dijadikan modal dalam pengurusan atau pengelolaan BUMDES selanjutnya. Bahkan dari omset yang telah dihasilkan tersebut telah dinilai dapat membantu meningkatkan pendapatan asli desa.

*Sumber : diolah dari berbagai sumber, 2018*

## 2.2. Kerangka Teoritis

Dalam sub bab pembahasan ini penulis menjelaskan mengenai konsep Kemitraan, BUMDES, Lembaga Keuangan. Dengan menggunakan konsep tersebut diharapkan dapat membantu penulis untuk menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah.



### 2.2.1. Kemitraan

Secara etimologis istilah kemitraan berasal dari kata *partnership* atau dari kata *partner*. Apabila diterjemahkan *partner* memiliki arti pasangan, jodoh, dan sekutu. Sedangkan *partnership* memiliki arti persekutuan atau kongsi. Berangkat dari itu, Sulistiyanı mendefinisikan kemitraan sebagai berikut :

Dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>6</sup>

Tjahjanulin Domai mendefinisikan *partnership* sebagai upaya bersama atau *voluntary* untuk sebuah tujuan umum.<sup>7</sup> Sedangkan, menurut Hafsah kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>8</sup> Hetifah mendefinisikan *partnership* atau kemitraan sebagai hubungan yang terjadi antara *civil society*, pemerintah dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian.<sup>9</sup> Berdasarkan dari pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa suatu kemitraan atau kerjasama dapat dijalankan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam kerjasama
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
3. Terdapat kesepakatan untuk melakukan kerjasama atau kemitraan

<sup>6</sup> Ambar Teguh Sulistiyanı. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media. Hlm 129

<sup>7</sup> Tjahjanulin Domai. 2011. *Sound Governance*. Malang: UB Press. Hlm 75

<sup>8</sup> Mohammad Jafar Hafsah. 2000. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm 43

<sup>9</sup> Hetifah Sj Sumarto. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance : 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm 16

#### 4. Saling membutuhkan<sup>10</sup>

Karakteristik atau ciri-ciri umum dari suatu kerjasama yang dibuat oleh berbagai pihak dalam hal kemitraan adalah sebagai berikut :

1. Muncul karena adanya keinginan untuk mengadakan hubungan konsensual, dimana hubungan tersebut muncul bukan karena diatur oleh suatu peraturan melainkan dari masing-masing pribadi para pihak;
2. Selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, pekerja atau gabungan dari keduanya;
3. Pada umumnya terdiri atas perusahaan dan mitranya;
4. Dibentuk untuk memperoleh keuntungan bagi para pihak yang terkait.<sup>11</sup>

#### a. Model-model Kemitraan

Menurut Farazmand, terdapat lima model yang dapat dikatakan mampu untuk membangun suatu kemitraan dalam proses *governance*, antara lain :

1. *The autonomous model*  
*The strategies to build this kind of partnership may include: state initiation with NGOs, citizens, and private sector; initiation through proposals and policy idea formulations with government by all other partners; third-party initiation to pull governmental and other parties into partnership building at local and national levels.*
2. *The interdependence model*  
*Such a partnership is based on the premise that all parties are living in an interdependent world in which no one is self-sufficient The same rationale is applied to building an interdependence model of partnership within any society, between government and various actors of civil society.*
3. *The globalization-convergence model*  
*The convergence theory holds that with economic market convergence, cultural and policy-governance convergence follow, hence a global convergence partnership is built against all perceived and potential adversaries or challengers.*
4. *The hybrid model*  
*The hybrid model is a combination of the above models. It is hybrid in that it resembles features of all models, yet it may display its own distinct*

<sup>10</sup> Ambar Teguh Sulistiyani. *Op.cit.* Hlm 129-130

<sup>11</sup> Johanes Ibrahim. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 26-27

*characteristics. But it puts less-developed nations at a disadvantage because their ability to maneuver around policy choices is limited.*

5. *The elite model*

*Elite partnerships take place on a daily basis for market expansion and domination, control of the power structure, national interests, and the exclusion of nonelite masses from strategic decision structures for many reasons.*<sup>12</sup>

Farazmand mengidentifikasi lima model kemitraan yang dapat dikatakan mampu membangun kemitraan dalam *governance*. Pertama, model otonom. Dalam membangun kemitraan model otonom dapat dilakukan dengan cara : inisiasi dengan LSM, masyarakat, dan sektor swasta; inisiasi melalui proposal dan formulasi ide kebijakan dengan pemerintah oleh semua mitra lainnya; inisiasi pihak ketiga untuk menarik pemerintah dan lain sebagainya untuk membangun kemitraan di tingkat lokal dan nasional. Sehingga dijelaskan dalam buku tersebut model dalam pembentukan kemitraan dapat dijalin ketika kemitraan tersebut ada yang menginisiasi awalnya. Kedua, model selanjutnya adalah model *interdependensi*. Model kemitraan tersebut mengacu kepada prinsip dimana semua yang hidup di dunia tidak dapat sepenuhnya dikatakan mandiri. Hal tersebut dikarenakan adanya sifat saling ketergantungan satu sama lain. Berdasarkan prinsip tersebut maka menjadikan alasan untuk membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya. Mengingat dalam memenuhi kebutuhan maka diperlukan adanya kerjasama dengan pihak lainnya yang dapat terwujud melalui hubungan kemitraan dimana pihak yang terlibat juga memiliki tujuan yang sama.

---

<sup>12</sup> Ali Farazmand. 2004. *Sound Governance : Policy and Administrative Innovations*. London: Praeger Publisher. Hlm 94-96

*Ketiga*, model globalisasi-konvergensi yang didasarkan pada kekuatan keuangan, produksi, pemasaran, ekonomi, dan kebijakan. Menurut teori konvergensi, dengan adanya konvergensi pasar ekonomi maka dapat terbentuk konvergensi budaya dan kebijakan dalam pemerintahan, dimana kemitraan dapat dijadikan untuk melawan pesaing. Maksudnya disini adalah dalam menjalin suatu hubungan kemitraan terutama dalam hal usaha beberapa permasalahan terkait keuangan, produksi, pemasaran, ekonomi, dan kebijakan dapat menjadikannya sebagai alasan untuk bermitra. *Keempat*, model *hybrid* merupakan kombinasi dari beberapa model sebelumnya. Model *hybrid* memiliki fitur yang menyerupai dengan model-model lainnya, namun masih memiliki ciri tersendiri sebagai pembeda. Model kemitraan tersebut lebih tepat untuk diterapkan di negara-negara maju yang memiliki sumber daya besar. Namun, model tersebut dapat merugikan negara yang kurang maju karena keterbatasan dalam kemampuan bermarnuver.

*Kelima*, model elit merupakan hal paling umum yang sering dijumpai dalam pembentukan kemitraan dengan anggapan bahwa elit ekonomi dan elit politik mendominasi arena kebijakan pemerintah hampir di setiap tempat. Kemitraan model ini dapat berlangsung setiap hari dan mendominasi pasar, kontrol terhadap struktur pemerintahan, kepentingan nasional, dan eksklusi massa non-elit dari struktur keputusan strategis karena banyak alasan.



## b. Maksud dan Tujuan Kemitraan

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari adanya kemitraan adalah *Win-win Solution Partnership*.<sup>13</sup> Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan lebih jelasnya ialah, meliputi :

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional
5. Memperluas kesempatan kerja
6. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.<sup>14</sup>

## c. Strategi Pembentukan Kemitraan

Menurut Farazmand, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk membantu dalam membangun kemitraan dalam mewujudkan *governance*.

Berikut ini merupakan strategi-strategi yang dapat dilakukan, antara lain :

1. *Adaptive strategies*  
*Adaptive strategies inform governance actors to accurately read their changing environmental dynamics and consider strategic choices in partnership building, to maximize chances of successful governance. Adaptive strategies may or may not be the real choices the governance actors opt for . An example of adaptive strategy for partnership building is urban governance systems adopting sister-city alliances and partnerships for staying up-to-date and for sharing the latest information on local.*
2. *Proactive strategies*  
*Proactive strategies are real choices governments may opt for to either (a) genuinely involve actors of civil society and share power and responsibility to enhance governance process, or (b) build alliances for dominance, aggression, and control of governance domains at all levels.*
3. *Reactive strategies*  
*They are a reaction to chains of events or the effects of actions, causing the necessity for partnership building. Reactive strategies may or may not be the real choices for partnership building. An example of this type of strategic choice may include regional security alliances that are typically formed by governments in reaction to others that have already done so.*

<sup>13</sup> Mohammad Jafar Hafsa. *Op.Cit.* Hlm 62

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm 63



4. *Accommodative strategies*

*Accommodative strategies are approaches to partnership building that aim to manage and reconcile conflicting interests and that would prevent tensions or escalation of contradictions. Accommodative strategies help build tolerance in governance process, not integration or genuine participation.*

5. *Neutralizing strategies*

*Neutralizing strategies are deliberate attempts by governments to neutralize oppositions and potential threats. Governments form partnerships with other governments or with adversarial parties on a limited basis to prevent or reduce the escalation of hostility and possible wars. Two governments may form partnerships in maintaining peace and order on their borders with ethnic disturbances, whereas both may be at odds on many other issues.<sup>15</sup>*

Farazmand mengklasifikasikan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk membentuk kemitraan dalam upaya menyukseskan pemerintahan. *Pertama*, strategi adaptif mengarahkan aktor pemerintahan untuk secara akurat dapat membaca perubahan dinamika lingkungan serta mempertimbangkan pilihan strategis dalam pembentukan kemitraan. Hal tersebut dikarenakan agar dapat memaksimalkan pemerintahan yang baik. *Kedua*, strategi proaktif merupakan strategi kemitraan untuk pemerintahan yang lebih baik dengan : melibatkan aktor masyarakat sipil serta berbagi kekuasaan dan tanggungjawab untuk meningkatkan proses pemerintahan; membangun aliansi untuk mendominasi, agresi dan kontrol pemerintahan di semua tingkatan. *Ketiga*, strategi reaktif merupakan reaksi terhadap rangkaian peristiwa yang dapat menimbulkan kebutuhan akan pembentukan kemitran. Contoh dari strategi ini adalah bisa berupa aliansi keamanan regional yang dibentuk oleh pemerintah.

*Keempat*, strategi akomodatif merupakan suatu strategi pendekatan untuk membangun kemitraan yang bertujuan untuk mengelola dan memadukan

---

<sup>15</sup> Ali Farazmand. *Op.Cit.* Hlm 92-93

kepentingan serta mencegah konflik atau ketegangan. Strategi model ini dianggap mampu untuk membangun toleransi dalam proses pemerintahan. *Kelima*, strategi netralisasi merupakan upaya deliberatif pemerintah untuk menetralsir oposisi dan ancaman yang berpotensi. Pemerintah membentuk kemitraan dengan pemerintah lainnya untuk mencegah dan mengurangi persaingan. Kedua pemerintahan dapat membentuk kemitraan dalam menjaga perdamaian dan ketertiban.

### 2.2.2. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya disebut dengan BUMDES/BUMDesa merupakan salah satu pilar perekonomian di desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Sebagai suatu lembaga ekonomi masyarakat yang memiliki badan hukum, BUMDES dibentuk berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya disebut BUMDES merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya di milki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>16</sup>

Pengelolaan lembaga usaha sejenis ini di laksanakan oleh masyarakat setempat dan pemerintah desa sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (6)

Sebagai salah satu program pemerintah dalam memperbaiki perekonomian masyarakat desa, BUMDES didirikan berdasarkan dengan peraturan yang ada. Salah satu tujuan dari pendirian BUMDES ialah dapat membantu desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Berikut ini merupakan pembeda antara BUMDES dengan lembaga ekonomi komersial yang lainnya, diantaranya :

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha berasal dari desa dan masyarakat melalui penyertaan modal;
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal;
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dari hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa;
6. Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa;
7. Pelaksanaan operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh pemerintah desa, BPD, dan anggota.<sup>17</sup>

Sebagai lembaga ekonomi masyarakat desa yang di kelola secara langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat, maka dalam pengelolaannya BUMDES harus memiliki beberapa prinsip. Beberapa prinsip umum yang terdapat dalam pengelolaan BUMDES meliputi :

1. Pengelolaan BUMDES di jalankan dengan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*;
2. Dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, mengutamakan modal yang berasal dari masyarakat dan pemerintah desa;
3. Didirikan dengan tujuan yang jelas;
4. Melibatkan pihak ketiga yang tidak hanya memiliki dampak terhadap masyarakat desa itu sendiri, melainkan juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA). 2007. Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Hlm. 4-5

### 2.2.3. Lembaga Keuangan Bank

Menurut Kasmir, secara umum lembaga keuangan didefinisikan sebagai setiap perusahaan yang bidang usahanya bergerak di bidang keuangan.<sup>19</sup> Maksudnya adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan sektor keuangan, mulai dari menghimpun dana, menyalurkan dana, maupun jasa-jasa keuangan lainnya. Definisi lain dari lembaga keuangan ialah menurut Wijaya dan Hadiwigeno dalam Latumaerissa yang mengatakan bahwa lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang melancarkan pertukaran barang dan jasa dengan penggunaan uang atau kredit dan membantu menyalurkan tabungan sebagai masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dana untuk investasi.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Latumaerissa, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (*financial assets*) atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset non-keuangan (*non-financial assets*).<sup>21</sup>

Dalam praktiknya lembaga keuangan digolongkan menjadi dua diantaranya lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Pengelompokan lembaga keuangan menjadi dua golongan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini :

---

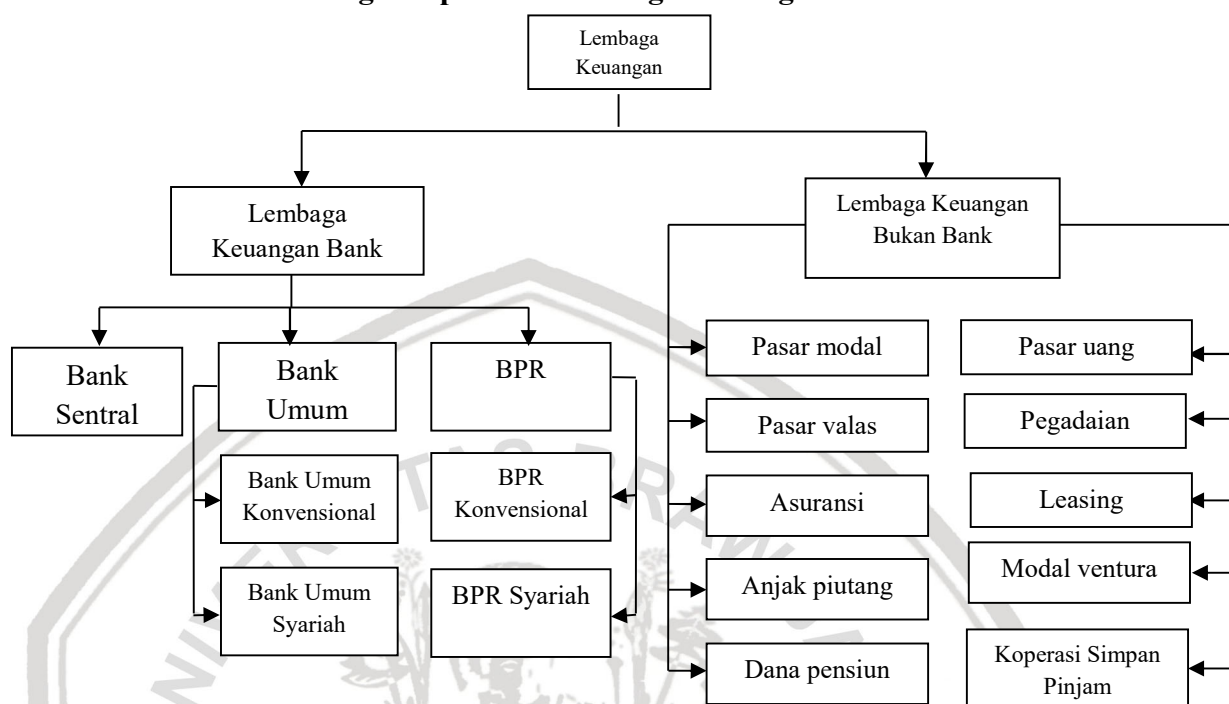
<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm. 11-12

<sup>19</sup> Kasmir. 1998. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 2

<sup>20</sup> Julius R. Latumaerissa. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat. Hlm 39-40

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm 40

**Bagan 2.1.**  
**Pengelompokkan Lembaga Keuangan**



*Sumber : data diolah penulis dari buku Kasmir berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2018*

Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui bahwa lembaga keuangan dibedakan menjadi dua kelompok yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pada penelitian ini penulis akan lebih memfokuskan pada satu kelompok yaitu lembaga keuangan bank, dimana bank yang dimaksud adalah bank umum yang konvensional. Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya.<sup>22</sup> Terdapat lima status kepemilikan terhadap bank umum diantaranya, bank milik negara, bank milik swasta nasional, bank swasta asing, bank pembangunan daerah, dan bank campuran.

<sup>22</sup> Kasmir. *Op.Cit.* Hlm 5



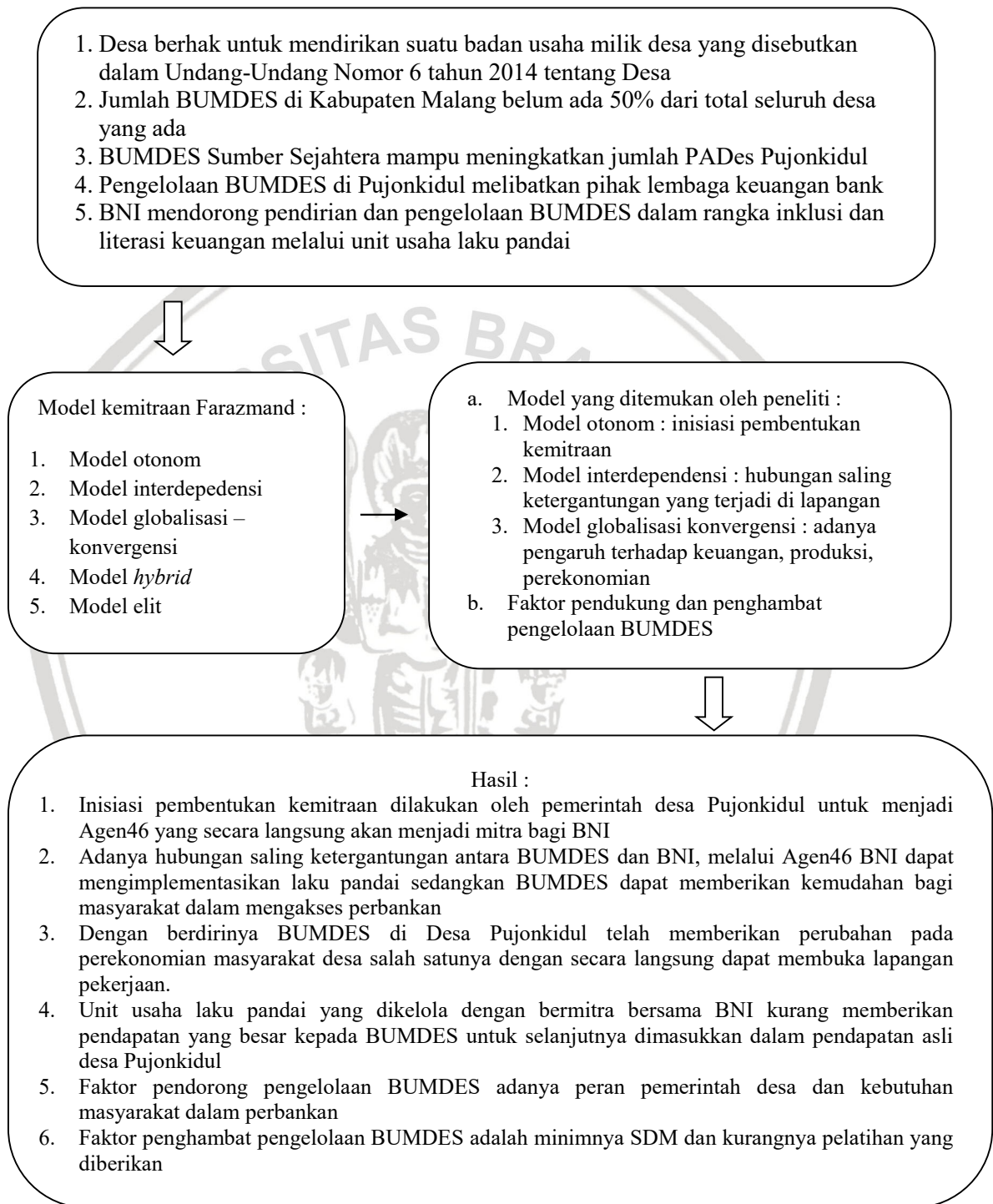
Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang turut serta dalam pengelolaan BUMDES di Desa Pujonkidul. Status kepemilikan dari BNI sendiri adalah bank milik negara yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana modal keseluruhan dari bank tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah UU tersendiri.<sup>23</sup> Mengingat seluruh modalnya berasal dari pemerintah maka keuntungan dari bank milik negara juga dimiliki oleh pemerintah pula. Selain BNI, beberapa bank umum yang status kepemilikannya merupakan bank milik negara adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Bukopin, dan Bank Tabungan Negara (BTN).

---

<sup>23</sup> Julius R. Latumaerissa. *Op.Cit.* Hlm 137

### 2.3. Alur Pikir Penelitian

#### Bagan 2.2. Alur Pikir Penelitian



*Sumber : diolah penulis, 2018*

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu komponen penting dalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah. Penggunaan beberapa metode penelitian dalam hal ini adalah bertujuan untuk membantu memudahkan bagi peneliti untuk menyelesaikan tugasnya. Metode penelitian memiliki pengertian sebagai suatu pedoman atau tuntunan untuk menjalankan suatu penelitian, mulai dari menggunakan sarana apa saja hingga bagaimana prosedur melakukan penelitian.<sup>1</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu pendekatan umum yang digunakan untuk mengkaji topik dari penelitian.<sup>2</sup> Adapun beberapa hal pokok dalam metode penelitian yang penulis lakukan, diantaranya sebagai berikut :

*Pertama*, ialah jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun rangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti selama di lapangan. *Kedua*, fokus penelitian yang merupakan batasan-batasan bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan yang diambil. *Ketiga*, lokasi penelitian dimana didalamnya menjelaskan mengenai tempat yang menjadi lokasi bagi penulis untuk melakukan penelitian. *Keempat*, penulis menggunakan dua jenis data yang dijadikan sebagai penunjang hasil penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder. *Kelima*, teknik dalam mengumpulkan data yang penulis lakukan terdiri

---

<sup>1</sup> Restu Kartiko Widi. 2010. *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*. Graha Ilmu: Yogyakarta. Hlm. 68

<sup>2</sup> Dedy Mulyana. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif "Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya"*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 145

dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. *Keenam*, teknik dalam menentukan informan berguna sebagai penentu dalam penyediaan informasi yang penulis butuhkan untuk mendapatkan hasil penelitian. *Ketujuh*, yang terakhir adalah teknik dalam melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian jenis ini merupakan suatu metode penelitian yang memiliki karakteristik dapat memberikan deskripsi gambaran yang peneliti temukan sesuai dengan kenyataan selama melakukan kegiatan di lapangan. Dengan kata lain, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi secara langsung melalui komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan objek yang sedang diteliti.<sup>3</sup> Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Haris Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba. Hlm. 9

<sup>4</sup> Moh. Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 43

Penelitian dengan menggunakan jenis kualitatif deskriptif merupakan proses penelitian ilmiah dengan tujuan untuk dapat memberikan gambaran secara nyata mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan penelitian, disajikan secara terperinci berdasarkan sumber-sumber atau keterangan dari informan yang terkait dengan penelitian. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penelitian jenis kualitatif yang memberikan deskripsi terkait fenomena di lapangan berusaha untuk memperoleh jawaban dari masalah yang timbul dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan objek yang diteliti.

### **3.2.Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memiliki tujuan untuk memberikan batasan-batasan terhadap peneliti dalam melakukan penelitian dengan menggunakan teori atau konsep yang sesuai dengan topik permasalahan yang diangkat. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti untuk dapat mengelola data yang diperoleh selama dilapangan dengan baik. Dengan adanya fokus penelitian tersebut maka penulis dapat memilah dengan cermat data yang dianggap mendukung dan data yang kurang mendukung dalam hasil penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah terkait dengan model kemitraan yang dijalin oleh BUMDES Sumber Sejahtera sebagai lembaga ekonomi masyarakat Desa Pujonkidul dengan lembaga keuangan bank dimana dalam hal ini adalah Bank Negara Indonesia (BNI). Wujud dari pengelolaan BUMDES yang dijalankan dengan sistem kemitraan tersebut menjadi fokus peneliti dalam melakukan analisis selanjutnya.



### 3.3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis telah menentukan lokasi yang bertempat di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Penulis memilih desa tersebut sebagai lokasi penelitian karena penulis tertarik kepada sistem pengelolaan BUMDES yang dijalankan oleh pemerintah desa, masyarakat, serta bantuan dari CSR bank BNI. Selain itu, lokasi penelitian tersebut terletak di wilayah yang strategis sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan. Terkait dengan pengelolaan BUMDES yang berjalan di desa tersebut telah mendapat beberapa penghargaan baik itu dari tingkat nasional maupun daerah. Sehingga peneliti menjadi semakin tertarik untuk melakukan penelitian pada BUMDES tersebut.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang merupakan penelitian bersifat deskriptif sehingga dalam penyajian datanya disampaikan dalam bentuk uraian kalimat sebagai penjelasnya. Dalam penelitian kualitatif terdapat sumber data yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Berikut ini merupakan penjelasan dari data primer dan data sekunder :

#### 3.4.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan sesuai dengan temuannya. Dalam melakukan kegiatan penelitian, data dengan jenis primer tersebut dapat diperoleh berdasarkan dengan hasil dari

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan sumber informan yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, atau yang biasa disebut dengan responden.<sup>5</sup> Jenis data atau informasi primer dapat diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuisioner, atau bisa juga dengan melakukan metode tanya jawab (wawancara).

### 3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian yang berasal dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder biasanya diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan atau sumber-sumber bacaan yang sudah teruji kebenarannya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa jenis data sekunder tidak diperoleh dari sumber pertama sebagai sarana mendapat data atau informasi. Berikut ini merupakan data sekunder yang penulis gunakan untuk melengkapi hasil penelitian :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2016 tentang Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa

---

<sup>5</sup> Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 16

5. Peraturan Desa Pujonkidul Nomor 3 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2016
6. Peraturan Desa Pujonkidul Nomor 6 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pujonkidul
7. AD/ART BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul
8. Profil Desa Pujonkidul Tahun 2017

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghimpun, mengumpulkan, dan menjangkau data guna terciptanya suatu hasil penelitian yang benar-benar sesuai dengan penemuan di lokasi penelitian.<sup>6</sup> Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan ialah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 3.5.1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode dalam teknik pengumpulan data suatu penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kehidupan nyata.<sup>7</sup> Dalam proses pengumpulan data, peneliti melihat dan mengamati secara langsung pengelolaan kemitraan yang dilakukan oleh BUMDES Sumber Sejahtera desa Pujonkidul dengan BNI Kantor Cabang Pembantu Unit Universitas Brawijaya. Peneliti

---

<sup>6</sup> Suwartono. 2014. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Hlm. 41

<sup>7</sup> S. Nasution. 2012. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 106

melakukan wawancara secara langsung kepada pemerintah desa selaku inisiator dalam menjalin kemitraan antara BUMDES dengan BNI, direktur BUMDES Sumber Sejahtera selaku orang yang bertanggungjawab atas jalannya pengelolaan BUMDES, pendamping lapangan Agen46 BNI, dan perwakilan masyarakat desa Pujonkidul. Selanjutnya peneliti juga dapat melihat secara langsung pelayanan yang diberikan oleh unit laku pandai kepada masyarakat desa Pujonkidul terkait transaksi perbankan.

### 3.5.2. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh data yang mendukung hasil penelitian melalui interaksi verbal/lisan dengan beberapa informan yang telah ditentukan. Menurut Kahn dan Cannell wawancara merupakan suatu diskusi yang melibatkan antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu.<sup>8</sup> Berdasarkan tingkat formalitasnya, wawancara terbagi menjadi tiga kelompok diantaranya, wawancara tidak terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model wawancara dengan semi terstruktur dikarenakan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui suatu peristiwa atau permasalahan tertentu. Penulis menentukan informan untuk wawancara dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Samiaji Sarosa. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks. Hlm. 45

**Tabel 3.1.**  
**Daftar Informan**

No.	Nama Informan	Jabatan
1	Udi Hartoko	Kepala Desa Pujonkidul
2	Jefri	Petugas ABB BNI Kantor Cabang Pembantu Unit Universitas Brawijaya
3	Oni Eko Cahyono	Kepala Sie Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Malang
4	Sudirman	Sekretaris Desa Pujonkidul
5	Prayetno	Direktur BUMDES Sumber Sejahtera
6	Ertifah	Masyarakat Desa Pujonkidul
7	Lilik	Masyarakat Desa Pujonkidul

*Sumber : diolah oleh penulis, 2018*

### 3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan satu dari beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh responden atau subjek penelitian tentang subjek yang sedang diteliti. Dalam teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi ini dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan data melalui media tertulis atau dokumen lainnya yang berasal dari subjek yang bersangkutan. Dokumentasi peneliti yang dapat digunakan untuk melengkapi hasil penelitian ini adalah pengambilan gambar selama peneliti berada di lapangan serta dokumen lainnya yang dapat peneliti dokumentasikan seperti daftar nama nasabah unit laku pandai BUMDES Sumber Sejahtera.

### 3.6. Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik dalam penentuan informan dengan cara *purposive sampling*. Metode dalam penentuan informan



dengan metode *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang yang dipilih sebagai narasumber merupakan informan yang paling memahami dan mengerti mengenai seluk beluk yang menjadi objek dan subjek penelitian, atau orang tersebut merupakan seorang penguasa sehingga akan mempermudah peneliti dalam menjelajahi obek maupun situasi sosial yang diteliti.<sup>9</sup> Jenis teknik ini merupakan teknik pengambilan informasi sesuai dengan tujuan dari penelitian itu dilakukan. Jadi, sebelum melakukan terjun ke lapangan melalui penelitian maka penulis harus membuat daftar informan yang akan dijadikannya sebagai narasumber atau responden. Pemilihan informan harus sesuai berdasarkan kebutuhan data dengan melihat peran dari masing-masing narasumber. Hal tersebut dikarenakan penulis berharap dapat memperoleh sumber-sumber informasi yang terpercaya.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Patton dalam Basrowi analisis data merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar.<sup>10</sup> Menurut Bogdan dan Taylor dalam Basrowi, analisis data merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang sidarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan tema dan hipotesis itu.<sup>11</sup> Berikut ini merupakan teknik dalam melakukan analisis data kualitatif dengan model Miles Huberman :

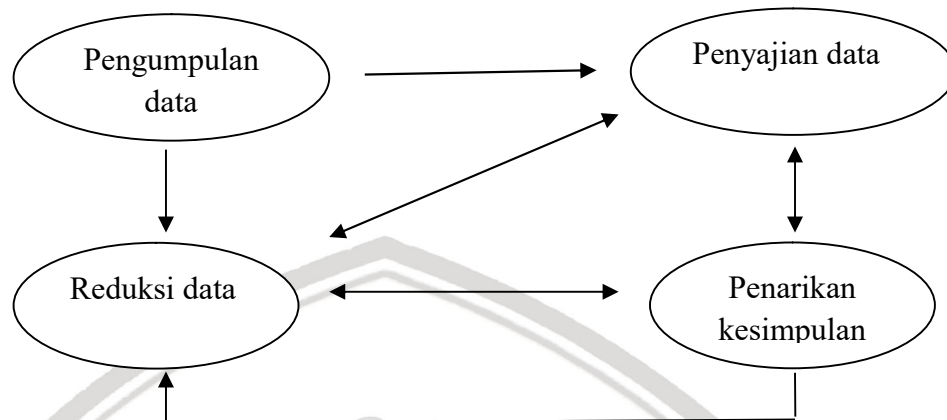
---

<sup>9</sup> Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm 219

<sup>10</sup> Basrowi Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 91

<sup>11</sup> *Ibid*.

**Bagan 3.1.**  
**Model Interaktif Miles dan Huberman**



*Sumber : diolah dari buku Metode Penelitian Ilmu Sosial Karya Muhammad Idrus, tahun 2017*

Tahap reduksi data merupakan proses merangkum data yang diperoleh selama dilapangan, dengan memilih data-data yang berkaitan dengan hal-hal pokok, dan lebih difokuskan pada hal-hal yang dianggap penting dan dibutuhkan saja. Kemudian tahap selanjutnya adalah penyajian data, pada tahap ini penulis akan menyajikan data atau informasi yang telah diperolehnya selama melakukan penelitian dalam bentuk uraian singkat yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Tahap terakhir yang peneliti lakukan adalah melakukan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini merupakan langkah terakhir dalam melakukan analisis data. Pada bagian ini akan dilakukan penarikan kesimpulan secara menyeluruh atas data-data atau informasi yang telah diperoleh selama melakukan kegiatan penelitian di lapangan.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Erlangga: Jakarta. Hlm 151

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai beberapa sub bab tentang deskripsi wilayah atau lokasi penelitian, yakni Desa Pujonkidul dan BUMDES Sumber Sejahtera. Beberapa sub bab yang akan dijelaskan tersebut berisi perihal gambaran umum kondisi wilayah, seperti kondisi geografi, kondisi demografi, serta beberapa tambahan lagi mengenai potensi lokal yang dimiliki oleh Desa Pujonkidul.

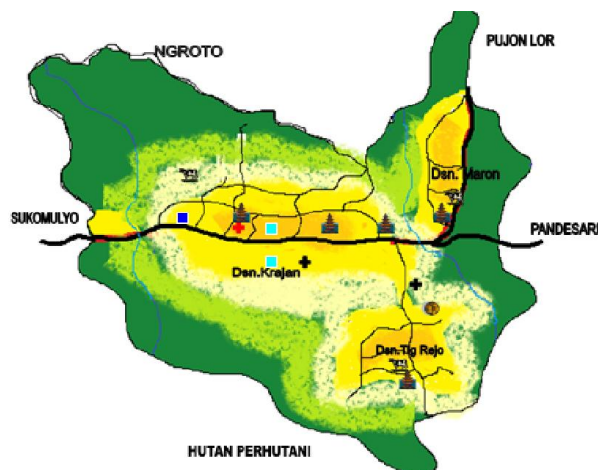
#### 4.1. Kondisi Geografis

Secara geografi Desa Pujonkidul terletak pada posisi  $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}10'-111^{\circ}40'$  Bujur Timur. Secara topografi Desa Pujonkidul ialah berupa perbukitan/ pegunungan yaitu sekitar 1200 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data yang diperoleh penulis selama tahun 2016 curah hujan di Desa Pujonkidul rata-rata mencapai 2.000 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember dimana hingga mencapai 1200 mm yang menjadikannya sebagai curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2013-2016. Menurut administratif, Desa Pujonkidul terletak di wilayah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan dibatasi oleh beberapa desa di sekelilingnya. Berikut ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Desa Pujonkidul, antara lain :

- a. Sebelah utara : Desa Pujon Lor
- b. Sebelah barat : Desa Sukomulyo

- c. Sebelah selatan : Hutan Perhutani
- d. Sebelah timur : Desa Pujon Lor

**Gambar 4.1.**  
**Peta Desa Pujonkidul**



*Sumber : Profil Desa Pujonkidul, 2018*

Jarak tempuh Desa Pujonkidul ke Kecamatan adalah 3,5 km yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh dari Desa Pujonkidul ke Ibukota Kabupaten adalah 37 km yang dapat ditempuh selama kurang lebih 1 ½ jam. Desa Pujonkidul memiliki luas wilayah 330 Ha, dengan luas lahan yang ada terbagi kedalam beberapa fungsi diantaranya dapat dikelompokkan untuk fasilitas umum, pemukiman warga, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi, dan lain sebagainya. Luas lahan yang diperuntukkan sebagai pemukiman warga seluas 24,9 Ha. Sedangkan luas lahan yang difungsikan untuk pertanian adalah 87 Ha, untuk ladang tegalan dan perkebunan seluas 240 Ha. Luas lahan untuk Hutan Produksi adalah 578 Ha. Kemudian luas lahan yang digunakan untuk fasilitas umum meliputi, sekolah 0,4 Ha, olahraga 0,5 Ha, dan tempat pemakaman umum 0,5 Ha.

Secara umum wilayah Desa Pujonkidul memiliki ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Menurut sumber data yang penulis dapatkan disebutkan bahwa secara prosentase kesuburan tanah Desa Pujonkidul dapat dipetakan sebagai berikut :

**Tabel 4.1.**  
**Luas Lahan Berdasarkan Persentase Kesuburan Tanah Desa Pujonkidul**

No	Wilayah	Luas Lahan
1	Sangat subur	56 Ha
2	Subur	140 Ha
3	Sedang	1.109 Ha
4	Tidak subur/ kritis	233 Ha

*Sumber : data diolah penulis, 2018*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar lahan di Desa Pujonkidul tergolong kedalam kelompok tanah dengan kesuburan yang sedang. Sedangkan untuk tanah yang tergolong dalam kelompok sangat subur seluas 56 Ha. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesuburan tanah di Desa Pujonkidul sebagian besar masih tergolong sedang. Dengan kondisi seperti itu memungkinkan bagi tanaman padi untuk dapat panen dengan hasil 8,5 ton/ Ha. Selain itu, tanaman lain seperti palawija juga cocok untuk ditanam di wilayah Desa Pujonkidul. Berdasarkan data yang penulis peroleh beberapa jenis tanaman palawija yang dapat ditanam ialah jagung. Sedangkan untuk tanaman jenis buah yang dapat ditanam ialah apel, tomat, dan wortel. Salah satu yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi penduduk Desa Pujonkidul ialah dengan bekerja di sektor pertanian atau perkebunan.



#### 4.2. Kondisi Demografi/ Kependudukan Desa Pujonkidul

Berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa pada tahun 2017, jumlah penduduk Desa Pujonkidul ialah 4.470 jiwa dengan rincian 2.289 laki-laki dan 2.181 perempuan. Dengan jumlah penduduk tersebut kemudian tergabung dalam 1.347 Kepala Keluarga. Berikut ini merupakan tabel jumlah penduduk Desa Pujonkidul berdasarkan Dusun :

**Tabel 4.2.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun Tahun 2017**

No	Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Krajan	3.164	951
2	Maron	955	289
3	Tulungrejo	351	115

*Sumber : data diolah penulis, 2018*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Dusun Krajan memiliki jumlah penduduk yang paling banyak dibandingkan dengan dua dusun lainnya yakni Maron dan Tulungrejo. Jumlah penduduk di Dusun Krajan sebesar 3.164 jiwa, sedangkan di Dusun Maron dan Tulungrejo masing-masing Dusun memiliki jumlah penduduk hanya 955 jiwa dan 351 jiwa. Berikut ini merupakan jumlah penduduk Desa Pujonkidul berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel 4.3.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2017**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2289 jiwa
2	Perempuan	2181 jiwa

*Sumber : data diolah penulis, 2018*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dengan total 2.289 jiwa, sedangkan penduduk yang berjenis

kelamin perempuan memiliki jumlah 2.181 jiwa. Sehingga total keseluruhan penduduk Desa Pujonkidul ialah 4.470 jiwa yang tersebar dalam tiga dusun.

#### 4.3. Pendidikan Masyarakat Desa

Presensi tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung masyarakat desa dapat dikatakan sejahtera. Dengan adanya tingkat pendidikan yang tinggi maka dapat memacu tingkat keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Manfaat yang dapat diambil dari tingkat pendidikan yang tinggi adalah semakin tajamnya *mindset*/ pola pikir individu, dapat menerima dengan mudah segala informasi yang ada kemudian mengerti akan kemajuan teknologi. Berikut ini merupakan daftar tingkat pendidikan penduduk Desa Pujonkidul yang telah diolah oleh penulis.

**Tabel 4.4.**  
**Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pujonkidul tahun 2017**

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Tidak/Belum Sekolah	563	12,83%
2	Belum Tamat SD/Sederajat	475	10,82%
3	Tamat SD/Sederajat	2.496	56,88%
4	Tamat SMP/Sederajat	577	13,15%
5	Tamat SMA/Sederajat	232	5,29%
6	Diploma I/II	7	0,16%
7	Akademi/Diploma III/Sarjana	7	0,16%
8	Diploma IV/Strata I	29	0,66%
9	Strata II	2	0,05%
10	Strata III	0	0,00%

*Sumber : data diolah oleh penulis, 2018*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Pujonkidul merupakan tamatan Sekolah Dasar/ Sederajat dengan jumlah

2.496 jiwa. Tingkat pendidikan terakhir yang memiliki jumlah banyak kedua adalah tamatan SMP/ Sederajat dengan jumlah 577 jiwa. Kemudian untuk tingkat pendidikan terakhir Diploma I/II memiliki jumlah yang sama dengan Akademi/ Diploma III/ Sarjana yakni masing-masing 7 jiwa. Penduduk Desa Pujonkidul yang memiliki riwayat pendidikan terakhir Diploma IV/ Strata-1 sebanyak 29 jiwa. Berikut ini wawancara penulis dengan Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujonkidul menyatakan bahwa :

*“Gini faktor pendidikan dulu itu di Pujonkidul menjadi hal yang tidak penting, seusia saya waktu itu tahun ’89 yang meneruskan ke SMP itu cuma saya satu Krajan itu satu dusun yang lainnya gak ada yang sekolah....”<sup>1</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di katakan salah satu faktor yang menjadikan tingkat pendidikan rendah ialah adanya *mindset* dari masyarakat bahwa pendidikan itu kurang penting. Hal tersebut di karenakan mereka lebih mementingkan pekerjaan seperti mengolah ladang maupun ternak yang mereka miliki.

#### **4.4. Mata Pencaharian Masyarakat Desa**

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Pujonkidul dapat diidentifikasi dalam beberapa kelompok diantaranya, pertanian dan peternakan, serta sektor perdagangan. Berikut ini merupakan daftar mata pencaharian masyarakat Desa Pujonkidul pada tahun 2017.

---

<sup>1</sup> Wawancara bersama Pak Udi, Kepala Desa Pujonkidul pada 16 Januari 2018/ 09:58 WIB

**Tabel 4.5.**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pujonkidul tahun 2017**

No	Macam Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	1.833 orang
2	Jasa/ Perdagangan	
	1. Jasa Pemerintahan	19 orang
	2. Jasa Perdagangan	26 orang
	3. Jasa Angkutan	16 orang
	4. Jasa Ketrampilan	8 orang
	5. Jasa lainnya	21 orang
3	Sektor Peternakan	1.714 orang
4	Sektor lain	16 orang
<b>Jumlah</b>		<b>3.653 orang</b>

*Sumber : data diolah penulis, 2018*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Pujonkidul memiliki mata pencaharian dalam sektor pertanian dengan jumlah 1.833 orang. Hal tersebut dikarenakan lahan pertanian di Desa Pujonkidul dapat dikatakan cocok untuk dijadikan ladang pertanian, mengingat terletak di daerah pegunungan yang memiliki udara sejuk. Sedangkan masyarakat yang bermatapencaharian sebagai peternak memiliki jumlah terbanyak kedua yakni sebanyak 1.714 orang. Sebagian besar masyarakat memilih untuk berternak sapi perah. Hal tersebut didukung dengan adanya sumber pakan bagi ternak yang melimpah.

#### **4.5. BUMDES Sumber Sejahtera**

##### **4.5.1. Landasan Hukum Pembentukan BUMDES**

Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disebut dengan BUMDES/BUMDESA merupakan suatu lembaga atau badan perekonomian masyarakat desa yang memiliki badan hukum dan dibentuk serta dikelola oleh

pemerintah desa bersama masyarakat setempat. Keberadaan suatu badan perekonomian masyarakat desa dirasa sangat penting untuk menciptakan desa yang mandiri. Pemerintah telah mengamanatkan pendirian dan pengelolaan BUMDES dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dalam Pasal 87 bahwa Desa dapat mendirikan BUMDES. Selain itu pendirian, pengurusan dan pembubaran BUMDES juga telah dibahas melalui regulasi Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pemerintah Kabupaten Malang juga telah mengeluarkan regulasi tentang BUMDES yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Salah satu desa di Kabupaten Malang yang telah memiliki badan perekonomian masyarakat desa ialah Pujonkidul. BUMDES yang berdiri di Desa Pujonkidul tersebut bernama BUMDES Sumber Sejahtera. Berdiri pada tahun 2015 dengan dasar hukum Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pujonkidul. Berdasarkan Peraturan Desa tersebut dijelaskan mengenai pembentukan dan pengelolaan BUMDES bahkan sampai pembubaran BUMDES juga terdapat didalamnya.

#### **4.5.2. Visi dan Misi BUMDES Sumber Sejahtera**

Dalam menjalankan suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang mengelola aset Desa, maka BUMDES Sumber Sejahtera juga memiliki Visi



dan Misi dalam kinerjanya. Berikut ini merupakan Visi dan Misi dari BUMDES Sumber Sejahtera.

1. Visi  
BUMDES Sumber Sejahtera memiliki Visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pujonkidul
2. Misi
  - a. Memudahkan perputaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat
  - b. Memberantas praktek ijon dan rentenir
  - c. Memudahkan masyarakat Desa untuk mendapatkan modal usaha dalam skala kecil dan beirmbang sesuai dengan kemampuan modal yang dikelola BUMDES.<sup>2</sup>

#### 4.5.3. Maksud dan Tujuan Pembentukan BUMDES Sumber Sejahtera

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pujonkidul Pasal 2 dijelaskan bahwa maksud dari pendirian BUMDES ialah sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa Pujonkidul dan/atau kerjasama antar Desa. Sedangkan untuk tujuan dari pendirian BUMDES Sumber Sejahtera adalah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian Desa Pujonkidul
2. Mengoptimalkan aset Desa Pujonkidul agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa Pujonkidul
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa Pujonkidul
4. Mengembangkan rencana kerja sama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan warga Desa Pujonkidul
6. Membuka lapangan pekerjaan
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Pujonkidul
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Pujonkidul dan Pendapatan Asli Desa Pujonkidul.<sup>3</sup>

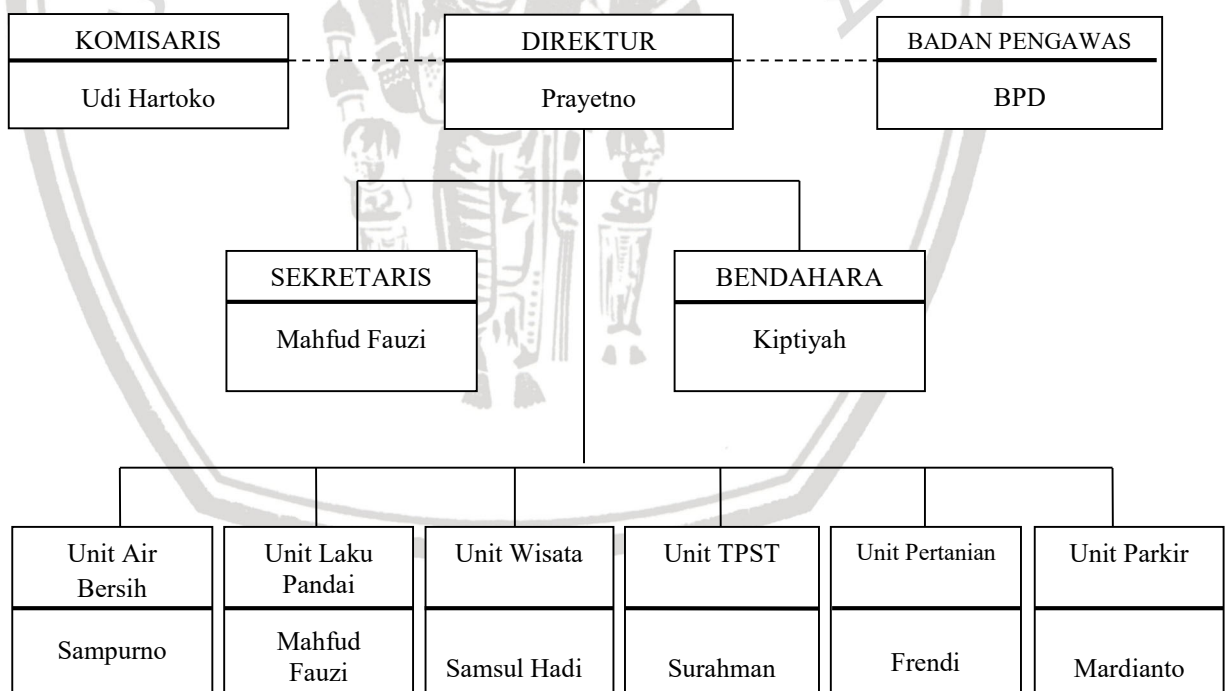
<sup>2</sup> Anggaran Dasar BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul, Pasal 2

<sup>3</sup> Peratur...ran Desa Pujonkidul Nomor 6 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pujonkidul

#### 4.5.4. Keanggotaan Pengelola BUMDES Sumber Sejahtera

Pengelola dalam BUMDES terdiri atas, penasihat, pengawas, dan pelaksana operasional. Kepala Desa menjabat selaku penasihat dalam pengelolaan BUMDES, kemudian untuk pengawas diangkat dari tokoh masyarakat oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD. Masa kerja yang berlaku bagi pengurus BUMDES Sumber Sejahtera berdasarkan peraturan desa yang ada ialah selama lima tahun sejak ditetapkan dan dipilih kembali. Berikut ini merupakan struktur organisasi dalam pengelola BUMDES Sumber Sejahtera.

**Bagan 4.1.**  
**Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera**



*Sumber : data diolah penulis, 2018*

Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui bahwa untuk masing-masing unit usaha yang ada di BUMDES Sumber Sejahtera memiliki penanggung jawab tersendiri. Hal tersebut ditujukan agar dapat mempermudah dalam memberikan laporan akhir bagi masing-masing unit usaha sehingga tidak campur dengan unit lainnya. Dalam mengelola suatu usaha dibutuhkan adanya pegawai atau karyawan yang dapat membantu dalam menjalankan usaha tersebut, tidak terkecuali bagi BUMDES Sumber Sejahtera.

#### **4.5.5. Unit Usaha BUMDES Sumber Sejahtera**

Unit usaha yang dikelola oleh BUMDES Sumber Sejahtera berjumlah enam jenis usaha. Unit yang dijalankan tersebut antara lain ialah, unit air bersih, unit laku pandai, unit wisata, unit tempat pembuangan sampah terpadu, unit pertanian, dan unit parkir. Berikut ini merupakan penjelasan secara singkat dari masing-masing unit yang ada di BUMDES Sumber Sejahtera.

##### **1. Unit Air Bersih**

Unit usaha air minum merupakan unit usaha pertama yang didirikan oleh pengelola BUMDES Sumber Sejahtera. Pendirian unit usaha tersebut berawal dari adanya pemetaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pujonkidul mengenai permasalahan apa saja yang muncul di dalam masyarakat, salah satunya adalah permasalahan mengenai air bersih. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Sekretaris Desa Pujonkidul, mengatakan bahwa :

*“...Pada tahun 2014-2015, 2014 akhir pemetaan/ mapping itu pokok masalah yang ada di desa ini. Jadi mapping itu turun ke RT-RT mbak....Terus kalau musim kemarau kemungkinan kan kalau*

*sumbernya ya besar tapi pokok permasalahannya adalah air. Karena air belum tertata, meterisasi akhirnya isinya ribut gedegedean (besar-besaran) untuk di paralon itu akhirnya terbentuklah untuk di meterisasi. Desa membentuk tindakan untuk di meterisasi ke warga akhirnya masuk ke BUMDES itu tadi.”<sup>4</sup>*

Bagi warga Desa Pujonkidul yang ingin menggunakan jasa unit air minum tersebut dikenakan biaya Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk setiap satu meter kubiknya. Berikut ini merupakan gambar tandon air bersih milik BUMDES Sumber Sejahtera yang terletak di Dusun Krajan.

**Gambar 4.2.**  
**Tandon Air BUMDES Sumber Sejahtera**



*Sumber : dokumentasi penulis, 2018*

## 2. Unit Laku Pandai

Unit usaha laku pandai merupakan unit usaha yang memiliki kerjasama atau hubungan mitra antara BUMDES Sumber Sejahtera dengan salah satu lembaga keuangan bank milik negara, yakni Bank Negara Indonesia (BNI). Jasa layanan yang diberikan dalam pengelolaan unit usaha laku pandai ialah meliputi kegiatan perbankan seperti buka tabungan, setor tunai, dan tarik tunai. Selain itu melalui unit usaha ini masyarakat juga dapat melakukan pembayaran tagihan seperti BPJS, leasing, listrik dan pulsa. Kemudahan dalam mengakses perbankan untuk

<sup>4</sup> Wawancara bersama Pak Sudirman, Sekretaris Desa Pujonkidul pada 2 Februari 2018/ 10:39 WIB

masyarakat Desa Pujonkidul semakin nyata dengan adanya layanan gerak BNI yang dapat menjangkau masyarakat yang jauh dari kantor cabang. Tanpa harus pergi ke bank di kecamatan maupun kota, masyarakat Desa Pujonkidul dapat mengakses perbankan melalui unit laku pandai BUMDES Sumber Sejahtera. Petugas dari BUMDES Sumber Sejahtera yang akan melayani nasabah ialah Direktur, Sekretaris dan Bendahara yang memiliki kode khusus untuk dapat mengakses Agen46.

### 3. Unit Wisata

Unit wisata BUMDES Sumber Sejahtera merupakan salah satu unit yang telah menyumbang banyak terhadap Pendapatan Asli Desa. Dalam unit usaha tersebut terbagi menjadi dua sub diantaranya Kafe Sawah dan *Live In*. Berdasarkan APBDes tahun 2017 Kafe Sawah menyumbang pendapatan desa sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Gambar dibawah ini merupakan wujud dari unit wisata Kafe Sawah yang ada di Desa Pujonkidul.

**Gambar 4.3.**  
**Unit Usaha Wisata Kafe Sawah Desa Pujonkidul**



*Sumber : dokumentasi penulis, 2018*



#### 4. Unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)

Berdasarkan *mapping* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2014 menunjukkan bahwa selain air bersih yang menjadi permasalahan dalam masyarakat terdapat permasalahan lain yang ada yakni tentang sampah. Berikut adalah wawancara bersama Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujonkidul yang mengatakan bahwa :

*“....Jadi sampah menjadi persoalan akhirnya hampir di semua RT di dusun ini juga terjadi konflik karena masalah sampah. Mereka membuang sampah di sembarang tempat terutama di selokan-selokan akhirnya menimbulkan tersumbatnya saluran air ketika musim hujan menyebabkan banjir.”<sup>5</sup>*

TPST merupakan unit usaha kedua yang didirikan oleh pemerintah desa dalam BUMDES Sumber Sejahtera. Sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan dapat mempengaruhi kehidupan yang lainnya seperti tersumbatnya saluran irigasi sawah milik masyarakat dan menyebabkan banjir.

#### 5. Unit Pertanian

Merupakan salah satu unit usaha BUMDES yang baru didirikan. Pembentukan unit pertanian di latarbelakangi karena potensi sumber daya alam yang terdapat di Desa Pujonkidul sebagian besar adalah lahan pertanian. Sehingga BUMDES juga memberikan wadah bagi para petani di Desa Pujonkidul melalui unit tersebut. Berikut ini merupakan hasil

---

<sup>5</sup> Wawancara bersama Pak Udi, Kepala Desa Pujonkidul pada 16 Januari 2018/ 09:58 WIB

wawancara bersama Prayetno selaku Direktur BUMDES Sumber Sejahtera yang mengatakan bahwa :

*“...Latar belakangnya untuk pertanian karena memang masalah profilnya, warganya disini kan 90% petani. Jadi BUMDES harus ikut juga disana, ikut apa ambil bagian kalau nanti bisa jalan nanti petani juga yang akan diuntungkan.”<sup>6</sup>*

Keberadaan dari unit pertanian ini sangat cocok sebagai unit usaha BUMDES Sumber Sejahtera karena potensi yang dimiliki oleh Desa Pujonkidul dapat dimanfaatkan dengan baik. Pengurus dalam unit pertanian juga merupakan warga Desa Pujonkidul yang sehari-hari bekerja di pertanian. Menurut penjelasan Direktur BUMDES Sumber Sejahtera, unit usaha pertanian ini dijalankan dengan cara menyewa lahan masyarakat untuk selanjutnya dikelola dengan ditanami berbagai jenis tanaman untuk selanjutnya hasil panennya tersebut dapat dimasukkan kedalam pendapatan BUMDES.

#### 6. Unit Parkir

Lahan yang disediakan untuk unit parkir ini letaknya dekat dengan unit wisata Kafe Sawah. Bagi pengunjung unit wisata yang membawa kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat dapat diparkirkan di tempat yang telah di sediakan oleh pengelola unit parkir. Pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari parkir tersebut dipisahkan sendiri dengan unit wisata, meskipun keduanya memiliki keterkaitan. Hal tersebut dikarenakan agar lebih mudah untuk mengelola keuangan dari masing-

---

<sup>6</sup>Wawancara bersama Pak Prayetno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018/11:58 WIB

masing unit. Gambar dibawah ini merupakan tempat parkir yang disediakan bagi pengunjung Kafe Sawah yang membawa roda dua.

**Gambar 4.4.**  
**Unit Usaha Parkir BUMDES Sumber Sejahtera**



*Sumber : Dokumentasi peneliti, 2018*

#### **4.5.6. Sarana BUMDES Sumber Sejahtera**

Sarana merupakan salah satu aspek pendukung dalam menjalankan suatu program atau kegiatan. Ketersediaan sarana yang memadai dalam suatu kegiatan dapat memberikan kemudahan bagi pelaksana atau pengelola suatu kegiatan. Dalam mengelola suatu usaha milik pemerintah desa yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesejahteraan masyarakat, maka sarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam BUMDES. Berikut merupakan daftar sarana yang dimiliki oleh BUMDES Sumber Sejahtera untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan.

**Tabel 4.6.**  
**Daftar Sarana BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul**

No.	Sarana	Jumlah
1	Komputer	2 unit
2	Printer	1 unit
3	Tandon air	1 unit
4	Meteran air	400 unit
5	Pipa air	4 km
6	Tempat penampungan sampah	1 unit
7	Alat transportasi	1 unit
8	Loket masuk unit wisata	1 unit
9	Musholla/ tempat ibadah lainnya	1 unit
10	Toilet	8 unit
11	Kafe/warung	3 unit
12	Lahan parkir	2000 m <sup>2</sup>

*Sumber : data olahan penulis, 2018*

Setidaknya terdapat 12 jenis sarana yang dimiliki oleh BUMDES Sumber Sejahtera dalam mengelola unit usaha yang ada. Misalnya seperti tandon, meteran, dan pipa air yang merupakan sarana dalam menjalankan usaha air bersih. Sementara ini tandon yang digunakan untuk menyediakan air bersih bagi warga Desa Pujonkidul masih berjumlah 1 unit yang terletak di Dusun Krajan. Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan pemetaan yang dilakukan diawal pembentukan BUMDES, Dusun Krajan merupakan wilayah yang bermasalah dalam penyediaan air bersih. Kemudian, meteran air yang berjumlah 400 unit tersebut tersebar ke rumah-rumah warga yang menjadi konsumen air bersih. Selain itu, untuk sarana yang ada pada unit wisata antara lain loket masuk, Musholla, toilet, dan kafe. Pengunjung unit wisata dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pelaksana unit

wisata. Beberapa toilet dan bangunan utama yang terdapat di Kafe Sawah merupakan bantuan dari BNI untuk Desa Pujonkidul. Dengan tersedianya jumlah sarana yang memadai dan layak untuk dipakai maka diharapkan dalam pemberian pelayanan juga akan lebih maksimal.





## BAB V

### ANALISIS POLA KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER SEJAHTERA

Pada bab ini peneliti akan menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan pada bab pertama, yaitu terkait dengan kemitraan yang dijalin dalam melakukan pengelolaan BUMDES bersama dengan lembaga keuangan bank, dalam hal ini bank yang dimaksud adalah BNI. Kemitraan tersebut dianalisis penulis dengan menggunakan konsep kemitraan menurut Farazmand, dimana terdapat beberapa model kemitraan yang dijalin untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menganalisis dengan hasil yang diperoleh selama di lapangan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Kemudian juga dipaparkan faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pengelolaan BUMDES di Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

#### **5.1 Pola Kemitraan dalam Pengelolaan BUMDES Sumber Sejahtera dengan BNI**

##### **5.1.1. Inisiasi Kemitraan BUMDES Sumber Sejahtera dengan BNI**

Sebagai bagian dari pemerintahan, desa memiliki wewenang untuk dapat mendirikan lembaga ekonomi berbasis masyarakat desa. Salah satunya dengan cara mengelola aset yang dimiliki oleh desa dalam suatu bentuk badan usaha milik desa yang memiliki badan hukum atau biasa disebut dengan BUMDES. Desa Pujonkidul yang terletak di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang merupakan salah satu dari 375 desa yang memiliki BUMDES di wilayah Kabupaten Malang.

BUMDES Sumber Sejahtera yang ada sejak tahun 2015 tersebut telah mampu membantu meningkatkan pendapatan asli desa. Salah satu unit yang menyumbang besar dalam peningkatan PADes adalah unit wisata.

Sebagai wilayah pemerintahan yang struktural, Desa Pujonkidul dapat melakukan berbagai kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa. Kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh Desa Pujonkidul ialah dengan melakukan kemitraan dalam pengelolaan BUMDES Sumber Sejahtera bersama lembaga keuangan bank yakni Bank Negara Indonesia (BNI). Unit usaha yang menjadi mitra dalam pengelolaan BUMDES dengan lembaga keuangan bank ialah unit laku pandai.

Sebagai lembaga keuangan bank yang berstatus milik pemerintah atau yang tergabung dalam BUMN, maka BNI secara tidak langsung juga memiliki peran dalam mendorong jalannya pemerintahan yang baik terutama dalam hal perbankan. Salah satu cara yang dilakukan oleh BNI dalam membantu pemerintahan ialah melalui peningkatan inklusi dan literasi keuangan bagi masyarakat desa. Maksud dari inklusi dan literasi keuangan ialah adanya kemudahan bagi masyarakat di desa untuk dapat mengakses perbankan serta meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perbankan. Sehingga, BNI hadir untuk masyarakat desa yang jauh dari jangkauan untuk memberikan bantuan-bantuan yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat.

Terciptanya suatu kemitraan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau kelompok dalam mencapai tujuan yang sama diperlukan adanya inisiasi terlebih dahulu dari pihak yang akan terlibat di dalamnya. Menurut Farazmand,

dalam membentuk kemitraan terdapat beberapa model, salah satunya adalah model otonom. Berdasarkan model otonom tersebut, disebutkan bagaimana strategi dalam membentuk kemitraan itu dapat tercipta dengan adanya inisiasi baik itu dari pemerintah, masyarakat sipil, maupun swasta. Menurut Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2015, BUMDES Sumber Sejahtera dapat melakukan jalin kerjasama atau kemitraan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 37, sebagai berikut :

1. BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul dapat melakukan kerjasama usaha dengan 1 pihak atau lebih BUMDES lain dan/atau dengan pihak ketiga
2. Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD;
  - c. Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD;
  - d. Kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan saling menguntungkan.<sup>1</sup>

Dengan adanya Peraturan Desa Pujonkidul yang telah memuat tentang diperbolehkannya BUMDES melakukan jalin mitra dapat menjadi salah satu landasan dalam menginisiasi pembentukan kemitraan bersama dengan pihak ketiga lainnya. Inisiasi dalam membentuk kemitraan yang dilakukan BUMDES Sumber Sejahtera dengan BNI, diungkapkan oleh Prayetno, selaku Direktur BUMDES Sumber Sejahtera kepada penulis sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Peraturan Desa Pujonkidul Nomor 6 tahun 2015 Pasal 37

*“Ee kalau awalnya kan untuk di wisata kan sudah ada, di wisata itu ada CSR dari BNI, otomatis kan sudah kenal, ya mungkin untuk di BUMDES sendiri kenapa kita tidak membuat unit laku pandai itu. Akhirnya dalam menyikapi pengetahuan masyarakat tentang perbankan itu kan masih kurang, masih lemah, sementara banyak..apa ya.. banyak program-program pemerintah yang harus mengambil perbankan. Seperti PKH itu kan gesek, kartu tani itu juga gesek, terus astra ngambilnya juga di bank, yang era-nya Pak Jokowi ini kan gesek-gesek semua. Jadi BUMDES untuk ekstrasi di masyarakat ini perlu kita ambil,”<sup>2</sup>*

Hal senada juga disampaikan oleh Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujonkidul dan Komisaris BUMDES Sumber Sejahtera. Beliau member pernyataan sebagai berikut :

*“Iya..karena CSR nya datang ke desa jadinya kan kita terus berkembang seiring berjalannya waktu. Memang regulasi terus e menganjurkan mengintruksikan agar BNI, BUMN terutama bank itu dapat mendampingi BUMDES, ya seperti itu. Jadi awalnya CSR BNI itu awalnya tidak mendampingi BUMDES tapi ketika sudah tahun 2016 itu sudah mulai dampingi kita karena memang kan regulasinya mulai dari pusat sampai ke desa kan nyambung ini ya... jadi kita harus jadi agen 46 itu tadi. Kemudian kerjasama itu berlanjut karena gaungnya BUMDES itu kan luar biasa, nah itulah yang akhirnya mendorong BNI dan diresmikan dari BUMN, Kementerian Desa, bank-bank yang nasional itu harus mendampingi BUMDES untuk percepatan pembentukan BUMDES dan pembangunan BUMDES. Ada tiga bank, BRI, Mandiri, sama BNI.”<sup>3</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa dalam membentuk hubungan mitra antara BUMDES Sumber Sejahtera dengan BNI dibutuhkan adanya inisiasi dari pemerintah Desa Pujonkidul. Dengan adanya inisiasi kemitraan tersebut maka BUMDES Sumber Sejahtera dan BNI terhitung melakukan hubungan kerjasama pada tahun 2016. Berikut merupakan kutipan wawancara peneliti bersama Jefri selaku petugas ABB BNI Kantor

<sup>2</sup> Wawancara bersama Pak Prayetno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018/11:58 WIB

<sup>3</sup> Wawancara bersama Pak Udi, Kepala Desa Pujonkidul pada 16 Januari 2018/ 09:58 WIB



Cabang Pembantu Unit Universitas Brawijaya atau bisa juga disebut sebagai pendamping lapangan Agen46 BUMDES Sumber Sejahtera terkait awal mula terjalinnya kemitraan

*“Oo iya ee asal mulanya di Pujonkidul itu sebelumnya CSR...CSR nya BNI. Kemudian disana dari Kepala Desa ada inisiatif untuk mendirikan wisata yaitu Kafe Sawah, jadi memang kita banyak bekerjasama dengan BUMDES-BUMDES di Kabupaten Malang ini diwajibkan dari PMD..Pemerintahan....Desa..”<sup>4</sup>*

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan BNI dalam mengelola BUMDES diawali dengan pengajuan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menjadi Agen46 BNI. Agen46 BNI merupakan mitra BNI baik itu perorangan atau yang telah berbentuk badan hukum yang menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat. Agen46 merupakan salah satu wujud pelaksanaan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau disingkat dengan laku pandai. Keberadaan laku pandai berupa Agen46 bertujuan untuk menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan saat ini.<sup>5</sup> Produk layanan yang disediakan dalam Laku Pandai terdiri dari :

1. Tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA)
2. Kredit/pembiayaan kepada Nasabah Mikro
3. Produk keuangan lainnya seperti asuransi mikro<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Wawancara bersama Pak Jefri. Petugas ABB BNI (Pendamping lapangan unit laku pandai BUMDES Sumber Sejahtera). Pada 8 November 2018 pukul 08.00 WIB

<sup>5</sup> Seputar Informasi Mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI) Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2015. Hlm. 1. Diakses melalui <https://www.ojk.go.id>

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm 2



Kelebihan dari melakukan transaksi menabung melalui Agen46 dengan karakteristik BSA adalah tidak adanya batas minimum baik saldo maupun transaksi saat melakukan setoran tunai. Selain itu, tidak adanya biaya administrasi bulanan yang ditanggung oleh nasabah dan tidak dikenakan biaya untuk pembukaan dan penutupan rekening. Dengan demikian, kemitraan BNI dengan BUMDES menjadi salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan inklusi dan literasi pada masyarakat desa yang memiliki akses terbatas kepada lembaga keuangan.

#### **5.1.2. Hubungan Saling Ketergantungan**

Membangun suatu kemitraan yang melibatkan lebih dari satu pihak untuk mencapai tujuan tertentu penting untuk dilihat adanya hubungan saling ketergantungan yang terjadi didalamnya. Hal tersebut dilandaskan karena semua makhluk hidup saling memiliki ketergantungan dimana tidak ada satupun dapat hidup sendirian meskipun memiliki kemampuan serta sumberdaya yang cukup dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sehingga, tidak heran apabila dalam membentuk kemitraan juga dapat menciptakan hubungan saling ketergantungan yang terjadi diantara orang maupun kelompok yang terlibat. Hubungan saling ketergantungan dapat dikatakan seperti sebuah simbiosis kehidupan dimana dari ketergantungan tersebut terdapat salah satu pihak saja yang merasa diuntungkan sedangkan yang lain merasa dirugikan. Namun, ada juga dari semua pihak yang terlibat tersebut saling diuntungkan dengan adanya kemitraan.

Sebagai mitra dalam mengelola unit laku pandai BUMDES Sumber Sejahtera, BNI berupaya untuk memberikan pelayanan dalam mengakses perbankan yang mudah dijangkau bagi masyarakat Desa Pujonkidul. Selain itu, dengan adanya kemitraan yang dijalin bersama dengan BUMDES, maka dapat dijadikan sebagai jaringan BNI untuk penyaluran program pemerintah salah satunya seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat desa Pujonkidul yang memperoleh bantuan PKH tersebut dapat dicairkan melalui Agen46 BNI yang bekerjasama dengan BUMDES Sumber Sejahtera. Keuntungan yang dapat dirasakan oleh pengelola BUMDES terkait dengan kemitraan bersama BNI berdasarkan pernyataan Direktur BUMDES Sumber Sejahtera ialah sebagai berikut :

*“....Kalau BUMDES-nya keuntungannya ya masalah transfer ilmu lah ya kan? Kalau di Tanya segala macam...tapi BNI-nya sendiri kenapa kok dari sekian BUMDES ee sekian desa kok cuma disini? Ya kan? Berarti kan nganu ada keterkaitannya juga, kenapa kok di desa lain itu gak jalan ya? Jadi kalau setahu saya BNI ini juga ada ee semacam program pemerintah juga untuk membantu BUMDES, mensupport BUMDES itu ada programnya juga”<sup>7</sup>*

*“Ya seperti itu.. kenyataannya kok seperti itu disini jalan. Aslinya kedua memang bisa jalan keduanya ini memang ada keterkaitan itu. Jadi memang sudah ada keterkaitan kok bisa jalan, saling menguntungkan ya..”<sup>8</sup>*

---

<sup>7</sup> Wawancara bersama Pak Prayetno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018/11:58 WIB

<sup>8</sup> Wawancara bersama Pak Prayetno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018/11:58 WIB

Keuntungan yang dirasakan selain mendapatkan ilmu ialah kemudahan dalam mengakses perbankan. Kemudahan dalam mengakses perbankan dapat diartikan melalui dekatnya jarak tempuh bagi masyarakat desa untuk mengakses bank tanpa harus pergi jauh ke kota maupun kecamatan baik itu untuk melakukan pembukaan rekening, transfer, simpan dan pinjam. Mengenai hubungan saling ketergantungan yang terjadi antara BUMDES dengan BNI, berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Direktur BUMDES Sumber Sejahtera :

*“....Laku pandai adalah wujud perwakilan perbankan yang ada di desa kan seperti itu, ngambil PKH itu bantuan tunai itu biasanya di kecamatan, di kantor pos. semenjak ada laku pandai disini warga kita wis sepuh-sepuh (sudah tua-tua) kan ya kasihan . dalam artian secara keuntungan langsung.... Akhir e kita jalan dulu dan orientasinya, profitnya sebenarnya gak banyak itu, kan kalau di BUMDES sebenarnya untuk orientasinya itu kan ada profit oriented ada, ada yang benefit bagi masyarakat juga ada sosial..”<sup>9</sup>*

Keberadaan BUMDES Sumber Sejahtera sebagai Agen46 BNI juga disambut antusias oleh masyarakat desa Pujonkidul. Keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya Agen46 BNI di Desa Pujonkidul adalah kemudahan dalam mengakses perbankan, dimana salah satunya adalah adanya kredit usaha rakyat yang ditawarkan bagi masyarakat desa setempat. Selain itu, keuntungan yang dirasakan menurut Ertifah selaku masyarakat Desa Pujonkidul dengan adanya kemitraan dengan BNI berdasarkan wawancara dengan peneliti adalah sebagai berikut, *”Tapi sebenarnya ya senang ada itu mbak..ya kan kalau ada rezeki kan bisa nabung ya gak mesti kan ya mbak..”<sup>10</sup>*

---

<sup>9</sup> Wawancara bersama Pak Prayetno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018/11:58 WIB

<sup>10</sup> Wawancara bersama Ibu Ertifah, masyarakat desa Pujonkidul pada 15 Februari 2018 pukul 11:13 WIB

Sebagai lembaga keuangan bank yang dapat memberikan bantuan berupa pinjaman permodalan untuk usaha, maka masyarakat Desa Pujonkidul memanfaatkan kemitraan yang dijalin antara BUMDES Sumber Sejahtera dengan BNI tersebut. Menurut wawancara peneliti dengan Direktur BUMDES, Prayetno mengatakan bahwa :

*“.....Seperti kredit mikro gitu kan otomatis dengan BNI.. ee yang sudah jalan itu kredit homestay itu ada, kita fasilitasi saja. Jadi orang buat homestay, katakanlah homestay gak ada kamar mandinya gak ada sebagainya kemudian dibangun sehingga dibuka fasilitas peminjaman kredit itu. Artinya untuk itu memang khusus ee untuk dengan BNI mungkin lebih mudah. Tapi saya gak nganu saya...saya cuma penghubung saja saya. Kalau nanti dibelakang-belakang ada apa-apa kan langsung ke perbankannya saja, untuk BUMDES-nya nanti berat itu”<sup>11</sup>*

Selain berfokus kepada unit laku pandai pada BUMDES Sumber Sejahtera, BNI juga memberikan kemudahan bagi unit-unit lainnya yang membutuhkan bantuan. Sebagai Agen46 BNI, BUMDES Sumber Sejahtera dapat memberikan pelayanan berupa pembukaan rekening tabungan, setor tunai, tarik tunai, pembayaran BPJS, pembayaran leasing, pembayaran listrik dan pulsa melalui laku pandai sehingga masyarakat tanpa harus berangkat ke bank dapat melakukan kegiatan perbankan di wilayahnya. Petugas dari BUMDES akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin melakukan berbagai transaksi dengan menemui salah satu dari Direktur, Sekretaris, maupun Bendahara BUMDES. Hal tersebut dikarenakan hanya tiga pengurus BUMDES yang memiliki wewenang untuk mengakses Agen46 tersebut. Berikut merupakan sebagian daftar nama nasabah dari Desa Pujonkidul yang melakukan transaksi pembukaan rekening dan

---

<sup>11</sup> Wawancara bersama Pak Prayetno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018/11:58 WIB

lain sebagainya melalui unit laku pandai BUMDES Sumber Sejahtera, untuk daftar nama selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel 5.1.**  
**Daftar Nasabah BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul**

No	Nama	RT	RW	Desa/Dusun
1	Mahfud Fauzi	04	02	Krajan
2	Srimulyana			Pujonlor
3	Martono	10	05	Krajan
4	Trisia Widiastuti	16	08	Maron
5	Udi Hartoko	04	02	Krajan
6	Kiptiyah	10	05	Krajan
7	Fatakul Alim	10	05	Krajan
8	Farida Yusida	10	05	Krajan
9	Nina Hasanah	10	05	Krajan
10	Riana	10	05	Krajan
11	Nur Rahmad	01	01	Pujonkidul
12	Prayitno	16	08	Maron
13	Sumarmi	14	08	Maron
14	Musofa	12	07	Maron
15	Yani	12	07	Maron
16	Sumariati	13	07	Maron
17	Wiryono	13	07	Maron
18	Sripami	13	07	Maron
19	Sirfiana H.	13	07	Maron
20	Nurul Suyliyah	13	07	Maron
21	Nur Wathin	13	07	Maron
22	Lilis Inarahayu	10	05	Krajan
23	Riati	10	05	Krajan
24	Sajuni	16	08	Maron
25	Sumaiyah	04	02	Krajan
26	Suyono Hidayat	08	04	Krajan
27	Samporno	04	02	Krajan
28	Dwi Kristanto	05	03	Krajan
29	Widarto	05	03	Krajan
30	Riyati	10	05	Krajan
31	Tatok Hariyanto	10	05	Krajan
32	Ngatemin	04	02	Krajan
33	Uswatu Khasanah	13	07	Maron
34	Jamaludin	04	02	Krajan
35	Ririn Hayati N.	04	02	Krajan
36	Diana Rosyidah	16	08	Maron
37	Novatul K.	16	08	Maron

*Sumber : data diolah penulis, 2018*



Apabila masyarakat ingin melakukan transaksi dalam nominal jumlah yang cukup besar maka dapat memanfaatkan layanan gerak yang akan mendatangi Desa Pujonkidul setiap hari Rabu. Layanan gerak BNI tersebut berupa armada mobil berfungsi untuk memberikan pelayanan dimana dapat menjangkau masyarakat yang jauh dari kantor cabang agar lebih mudah dalam mengakses perbankan. Pelayanan yang di berikan dalam layanan gerak BNI tersebut antara lain transaksi pembayaran, simpan dan pinjam, tarik tunai, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan perbankan. Lokasi yang dipilih untuk memberikan pelayanan tersebut juga cukup strategis yakni terletak di area parkir Kafe Sawah sehingga mudah bagi masyarakat desa untuk menjangkaunya.

Benefit yang dapat dirasakan oleh pihak BNI dari adanya kemitraan yang dijalin dengan pihak lainnya ialah mendapatkan nasabah yang loyal.<sup>12</sup> Sebagai lembaga keuangan bank sudah menjadi rahasia umum apabila dimana ada upaya untuk menjalin mitra maka terdapat tujuan lain untuk pihak bank itu sendiri yakni salah satunya dapat menambah jumlah nasabah melalui kemitraan tersebut. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Prayetno selaku direktur BUMDES menyebutkan bahwa jumlah nasabah BNI yang terdaftar di BUMDES sudah mencapai 400 orang. Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan Prayetno:

*“Kalau sudah kita koneksikan dengan bank.. safety-nya ya kan gitu..kita belajar disitu silahkan menabung, ngambilnya monggo (silahkan) anda mau ngambil di ATM mana saja gak harus BUMDES dibawa lari nanti. Jadi nasabahnya sudah... 400 mungkin sudah ada”<sup>13</sup>*

<sup>12</sup> Laporan Tahunan 2016 PT BNI, Tbk. Hlm. 651. Diakses melalui [www.bni.co.id](http://www.bni.co.id) pada 2 Januari 2018 pada 12:19 WIB

<sup>13</sup> Wawancara bersama Pak Prayetno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018/11:58 WIB

Selain semakin bertambahnya jumlah nasabah, melalui program kegiatan tersebut BNI dapat menerapkan program laku pandai yang didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menjadikannya Agen46.<sup>14</sup> BUMDES dapat dijadikan sebagai jaringan BNI dalam penyaluran berbagai program pemerintah, seperti bantuan sosial, kredit usaha rakyat. Sehingga kemitraan yang dijalin BNI dengan BUMDES menjadi salah satu metode untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah yang memiliki akses terbatas terhadap lembaga keuangan. Adanya kemitraan dengan BNI, maka BUMDES Sumber Sejahtera dapat menjadi fasilitator bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman dengan nominal di atas Rp. 20.000.000,00. Ketika peneliti bertanya kepada Prayetno terkait adakah masyarakat Desa Pujonkidul yang mengajukan pinjaman modal lebih dari Rp. 20.000.000,00 ? beliau menjawab pernah ada, bahkan beliau pernah menjadi perantara dalam melakukan pinjaman lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berikut pernyataan Jefri selaku pendamping lapangan Agen46 BUMDES Sumber Sejahtera terkait adanya peminjaman modal yang dilakukan oleh masyarakat desa Pujonkidul.

*“Yang jelas ada mbak..ada, jadi kita kredit KUR itu ee ini memang subsidi dari pemerintah, bunganya kan memang rendah, jadi ketika masuk disana kan memang minat masyarakat disana banyak, seperti disana kan rata-rata peternak sapi ya..sapi, sayur, itu banyak yang membutuhkan”<sup>15</sup>*

<sup>14</sup> Laporan Tahunan 2016 PT BNI, Tbk. Hlm. 658. Diakses melalui [www.bni.co.id](http://www.bni.co.id) pada 2 Januari 2018 pada 12:19 WIB

<sup>15</sup> Wawancara bersama Pak Jefri. Petugas ABB BNI (Pendamping lapangan unit laku pandai BUMDES Sumber Sejahtera). Pada 8 November 2018 pukul 08.00 WIB

Mayoritas masyarakat desa Pujonkdiul yang melakukan pinjaman sebesar itu adalah mereka yang sudah memiliki usaha dapat dikatakan besar seperti pertanian dan peternakan. Selain itu, dengan masuknya BNI ke desa-desa melalui agen<sup>46</sup> yang menjadi bagian dari BUMDES maka BNI dapat dengan mudah untuk melaksanakan literasi keuangan kepada masyarakat desa yang selama ini jauh dari jangkauan dan susahny akses perbankan.

Selain keuntungan secara materi berupa uang yang masuk ke pendapatan, dengan jalin kemitraan tersebut Pemerintah Desa Pujonkidul juga mendapat bantuan sarana dalam pengelolaan BUMDES. Nominal pendapatan yang telah diperoleh unit usaha laku pandai berdasarkan keterangan Direktur BUMDES kepada peneliti belum dimasukkan kedalam sistem informasi desa Pujonkidul yang dapat diakses melalui [www.sie.pujonkidul.desa.id](http://www.sie.pujonkidul.desa.id). Hal tersebut dikarenakan selama ini pendapatan yang masuk masih tergolong sedikit, sehingga rekap nominal pendapatan unit laku pandai saat ini masih berupa dalam pembukuan yang belum diolah secara *digital*.

Berikut merupakan rincian keuntungan dari masing-masing transaksi nasabah melalui BUMDES yang telah peneliti olah menjadi tabel dibawah ini, untuk mengetahui data yang sebelum diolah dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel 5.2.**  
**Skema Fee Layanan Agen46 BNI**

No	Jenis Transaksi	Biaya Transaksi Nasabah (Rp)	Badan Hukum (Yang Mengelola Loker)	
			Fee Mitra	Fee Agen
<b>A</b>	<b>Laku Pandai</b>			
1	Pembukaan rekening	-	200	5.000
2	Setor tunai :			
	< Rp. 999	-	-	-
	Rp. 1.000 s/d Rp. 24.999	-	-	100
	Rp. 25.000 s/d Rp. 49.999	-	-	200
	Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000	-	200	500
	> Rp. 100.000	-	200	1.000
3	Tarik tunai :			
	Rp. 1 s/d Rp. 200.000	3.000	200	2.500
	>Rp. 200.000	4.000	200	3.000
<b>B</b>	<b>e-Payment</b>			
1	Transfer ke rekening BNI	1.000	-	1.000
2	Transfer antar bank	6.500	450	2.250
3	Top up pulsa :			
	Telkomsel			
	5 – 10 ribu	1.500	50	250
	25 – 50 ribu	1.500	300	750
	100 – 1 juta	1.500	1.000	2.500
	Indosat			
	5- 10 ribu	1.000	50	150
	25 ribu	-	150	375
	50 ribu	-	250	625
	100 – 1 juta	-	800	2.000
	Dll..			
4	Top up pulsa paket data :			
	25 – 50 ribu	1.500	300	750
	100 – 300 ribu	1.500	1.000	2.500
5	Pembayaran Telkom	2.500	500	1.250
6	Kartu kredit BNI	-	-	-
7	PLN	3.000	250	1.750
8	Reservasi tiket penerbangan	-	1.000	10.000

*Sumber : data diolah penulis, 2018*

Keuntungan lain yang dapat dirasakan oleh BNI sebagai mitra dalam pengelolaan BUMDES Sumber Sejahtera selain dari segi pendapatan *fee* dari setiap transaksi nasabah ialah dapat memperluas jaringan melalui agen-agen yang berada di daerah dan desa. Berikut merupakan kutipan wawancara yang

disampaikan oleh Jefri selaku pendamping lapangan Agen46 BUMDES Sumber Sejahtera kepada peneliti terkait keuntungan lain yang didapat dengan bermitra.

*“Ee dari BNI ya.. kalau dari kita sih mungkin kita bisa memperluas jaringan sih mbak yang pertama itu karena mungkin kedepannya kan BNI ini geraknya melalui agen-agen. Jadi agen-agen ini yang kita besarkan, agen-agen ini istilahnya bank mininya kita. Jadi semua kegiatan yang tidak bisa dilayani di kantor ee cabang atau kantor outlet terdekat itu bisa lewat agen”<sup>16</sup>*

Sehingga dapat disimpulkan bawah kemitraan tersebut dapat terjalin karena adanya sifat saling membutuhkan atau ketergantungan. Hal tersebut dapat dilihat dari pihak BNI yang dapat menambah jumlah nasabah sekaligus dapat mengimplementasikan program pemerintah melalui literasi keuangan yang dikemas dalam laku pandai dapat menyasar langsung kepada masyarakat desa. sedangkan dari pihak BUMDES Sumber Sejahtera dapat memperoleh keuntungan dari setiap nasabah yang melakukan transaksi melalui Agen46 BNI mulai dari Rp. 100,00 – Rp. 10.000,00. Keuntungan itu nantinya yang akan masuk kedalam pendapatan unit laku pandai BUMDES Sumber Sejahtera.

### 5.1.3. Pengaruh Konvergensi Global

Membangun kemitraan dengan menggunakan kekuatan global merupakan salah satu dari beberapa strategi yang dapat dilakukan. Kekuatan global yang termasuk didalamnya dapat meliputi keuangan, pemasaran, produksi, ekonomi, hdan kebijakan. Berikut merupakan analisa yang dapat peneliti lakukan berdasarkan hasil yang ada di lapangan.

---

<sup>16</sup> Wawancara bersama Pak Jefri. Petugas ABB BNI (Pendamping lapangan unit laku pandai BUMDES Sumber Sejahtera). Pada 8 November 2018 pukul 08.00 WIB



#### 5.1.3.1. Keuangan (Permodalan)

Keuangan merupakan salah satu kekuatan yang dapat digunakan untuk membangun kemitraan baik itu yang terjadi antara pemerintah dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan masyarakat sipil atau sektor swasta. Dalam menjalankan pemerintahan baik dalam skala kecil seperti desa, keuangan merupakan faktor pendukung dalam berkembangnya perekonomian desa yang sedang dijalankan. Sebagai lembaga ekonomi masyarakat desa, BUMDES memiliki peran dalam upaya menampung seluruh kegiatan dalam bidang ekonomi yang dikelola oleh desa. Salah satu tujuan dari pendirian BUMDES di Desa Pujonkidul adalah untuk meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam mendirikan suatu usaha ekonomi, tidak terkecuali bagi pendirian BUMDES maka di butuhkan adanya keuangan dalam hal ini yang dimaksud adalah permodalan atau pendanaan yang dapat di gunakan untuk memulai usaha tersebut.

BUMDES merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah desa dan disahkan oleh Kepala Desa melalui Peraturan Desa yang berlaku. Sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki oleh desa maka berdasarkan Anggaran Dasar BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul, modal yang digunakan untuk pendirian sebagian besar berasal dari kekayaan desa yang di pisahkan. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti bersama Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujonkidul terkait dengan permodalan awal dalam pendirian BUMDES Sumber Sejahtera, “.....Jadi BUMDES kita itu kita bentuk

dan dirikan tahun 2015. Pada tahun 2015 itu terbentuk kemudian ya langsung kita anggarkan untuk ini sumbernya dari DD (dana desa)...”.<sup>17</sup> Pemanfaatan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membiayai pembangunan desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa yang berasal dari APBN tersebut ditransfer oleh pemerintah melalui APBD untuk kemudian disalurkan ke masing-masing desa yang terdapat di wilayahnya.

Sesuai dengan regulasi pemerintah di atasnya, dana desa yang dibagikan ke setiap desa memiliki prioritas dalam pemanfaatannya untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas dalam penggunaan dana desa tersebut diutamakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat lintas bidang. Prioritas penggunaan dana desa dalam tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017. Terdapat empat kegiatan bersifat lintas bidang yang menjadi prioritas utama penggunaan dana desa. Empat prioritas tersebut antara lain, kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUMDES atau BUMDES bersama, embung dan sarana olahraga. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat di lihat bahwa sebagai badan usaha milik pemerintah desa sudah sewajarnya apabila modal dalam pembentukan dan mengelola BUMDES berasal dari dana desa. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Sudirman selaku Sekretaris Desa Pujonkidul yang mengatakan bahwa modal pertama dalam pembentukan BUMDES yang berasal

---

<sup>17</sup> Wawancara bersama Pak Udi, Kepala Desa Pujonkidul pada 16 Januari 2018/ 09:58 WIB

dari dana desa berupa tandon untuk unit usaha air bersih untuk selanjutnya di bagikan ke warga Desa Pujonkidul. *“Permodalan awal itu... pembuatan jedingan itu tandonan air itu nilainya sebesar 125”*.<sup>18</sup>

BNI selaku mitra tidak memberikan bantuan permodalan dalam bentuk uang kepada BUMDES, melainkan bantuan berupa bangunan fisik yang dapat digunakan sebagai sarana BUMDES. Menurut Udi Hartoko Kepala Desa Pujonkidul, BNI memberikan bantuan berupa bangunan fisik sebagai sarana dalam menjalankan BUMDES. *“....di..wisata itu kan kita diberi bantuan pembangunan gapura, apa itu penangkal petir, ada bangunan gedung itu, toilet, semua disumbang BNI.”*<sup>19</sup> Bangunan fisik berupa pendopo yang merupakan bantuan dari CSR BNI tersebut terletak di unit wisata sebagai gedung utama, gambar pendopo dapat dilihat pada lampiran penelitian ini. Kemudian, untuk bangunan gapura yang juga bantuan dari BNI tersebut tersebar ke dalam tiga titik yakni di Desa Krajan, Desa Maron, dan Desa Tulungrejo.

#### 5.1.3.2. Produksi

Salah satu aspek yang dapat membantu dalam pembentukan kemitraan ialah adanya sesuatu yang di produksi. Produksi merupakan suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh penyedia kemudian untuk disalurkan kepada konsumen yang membutuhkan. Sebagai badan usaha maka sudah tidak heran apabila BUMDES berusaha semaksimal mungkin dalam menyediakan barang atau jasa untuk selanjutnya dapat di manfaatkan oleh masyarakat desa. Hal tersebut dapat di jumpai pada BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul.

---

<sup>18</sup> Wawancara bersama Pak Sudirman, Sekretaris Desa Pujonkidul pada 2 Februari 2018/ 10:39 WIB

<sup>19</sup> Wawancara bersama Pak Udi, Kepala Desa Pujonkidul pada 16 Januari 2018/ 09:58 WIB

Sebagai salah satu desa yang terletak di daerah pegunungan yang memiliki wilayah asri maka tidak heran apabila masih dapat di jumpai sumber daya alam yang melimpah di dalamnya. Sebagian besar penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak dapat di jumpai di Desa Pujonkidul. Keberadaan BUMDES Sumber Sejahtera dapat dirasakan oleh sebagian penduduk desa dalam membantu perekonomiannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BUMDES untuk menyediakan produk jasa kepada masyarakatnya ialah melalui perbankan, baik itu melakukan pinjaman modal ataupun kegiatan lainnya. Dalam mewujudkan produk jasa tersebut maka pemerintah desa memilih untuk melakukan mitra bersama BNI dengan cara menjadi Agen<sup>46</sup> BNI.

Sebagai mitra dalam menjalankan BUMDES, BNI menyediakan pelayanan berupa jasa dalam perbankan. BNI berupaya untuk menjangkau masyarakat desa dengan menggandeng BUMDES dalam menciptakan inklusi dan literasi keuangan bagi masyarakat desa. Wujud dari kerjasama antara BNI dengan BUMDES tersebut dapat dilihat dengan adanya unit usaha laku pandai yang menangani perihal urusan keuangan atau perbankan. Produk layanan berupa perbankan dengan jangkauan yang dekat dirasa dibutuhkan oleh masyarakat Desa Pujonkidul yang terletak di wilayah cukup jauh dari pusat perkotaan. Berikut adalah pernyataan Direktur BUMDES kepada peneliti terkait pentingnya perbankan masuk ke dalam salah satu unit BUMDES.

*“....dalam menyikapi pengetahuan masyarakat tentang perbankan itu kan masih kurang, masih lemah, sementara banyak..apa ya.. banyak program-program pemerintah yang harus mengambil perbankan. Seperti PKH itu kan gesek, kartu tani itu juga gesek, terus astra ngambilnya juga*

*di bank, yang era-nya Pak Jokowi ini kan gesek-gesek semua. Jadi BUMDES untuk ekstrasi di masyarakat ini perlu kita ambil, dalam rangka membantu pengertian masyarakat tentang fungsi perbankan itu. Laku pandai adalah wujud perwakilan perbankan yang ada di desa kan seperti itu, ngambil PKH itu bantuan tunai itu biasanya di kecamatan, di kantor pos. semenjak ada laku pandai disini warga kita wis sepuh-sepuh (sudah tua-tua) kan ya kasihan... ”<sup>20</sup>*

Mengingat perlunya perbankan untuk masuk ke desa, maka pemerintah desa memilih untuk melakukan mitra kerja dengan BNI selaku penyedia layanan jasa keuangan perbankan. Produk dari usaha jasa berupa perbankan akhir-akhir ini merupakan kebutuhan bagi masyarakat yang perlu untuk di penuhi. Kelebihan yang di peroleh ketika bermitra dengan perbankan ialah adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses produk jasa perbankan tersebut dengan mudah. Selain itu, dengan bermitra dengan perbankan maka pengetahuan masyarakat terkait bank juga akan bertambah. Peminjaman modal usaha yang ditawarkan oleh BNI juga dapat membantu masyarakat untuk menjalankan usahanya yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani dan peternak.

#### **5.1.3.3. Pemasaran**

Kemitraan yang dijalin antara BUMDES Sumber Sejahtera dengan BNI melalui Agen<sup>46</sup> merupakan salah satu terobosan yang dilakukan untuk memberikan kemudahan mengakses dan memperkenalkan perbankan kepada masyarakat desa. Membentuk suatu kemitraan yang melibatkan beberapa pihak dalam mencapai tujuan tertentu dapat terwujud dari adanya kekuatan untuk melakukan pemasaran. Hal tersebut dikarenakan dalam menjalin suatu mitra

---

<sup>20</sup> Wawancara bersama Pak Prayetno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018/11:58 WIB



sedikit atau banyak akan ditemukan adanya upaya dalam memberikan pemasaran atau promosi yang dilakukan oleh pihak yang terlibat. Begitu juga dengan yang terjadi dalam kemitraan antara BUMDES Sumber Sejahtera dengan BNI. Masuknya BNI ke desa melalui BUMDES yang menjadi Agen46 secara tidak langsung dapat memberikan keuntungan dalam hal pemasaran baik itu bagi BUMDES Sumber Sejahtera maupun pihak BNI.

Dengan terjalinnya kemitraan tersebut BNI yang bertindak selaku BUMN milik pemerintah dapat membantu mempromosikan Desa Pujonkidul ke dunia luar yang masih belum diketahui banyak orang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Prayetno selaku Direktur BUMDES Sumber Sejahtera kepada peneliti sebagai berikut :

*“...secara tidak langsung dari segi promosi memang ee ada peran dari BNI yang membantu, kan kegiatan BNI kalau disitu di-upload segala macam itu kan banyak orang kesini juga mungkin bisa mempengaruhi kan? Kayak BNI pusat, itu kan otomatis..loh kok ada orang penting kesana? Kan..oo ya saya tak kesana. Secara tidak langsung begitu..”<sup>21</sup>*

Sebagai *partner* atau mitra dalam menjalankan suatu usaha, secara tidak langsung BNI memberikan bantuan kepada pemerintah desa Pujonkidul dalam hal pemasaran. Salah satu bentuk dari pemasaran yang dilakukan oleh BNI untuk memperkenalkan Desa Pujonkidul ialah melalui media sosial. Melalui media sosial tersebut BNI berupaya mempromosikan dengan menggunggah beberapa foto agenda kegiatan yang dilakukan dimana bertempat di Desa Pujonkidul. Selain itu, bantuan yang diberikan oleh BNI kepada Desa

---

<sup>21</sup> WaBwancara bersama Pak Prayetno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018/11:58 WIB

Pujonkidul melalui jalin mitra tersebut ialah adanya inisiatif dari BNI untuk membuatkan *tap cash* dengan gambar Kafe Sawah sebagai latarnya.

*Tap cash* merupakan uang elektronik pengganti uang tunai yang dapat di isi ulang, serta dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pada tempat-tempat yang bekerjasama dengan BNI. Keberadaan *tap cash* dari BNI yang memiliki gambar latar wisata Desa Pujonkidul juga dinilai sebagai salah satu wadah untuk mempromosikan Desa Pujonkidul kepada dunia luar. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Udi Hartoko, Kepala Desa Pujonkidul kepada peneliti berikut ini :

*“Kita di bikinkan ada ini ee tap cash ini, kita dibikinkan sudah jadi untuk pembayaran tap cash.....Untuk pembayaran ee..kayak brizi itu loh untuk tol untuk semuanya, tapi anunya itu kafe sawah. Logonya juga kafe sawah, itu yang cetak itu BNI untuk promo kita....”*<sup>22</sup>

Selama peneliti berada di lapangan, keberadaan *tap cash* tersebut masih dalam tahap disosialisasikan ke warga sehingga belum diresmikan. Sebagai mitra, BUMDES Sumber Sejahtera juga sedikit banyak memberikan bantuan dalam hal pemasaran terkait adanya kegiatan yang dijalin dengan BNI. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur BUMDES Sumber Sejahtera kepada peneliti sebagai berikut, “....yang cocok itu biasanya ibu-ibu. Makanya saya petakan di ibu-ibu untuk awal saya masuk di tahlil, itu setiap Senin Jumat itu ada tim sosialisasi, tahun.. dua tahun yang lalu mungkin”<sup>23</sup>. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu langkah dalam mempromosikan adanya unit laku pandai yang bekerjasama dengan BNI ialah melalui acara

<sup>22</sup> Wawancara bersama Pak Udi, Kepala Desa Pujonkidul pada 16 Januari 2018/ 09:58 WIB

<sup>23</sup> Wawancara bersama Pak Prayetno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018/11:58 WIB

pengajian yang dihadiri oleh ibu-ibu warga Desa Pujonkidul. Dengan adanya sosialisasi kepada warga tersebut secara tidak langsung BUMDES juga telah menjalankan perannya sebagai mitra dalam melakukan pemasaran terkait layanan yang diberikan oleh mitranya.

#### 5.1.3.4. Perekonomian

Sebelum berdirinya BUMDES Sumber Sejahtera, kondisi perekonomian masyarakat Desa Pujonkidul masih dapat dikatakan kurang apabila dibandingkan dengan yang terjadi saat ini. Setelah didirikannya BUMDES lambat laun keuangan dan perekonomian Desa Pujonkidul berangsur membaik. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur BUMDES Sumber Sejahtera kepada peneliti sebagai berikut :

*“.....sampean bayangkan kalau Sabtu Minggu ada rombongan kesini itu kan sampek antri-antri itu kan ya..bawa uang itu mbak..kemana larinya uang itu? Itu kan uangnya turunnya disini, kalau orang jualan rokok aja biasanya kulakan'e loro iso dadi limo (belanja dua bisa jadi lima), kan logikanya seperti itu..terus arek enom-enom iki mau (anak muda-muda ini tadi) yang biasanya gak ada kegiatan, kemudian adanya tamu seperti tadi, dia biasanya bangun siang jadi bangun pagi menyambut tamu, ya adalah bagiannya untuk mereka sedikit-sedikit, dan itu dibawah BUMDES, saya sendiri yang memprakarsai itu untuk menjaring anak-anak muda itu...”<sup>24</sup>*

Menurut Prayetno selaku Direktur BUMDES Sumber Sejahtera mengatakan bahwa jika dibandingkan perekonomian desa dan masyarakat sebelum dan setelah adanya BUMDES tentu memiliki perbandingan. Perbandingan tersebut menunjukkan ke arah yang positif, dimana perekonomian desa dan masyarakat bertambah. Mengenai perekonomian masyarakat desa

---

<sup>24</sup> Wawancara bersama Pak Prayetno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018/11:58 WIB

Pujonkidul yang menunjukkan arah lebih baik juga diungkapkan oleh Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujonkidul kepada peneliti sebagai berikut :

*“Kalau ditanya terkait ekonomi masyarakatnya yaa menurut saya sudah sedikit membantu lah mbak. Ini bayangkan saja sudah berapa pemuda desa yang bekerja di unit wisata itu, setidaknya bisa mengurangi jumlah pengangguran. Kemudian ini... ee tapi..jangan sampai kita melahirkan keluarga yang tidak mampu lagi. Jadi ini ya misalnya ada keluarga yang tidak mampu punya anak dua, orangtuanya gak mampu, ketika sudah menikah akan melahirkan keluarga yang tidak mampu lagi. Nah ini harus kita potong, kita potongnya di anaknya. Gaji mereka minimal Rp. 1.000.000 itu minim wes. Rp.1.000.000 itu minim, makan disitu wes....”<sup>25</sup>*

Keberadaan BUMDES Sumber Sejahtera dimana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dapat diwujudkan melalui terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang masih menganggur. Pemerintah desa dan BUMDES selaku pelaksana lebih mengutamakan pemuda-pemudi yang berasal dari Desa Pujonkidul sebagai tenaga kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama masyarakat Desa Pujonkidul juga menyatakan hal sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Udi terkait keberadaan BUMDES yang membantu dalam perekonomian masyarakat. Berikut merupakan beberapa perbandingan yang dapat penulis jabarkan terkait kondisi sebelum dan sesudah berdirinya BUMDES di Desa Pujonkidul.

---

<sup>25</sup> Wawancara bersama Pak Udi, Kepala Desa Pujonkidul pada 16 Januari 2018/ 09:58 WIB



**Tabel 5.3.**  
**Perbandingan Sebelum dan Sesudah Berdirinya BUMDES Sumber Sejahtera**

No	Sebelum	Sesudah
1	Perekonomian masyarakat hanya bergantung kepada pertanian dan peternakan	Terbukanya lapangan pekerjaan yang lain bagi masyarakat Desa Pujonkidul. Misalnya, dapat membuka usaha dagang disekitar Kafe Sawah serta dapat memberikan pekerjaan bagi pemuda di desa setempat
2	Aset desa belum dikelola dengan baik oleh pemerintah desa dan masyarakat	Aset atau kekayaan desa yang dikelola sedemikian rupa dapat memberikan pendapat kepada desa sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki sosial ekonomi desa Pujonkidul
3	Masyarakat harus pergi ke kecamatan bahkan kota untuk dapat melakukan transaksi perbankan dan mencairkan bantuan PKH dari pemerintah	Masyarakat lebih mudah dalam mengakses perbankan dengan adanya unit laku pandai BUMDES Sejahtera. Tanpa harus menempuh jarak jauh untuk sekedar melakukan transaksi perbankan dan pencairan bantuan PKH, sehingga lebih menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat.

*Sumber : hasil analisis penulis, 2018*

Berikut merupakan sebagian daftar nama pekerja BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul berdasarkan masing-masing unit usaha, daftar nama selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel 5.4.**  
**Daftar Pekerja BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul**

No	Nama	Unit Usaha
1	Sugiarto	Air Bersih
2	Surahman	
3	Samsul Hadi	
4	Sampurno	
5	Jamaludin	
6	Warsono	
7	Baidur Rahim	
8	Abi Almaliki	
9	Surahman	
10	Sumitri	



11	Sutrisno	TPST
12	Naeb	
13	Suprpto	
14	Sugiyono	
15	Efrendi	Pertanian
16	Endri Purwanto	
17	Syaiful Anwar	
18	Mustagfirli Asror	Wisata ( <i>live in</i> )
19	Ilham Husen	
20	Vidyan Alamsyah	
21	Yogi Hermawan	
22	Ilham Dwi Prasetyo	
23	Hari Wibowo	
24	Asiatul Yulian Devi	
25	Efrendi	
26	Prayitno	Laku pandai
27	Kiptiyah	
28	Mahfud Fauzi	

*Sumber : data diolah penulis, 2018*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa unit usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja ialah unit usaha wisata yang didalamnya terdapat Kafe Sawah dan *Live in*. Sebagian besar tenaga kerja pada unit usaha tersebut ialah masih tergolong dalam usia muda. Keberadaan unit usaha tersebut khususnya BUMDES Sumber Sejahtera tidak dapat dipungkiri bahwa dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Sebagian tenaga kerja yang ada berasal dari warga setempat yang belum memiliki pekerjaan bahkan ada tenaga kerja yang sebelumnya telah memiliki pekerjaan namun memilih untuk berubah pekerjaannya dengan bergabung ke lapangan pekerjaan yang dibuka oleh BUMDES.

Selain membantu dalam ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, adanya BUMDES yang bermitra dengan BNI dapat memberikan manfaat lain bagi masyarakat Desa Pujonkidul. Berikut adalah pernyataan yang

diberikan oleh Ertifah salah satu masyarakat Desa Pujonkidul kepada peneliti terkait dampak yang dirasakan setelah adanya kemitraan yang di jalin oleh BUMDES dengan BNI, *“Ya banyak membantu..mbak kalau itu memang membantu mbak...”*<sup>26</sup>. Hal senada juga disampaikan oleh Lilik yang juga merupakan masyarakat Desa Pujonkidul sebagai berikut *“Kan bisa ke masyarakat kecil, sebagai masyarakat kecil bisa kerja lagi gitu loh mbak...seumpama yang di kafe saja sudah kelihatan anak muda-mudanya..”*<sup>27</sup>. Pengelolaan BUMDES yang juga melibatkan pihak lain yakni BNI juga dirasakan penduduk dapat membantu keberlangsungan ekonominya. Misalnya saja dalam hal pinjaman permodalan untuk menjalankan usaha, masyarakat Desa Pujonkidul dapat melakukan pinjaman dari BNI melalui BUMDES. Akan tetapi, keberadaan BUMDES Sumber Sejahtera di sini hanya sebagai perantara bagi masyarakat dengan pihak bank saja. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Prayetno terkait peran BUMDES sebagai perantara masyarakat dengan BNI untuk melakukan pinjaman modal usaha.

*“Ada kalau memang.. seperti kalau memang...seperti kredit mikro gitu kan otomatis dengan BNI.. ee yang sudah jalan itu kredit homestay itu ada, kita fasilitasi saja. Jadi orang buat homestay, katakanlah homestay gak ada kamar mandinya gak ada sebagainya kemudian dibangun sehingga dibuka fasilitas peminjaman kredit itu. Artinya untuk itu memang khusus ee untuk dengan BNI mungkin lebih mudah. Tapi saya gak nganu saya...saya cuma penghubung saja saya. Kalau nanti dibelakang-belakang ada apa-apa kan langsung ke perbankannya saja. Untuk BUMDES-nya nanti berat itu.”*<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Wawancara bersama Ibu Ertifah, masyarakat desa Pujonkidul pada 15 Februari 2018 pukul 11:13 WIB

<sup>27</sup> Wawancara bersama Ibu Lilik, masyarakat desa Pujonkidul pada 15 Februari 2018 pukul 11:13 WIB

<sup>28</sup> Wawancara bersama Pak Prayetno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018/11:58 WIB

Dengan adanya kemudahan dalam mengakses perbankan khususnya untuk pinjaman modal usaha bagi masyarakat desa yang jauh dari kota, maka secara perlahan pertumbuhan ekonomi di desa juga akan dapat dirasakan. Selain terbantu dengan adanya pinjaman modal usaha dari BNI, perekonomian masyarakat desa juga dapat diangkat melalui adanya wisata Kafe Sawah yang termasuk ke dalam salah satu unit BUMDES Sumber Sejahtera. Menurut pedagang warung di sekitar area Kafe Sawah mengatakan bahwa sedikit banyak perekonomian mereka menjadi lebih baik dengan adanya peluang usaha yang ada di desanya tersebut.

#### **5.1.3.5. Kebijakan**

Keberadaan Desa sebagai salah satu bagian dari pemerintahan semakin kuat dengan adanya regulasi dari pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam undang-undang tersebut berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, salah satunya disebutkan bahwa Desa dapat membentuk suatu badan usaha milik desa. Tujuan dalam pendirian badan usaha milik desa tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan, pemberdayaan ekonomi desa sehingga dapat memberikan pemasukan dan kenaikan perekonomian desa dan masyarakatnya. Selanjutnya dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDES tersebut lebih di perjelas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015. Pendirian BUMDES berdasarkan Peraturan Menteri tersebut dimaksudkan sebagai upaya dalam menampung

seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa.<sup>29</sup>

Kebijakan dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2015. Berdasarkan peraturan desa tersebut di katakan bahwa dalam melakukan pengelolaan BUMDES dapat dilakukan kerjasama dengan satu atau lebih BUMDES lain dan/atau pihak ketiga.<sup>30</sup> Pada pasal 37 ayat 2 (d) disebutkan bahwa dalam melakukan kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan saling menguntungkan.

Salah satu pihak yang menjadi bagian dalam pengelolaan BUMDES Sumber Sejahtera ialah BNI. Terjalannya kemitraan yang dilakukan oleh BUMDES dengan BNI terwujud dengan adanya BUMDES Sumber Sejahtera sebagai salah satu Agen<sup>46</sup> BNI yang dapat menjangkau masyarakat desa. BUMDES Sumber Sejahtera menjadi Agen<sup>46</sup> dengan nama agen BUMDES Sumber Sejahtera, dan nomor agen BNI AG58723. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan direktur BUMDES Sumber Sejahtera mengatakan bahwa dalam menjalin mitra tersebut sebelumnya tercantum dalam MOU kerjasama. Berikut penjelasan Direktur BUMDES Sumber Sejahtera kepada peneliti :

*“Ada, kalau dengan BNI itu ada MOU-nya Cuma saya sudah lama juga. Tapi dalam artian bukan masalah segi keuntungan, tapi masalah support, masalah siap membina segala macam itu ada. MOU-MOU*

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Pasal 2

<sup>30</sup> Peraturan Desa Pujonkidul Nomor 6 tahun 2015 Pasal 37

*kerjasama teknis itu kan, bukan kerjasama ekonominya, bukan keuntungan juga bukan..”<sup>31</sup>*

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti dapat mengetahui bahwa MOU tersebut berisi tentang kerjasama secara teknis yang juga meliputi dukungan apa saja yang diberikan antara pihak dari BUMDES dengan BNI. MOU tersebut bukan berisi tentang segi keuntungan yang diperoleh dari hasil kemitraan yang dijalin. MOU perjanjian kemitraan antara BUMDES Sumber Sejahtera dengan BNI ditandatangani pada tahun 2016 berdasarkan penuturan Jefri pendamping lapangan Agen46 kepada peneliti sebagai berikut, *“Kalau untuk Pujonkidul ini memang launching-nya diawal ya..pembentukannya di awal yang terbentuk pada tahun 2016. MOU nya juga tahun 2016 dengan kita memang pertama kali.”<sup>32</sup>* Sehingga dapat diketahui bahwa MOU antara BUMDES Sumber Sejahtera dan BNI ditandatangani pada tahun 2016 yang menjadi pertanda dimulainya kemitraan tersebut.

## **5.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan BUMDES Sumber Sejahtera**

Faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan suatu kegiatan atau program tertentu bukan lagi merupakan suatu hal langkah. Hal tersebut dikarenakan tidak semuanya kegiatan atau program yang di rencanakan berjalan sesuai dengan keinginan. Selama melakukan penelitian di lapangan, adanya faktor pendukung dan faktor penghambat juga peneliti temukan terkait dengan pengelolaan BUMDES yang dilakukan secara bermitra tersebut. Berikut

---

<sup>31</sup> Wawancara bersama Pak Prayetno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018/11:58 WIB

<sup>32</sup> Wawancara bersama Pak Jefri. Petugas ABB BNI (Pendamping lapangan unit laku pandai BUMDES Sumber Sejahtera). Pada 8 November 2018 pukul 08.00 WIB



merupakan faktor pendukung dan penghambat yang peneliti temukan dalam pengelolaan BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul.

### 5.2.1. Faktor Pendukung

#### a. Dukungan Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang memiliki jangkauan lebih dekat kepada masyarakat. Pemerintah desa sebagai pelaksana secara langsung memiliki andil penuh dalam jalannya pemerintahan desa yang terjadi di dalamnya. Pemerintahan Desa Pujonkidul dipimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu Bapak Udi Hartoko. Sebagai penyelenggara dalam pemerintahan desa, seorang Kepala Desa menjalankannya dengan dibantu oleh perangkat desa yang ada. BUMDES merupakan suatu badan usaha masyarakat desa yang sebagian besar modalnya berasal dari desa. BUMDES di bentuk dengan tujuan untuk memperbaiki tingkat perekonomian desa dan masyarakat yang ada di dalamnya. Pemerintah desa Pujonkidul memiliki andil dalam memelopori pembentukan BUMDES Sumber Sejahtera yang juga berfungsi dalam mengelola aset desa. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya inisiatif awal untuk melakukan *mapping* (pemetaan) terlebih dahulu kepada seluruh lapisan masyarakat desa Pujonkidul yang di lakukan oleh pemerintah desa.

Berikut merupakan pernyataan dari Bapak Prayetno selaku Direktur BUMDES Sumber Sejahtera terkait peran yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mendorong pendirian BUMDES.

*“Untuk BUMDES-nya, faktor pendukungnya itu..yang jelas yang utama adalah support dari pemerintah desa, kenapa ditempat lain.. ee*

*BUMDES itu gak jalan kan ada juga karena kurangnya support dari pemerintah desa. Karena BUMDES itu sifatnya kan bukan harus, bukan harus ada kan..bunyinya itu desa dapat membentuk, kalau desa gak membentuk BUMDES juga gak ada istilahnya melanggar hukum. Tapi kenapa kok BUMDES-nya ada? Ya berarti kalau BUMDES-nya ada, jalan..maka support-nya pemerintah desa itu ada”.<sup>33</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Direktur BUMDES Sumber Sejahtera tersebut dapat dikatakan bahwa peran dari pemerintah desa itu dianggap sangat penting dalam pengelolaan BUMDES yang ada di desanya masing-masing. Permodalan dalam mendirikan dan mengelola suatu usaha sangat di butuhkan keberadaannya. Mengingat BUMDES merupakan badan usaha milik pemerintah desa maka sebagian besar modal yang di miliki tersebut berasal dari desa. Pendanaan dalam pendirian BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul menurut pernyataan Kepala Desa Pujonkidul adalah sebagai berikut “....Jadi BUMDES kita itu kita bentuk dan dirikan tahun 2015. Pada tahun 2015 itu terbentuk kemudian ya langsung kita anggarkan untuk ini sumbernya dari DD....”.<sup>34</sup> Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut di salurkan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah untuk kemudian di bagikan ke masing-masing desa yang terdapat di wilayahnya.

Selain terkait dengan permodalan dalam pendirian, peran dari pemerintah desa dapat di lihat dari adanya inisiatif untuk melakukan kemitraan dengan pihak lainnya. Seperti yang diketahui bahwa BUMDES Sumber Sejahtera bermitra dengan BNI dalam melakukan pengelolaan pada

---

<sup>33</sup> Wawancara bersama Pak Prayetno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018/11:58 WIB

<sup>34</sup> Wawancara bersama Pak Udi, Kepala Desa Pujonkidul pada 16 Januari 2018/ 09:58 WIB

salah satu unit usaha, yakni laku pandai. Jalin kemitraan yang dilakukan oleh BUMDES Sumber Sejahtera dengan BNI dapat terlaksana ketika CSR dari bank tersebut mendatangi Desa Pujonkidul untuk memberikan bantuan-bantuan bagi unit wisata seperti adanya bangunan gedung di Kafe Sawah. Dengan masuknya CSR tersebut ke Desa Pujonkidul, maka pemerintah desa berinisiatif untuk melakukan kemitraan melalui Agen46 BNI dalam mengelola BUMDES.

b. Kebutuhan Masyarakat dalam Mengakses Perbankan

Semakin majunya zaman maka semakin maju pula teknologi yang ada, termasuk dalam hal keuangan atau perbankan dimana tidak perlu susah payah untuk menjangkaunya. Sebagai masyarakat yang tumbuh dan besar di lingkungan desa, sudah sewajarnya untuk dapat mengikuti kemajuan zaman tersebut. Kemudahan yang saat ini dapat dirasakan oleh masyarakat yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan ialah adanya penyedia layanan atau jasa dalam mengakses perbankan tanpa harus menempuh jarak jauh. Pemerintah desa selaku penyelenggara dan pelaksana dalam pemerintahan desa memiliki jangkauan lebih dekat dengan masyarakat desa di wilayahnya. Guna menyediakan fasilitas atau pelayanan kepada masyarakat desa maka pemerintah desa harus dapat lebih berinovasi dalam menjalankan tugasnya. Salah satu wujud dari pemerintah Desa Pujonkidul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya ialah melalui BUMDES Sumber Sejahtera. Beberapa layanan baik itu berupa barang atau jasa dapat di jumpai dalam

BUMDES tersebut. Salah satu pelayanan yang di tawarkan ialah adanya unit usaha laku pandai yang bermitra dengan BNI.

Dalam mewujudkan mitra tersebut, Desa Pujonkidul harus menjadi Agen<sup>46</sup> BNI terlebih dahulu yang merupakan mitra dari BNI untuk menjangkau masyarakat luas. Dengan adanya Agen<sup>46</sup> BNI dalam unit usaha laku pandai tersebut maka dapat mempermudah masyarakat desa untuk mengakses perbankan dengan jangkauan yang cukup dekat tanpa harus datang ke kota untuk sekedar menabung, mencairkan bantuan dari pemerintah, membuka rekening, transfer, bahkan melakukan pinjaman modal. Berikut merupakan penjelasan dari Pak Prayetno selaku Direktur BUMDES Sumber Sejahtera dengan adanya unit laku pandai yang bermitra dengan BNI dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses perbankan.

*“....Kebetulan laku pandai BNI juga promosi kemana saja, kalau di Kota malah di warung-warung ada e-warung segala macam. Dan di Kota gak ada kesulitan memang orang-orangnya sudah biasa, kalau disini saya titik beratnya karena itu. Banyak program-program yang harus memang melalui bank itu, dari pada warga kita... ya warga kita ke kecamatan ya, ojeknya orang tua-tua berapa? Rp. 20.000, kalau disini wes dekat gak kepanasan seperti itu. Dan juga poin yang pertama adalah menabung itu, kita galakkan juga, banyak.. kita targetnya ibu-ibu hanya sistem menabung yang sudah ada di desa itu kan dalam tanda kutip tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu tergantung yang megang. Kalau sudah kita koneksikan dengan bank.. safety-nya ya kan gitu..kita belajar disitu silahkan menabung, ngambilnya monggo (silahkan) anda mau ngambil di ATM mana saja gak harus BUMDES dibawa lari nanti. Jadi nasabahnya sudah... 400 mungkin sudah ada..”<sup>35</sup>*

Dengan adanya unit laku pandai tersebut masyarakat Desa Pujonkidul tidak lagi harus menempuh jarak yang jauh untuk dapat mengakses

<sup>35</sup> Wawancara bersama Pak Prayetno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018/11:58 WIB



perbankan. Selain kemudahan dalam pencairan PKH dengan jarak semakin dekat, kebutuhan lain dari masyarakat yang dapat di penuhi dengan adanya Agen<sup>46</sup> unit laku pandai menurut hasil wawancara peneliti adalah sebagai berikut.

*“.....dan itu kayak’e ya sudah ada manfaat’e lah kayak’e katakanlah, kan kalau disini kan banyak anak e yang mondok apa mau kirim uang kesana, anaknya dibukakan tabungan dikirim lewat BUMDES. Terus ada yang kerja di Surabaya ada yang kerja di luar negeri terus mau kirim uang bisa masuk ke tabungan disini nanti orangnya bisa ngambil di BUMDES. Itu yang kita belum bayangkan sebelumnya, dari sekian ratus orang kok”<sup>36</sup>*

Tujuan pendirian BUMDES berdasarkan Peraturan Desa Pujonkidul Nomor 6 tahun 2015 salah satunya di sebutkan bahwa untuk meningkatkan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan warga Desa Pujonkidul. Menurut Lilik sebagai masyarakat Desa Pujonkidul, keberadaan BNI di Desa Pujonkidul dapat membantu masyarakat khususnya dalam mengakses perbankan seperti hasil wawancara berikut :

*“Ya udah kelihatan mbak ada kemajuan antara... bisa membantu masyarakat yang kecil-kecil kan gitu..Ya pinjaman...ya tabungan gitu...disini pernah masuk dulu dari BNI.. kalau mau pinjam gak apa-apa...tapi kan kami gak itu..belum membutuhkan. Sewaktu-waktu kami membutuhkan kan bisa pinjam kesana mungkin ya...”<sup>37</sup>*

Sehingga, dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi pendukung dalam terjalinnya kemitraan antara BUMDES dengan BNI ialah untuk mendukung kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan tanpa harus bepergian jauh. Ketika masyarakat desa Pujonkidul di rasa perlu untuk

<sup>36</sup> Wawancara bersama Pak Prayetno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018/11:58 WIB

<sup>37</sup> Wawancara bersama Bu Lilik, maysrakat Desa Pujonkidul pada 15 Februari 2018/ 11:13 WIB



mendapat bantuan perihal akses perbankan maka pemerintah desa melalui BUMDES berinisiatif untuk melakukan mitra tersebut.

### 5.2.2. Faktor Penghambat

#### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang minim bukan lagi menjadi faktor penghambat dalam menjalankan suatu program atau kegiatan. Hal tersebut juga peneliti jumpai dalam pengelolaan BUMDES di Desa Pujonkidul. Sebagai salah satu desa yang terletak di daerah pegunungan dengan melimpahnya sumber daya alam yang ada, menjadikan sebagian masyarakat lebih memilih untuk mengurus ladang atau beternak dari pada melanjutkan sekolah. Berikut merupakan wawancara peneliti dengan Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujonkidul terkait minimnya sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDES di Desa Pujonkidul.

*“Gini faktor pendidikan dulu itu di Pujon Kidul menjadi hal yang tidak penting, seusia saya waktu itu tahun ’89 yang meneruskan ke SMP itu cuma saya satu Krajan itu satu dusun yang lainnya gak ada yang sekolah. Jadi ee pengelolaan BUMDES, kegiatan lembaga sosial itu bukan hanya membutuhkan ijazah tapi juga membutuhkan ketokohan. Syarat kepengurusan BUMDES itu harus lulus SMA, tapi cari orang seumuran di bawah saya itu susah. Dulu orang sini makmur mbak, punya sapi sama punya lahan itu sudah, kamu gak usah sekolah ngapain kamu sekolah. ....Ada juga yang tidak berpendidikan tapi EDM nya juga bagus itu ada tapi jarang sekali di jumpai disini. Sumber daya manusia yang menjadi PR bagi saya, saya inginnya lari 100 tapi yang dibelakang saya?”<sup>38</sup>*

Terkait dengan syarat kepengurusan BUMDES Sumber Sejahtera harus memiliki ijazah SLTA/ SMA disebutkan dalam Peraturan Desa Pujonkidul Nomor 6 tahun 2015 pada Pasal 23. Selain Pak Udi Hartoko yang

---

<sup>38</sup> Wawancara bersama Pak Udi, Kepala Desa Pujonkidul pada 16 Januari 2018/ 09:58 WIB

menyebutkan bahwa minimnya sumber daya manusia yang menjadi salah satu faktor penghambat, Prayetno juga menyebutkan hal yang sama kepada peneliti sebagai berikut :

*“kendala ada di sumber daya manusia, memang rata-rata begitu kan? Kalau di Malang Pujonkidul ini SDM kalau diukur dengan pendidikan terendah, termasuk saya ini saya cuma SMA, ada berapa? Lainnya yang SMP? Buta huruf itu masih ada. Memang kendala di SDM itu memang sangat ini sangat mewarnai lah dalam rangka perjalanan BUMDES ini”<sup>39</sup>*

Dengan terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan BUMDES Sumber Sejahtera, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera menyiasatinya dengan cara berikut :

*“Sekarang begini, kalau mindset saya SDM itu..oke salah satu sisi memang ee pendidikan dalam artian ijazah. Tapi kalau menurut saya SDM itu adalah keahlian bisa gak ada hubungannya dengan pendidikan menurut saya. Itu pun tercermin pada divisi-divisi itu, katakanlah divisi air minum tak cari memang orang yang sudah biasa mengelola air minum bukan dari orang yang secara pendidikan memang mengerti masalah air minum”<sup>40</sup>*

Menurut Pak Prayetno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera, pengelolaan BUMDES tidak hanya mengutamakan ijazah dalam hal ini pendidikan tetapi juga berdasarkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

#### b. Pelaksanaan pelatihan yang kurang

Salah satu langkah yang dapat di lakukan dalam menambah nilai dan kompetensi bagi sumber daya manusia adalah dengan mengadakan pelatihan.

<sup>39</sup> Wawancara bersama Pak Prayetno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018/11:58 WIB

<sup>40</sup> Wawancara bersama Pak Prayetno, Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018/11:58 WIB

Kompetensi yang dimiliki oleh SDM dapat berpengaruh kepada hasil yang akan di peroleh. Jika sebelumnya sudah disebutkan bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan BUMDES ialah SDM yang tersedia, maka kurangnya pelatihan juga dapat dijadikan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jalannya pengelolaan BUMDES di Pujonkidul. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara bersama Bapak Sudirman selaku Sekretaris Desa mengatakan bahwa pernah dilakukan pelatihan yang diberikan oleh BNI sebagai mitra dalam pengelolaan BUMDES berupa membuat batik. Berikut kutipan wawancara yang disampaikan oleh Sudirman kepada peneliti

*“Satu bulan ada pelatihan ada mbatik (membuat batik) itu pernah dilaksanakan BNI terus...Rutin dulu, terus gak anu mbak antusias masyarakatnya ini kurang mbak”<sup>41</sup>*

Salah satu yang menjadi faktor dalam kurangnya minat masyarakat terhadap pelatihan yang diberikan tersebut adalah kebanyakan dari masyarakat desa bekerja sebagai petani dan peternak. Sehingga mereka lebih mengutamakan pekerjaan mereka sehari-hari dari pada mengikuti pelatihan yang diberikan. Sebagai mitra dalam mengelola BUMDES, BNI hanya memberikan bantuan pelatihan dalam administrasi pada awal-awal menjalin kerjasama. Selain itu, pelatihan yang diberikan kepada masyarakat ialah dengan kegiatan membatik yang kemudian kurang diminati oleh masyarakat desa.

---

<sup>41</sup> Wawancara bersama Pak Sudirman, Sekretaris Desa Pujonkidul pada 2 Februari 2018/ 10:39 WIB

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang menaungi penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki andil yang besar dalam meningkatkan sumber daya manusia di desa melalui adanya kegiatan atau pelatihan yang diadakan di desa dalam wilayahnya. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara bersama Oni selaku Kepala Sie Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang, mengatakan bahwa :

*“Ya pelatihan, tahun ini kan saya melakukan 2 pelatihan, workshop.. workshop ini isinya apa? Menyatukan persepsi BUMDES-BUMDES yang telah berdiri untuk inovasi. Agar ada barter barang, kan otomatis saling membutuhkan hanya saja ini masih belum jalan. Banyak tarik ulur itu juga, workshop itu isinya seperti itu..”<sup>42</sup>*

Ketika peneliti bertanya apakah peserta dalam *workshop* yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut diikuti juga oleh desa-desa yang belum memiliki BUMDES, beliau menjawab bahwa *workshop* tersebut khusus untuk desa yang telah memiliki BUMDES. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya *workshop* yang diikuti oleh desa yang telah memiliki BUMDES, maka desa-desa tersebut dapat melakukan pengembangan usaha dengan barter bersama yang lainnya.

Akan tetapi, pada lain waktu kesempatan peneliti sempat berbicara dengan Direktur BUMDES Sumber Sejahtera dan beliau mengatakan bahwa selama proses pendirian BUMDES di Desa Pujonkidul Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang tidak mengambil peran di dalamnya.

---

<sup>42</sup> Wawancara bersama Pak Oni, Kasie Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa, DPMD, pada 19 Januari 2018/ 09:59 WIB

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang baru terjun ke lapangan pada saat BUMDES Sumber Sejahtera akan di resmikan. Berdasarkan percakapan singkat peneliti dengan Direktur BUMDES Sumber Sejahtera dapat di simpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kurang melibatkan diri dalam pendirian BUMDES di Pujonkidul tersebut.





## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan lima model kemitraan menurut Farazmand, selama peneliti melakukan penelitian di lapangan mendapatkan hasil bahwa tidak semua model dalam pembentukan kemitraan tersebut dapat di jumpai pada kemitraan BUMDES Sumber Sejahtera dengan BNI. Terdapat empat model kemitraan yang peneliti temui selama berada di lapangan. Empat model kemitraan tersebut adalah otonom, hubungan saling ketergantungan, pengaruh konvergensi global, dan elit. Model kemitraan yang peneliti temukan paling dominan dari model lainnya ialah pengaruh konvergensi-global. Berikut merupakan beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan selama berada di lapangan terkait dengan kemitraan pada BUMDES Sumber Sejahtera dengan BNI, antara lain :

1. Pemerintah desa merupakan inisiator dalam jalinnya kemitraan antara BUMDES dengan BNI. Dalam mengelola unit usaha laku pandai, pemerintah desa dan pengelola BUMDES menggandeng salah satu bank milik pemerintah yang tergabung dalam BUMN yakni Bank Negara Indonesia (BNI). Awal mula BNI masuk ke Desa Pujonkidul melalui CSR yang memberikan bantuan pada unit wisata BUMDES Sumber Sejahtera. Wujud dari kemitraan antara BUMDES dengan BNI tersebut berupa Agen46 BNI yang dapat menjangkau masyarakat yang jauh.
2. Sebagai mitra dalam melakukan usaha, BNI menyediakan layanan perbankan melalui Agen46 BNI yang dapat dikelola oleh unit laku pandai BUMDES Sumber Sejahtera. Dengan adanya Agen46 BNI di desa maka

dapat menambah jumlah nasabah BNI sekaligus sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan inklusi dan literasi keuangan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa, meskipun unit laku pandai dikelola bersama BNI hal tersebut tidak memberikan sumbangsih yang besar kepada PADesa. Justru penyumbang terbesar dalam PADes adalah unit wisata yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat Desa Pujonkidul. Sehingga, dapat dikatakan bahwa, tanpa melakukan kemitraan bersama BNI, pengelolaan BUMDES Sumber Sejahtera masih dapat berjalan.

3. Pengelolaan BUMDES Sumber Sejahtera secara langsung memiliki dampak terhadap perekonomian desa dan masyarakat Desa Pujonkidul. Adanya kemitraan yang dijalin oleh BUMDES bersama dengan BNI secara tidak langsung dapat membantu pemerintah desa untuk mempromosikan Desa Pujonkidul ke luar daerah, terlebih lagi BNI membuatkan *tap cash* yang khusus berlatar gambar wisata di Desa Pujonkidul yakni Kafe Sawah.
4. Dukungan dari pemerintah desa sangat berpengaruh dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDES. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah desa yang memiliki wewenang terhadap aset desa maka pendirian dan pengelolaan BUMDES tidak dapat tercapai dengan baik.
5. Minimnya sumber daya manusia atau *soft skill* yang dimiliki masyarakat masih menjadi penghambat dalam pengelolaan BUMDES di Desa Pujonkidul

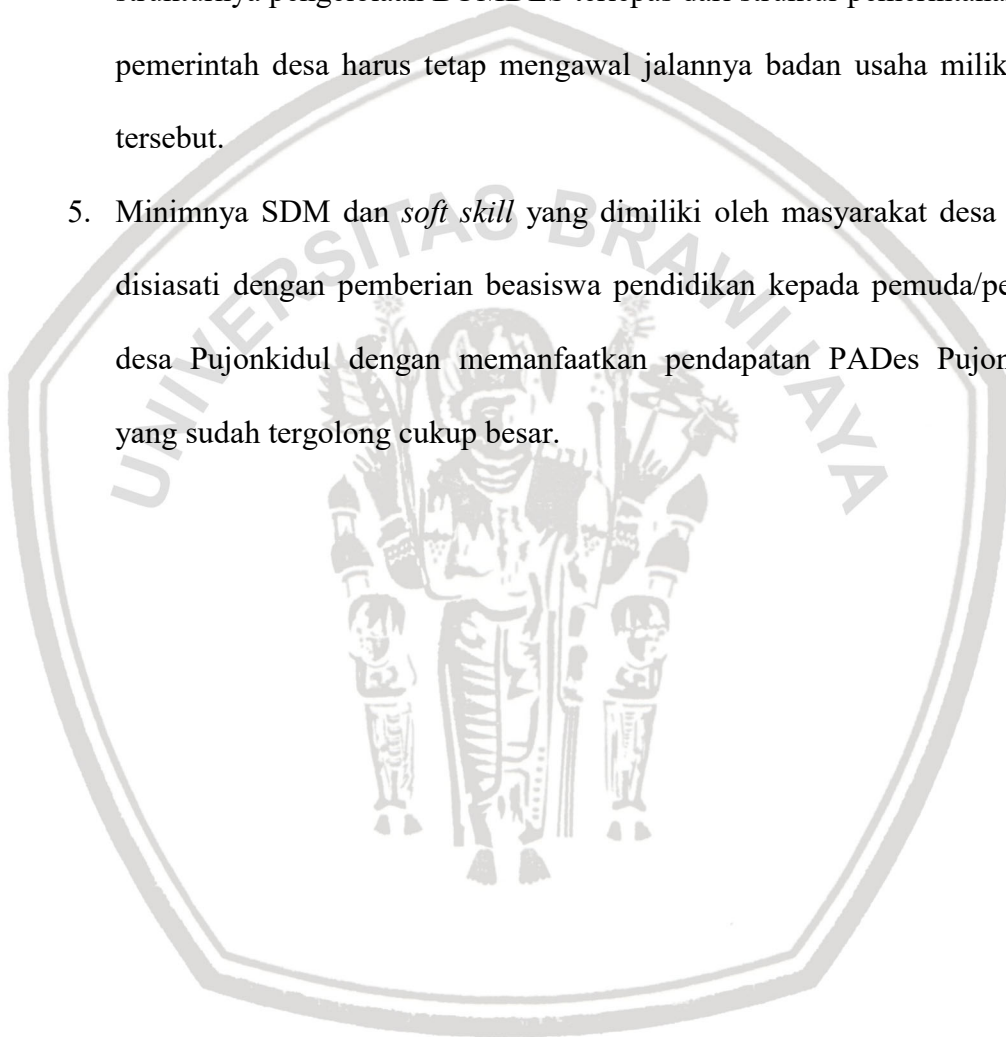
## 6.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti sebutkan pada halaman sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi terkait adanya kemitraan dalam pengelolaan BUMDES Sumber Sejahtera dengan BNI, sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa atau pengelola BUMDES Sumber Sejahtera dapat melakukan pemetaan untuk kali kedua terkait dengan permasalahan apa lagi yang masih di keluhkan oleh masyarakat desa Pujonkidul sehingga dari hasil pemetaan tersebut dapat di himpun oleh pihak yang terkait kemudian melakukan tindakan selanjutnya dalam mengatasi permasalahan tersebut.
2. Pengelola BUMDES dapat mendirikan sendiri unit usaha simpan pinjam tanpa melakukan kemitraan dengan pihak bank dengan memanfaatkan modal yang berasal dari pendapatan BUMDES, mengingat BUMDES telah memiliki omset yang cukup besar. Sehingga pendapatan yang diperoleh tersebut terus dapat berputar. Bahkan bisa juga memanfaatkan dana desa sebagai modal pendirian unit usaha simpan pinjam. Hal tersebut dikarenakan, dengan mengacu pada regulasi telah disebutkan bahwa pengelolaan BUMDES termasuk dalam salah satu prioritas dalam penggunaan dana desa.
3. Semakin banyaknya unit usaha yang dikelola maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang tidak memiliki pekerjaan

untuk bekerja di dalamnya. Sehingga baik perekonomian desa dan masyarakat akan semakin kuat.

4. Pemerintah desa Pujonkidul dan pengelola BUMDES Sumber Sejahtera harus tetap bersinergis dalam pengelolaan BUMDES. Meskipun dalam strukturnya pengelolaan BUMDES terlepas dari struktur pemerintahan tapi pemerintah desa harus tetap mengawal jalannya badan usaha milik desa tersebut.
5. Minimnya SDM dan *soft skill* yang dimiliki oleh masyarakat desa dapat disiasati dengan pemberian beasiswa pendidikan kepada pemuda/pemudi desa Pujonkidul dengan memanfaatkan pendapatan PADes Pujonkidul yang sudah tergolong cukup besar.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :

- Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA). 2007. Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Sound Governance*. Malang: UB Press
- Farazmand, Ali. 2004. *Sound Governance : Policy and Administrative Innovations*. London: Praeger Publisher.
- Hafsah, Mohammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba.
- Ibrahim, Johan. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Kasmir. 1998. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Latumaerissa, Julius R.. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Perkasa
- Mulyana, Dedy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif "Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya"*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S.. 2012. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Moh.. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta



- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance : 20 prakarsa inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suwandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suwartono. 2014. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian “Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian”*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

#### Jurnal :

- A, Afni. *Pola Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan Reklamasi Pantai di Kota Makassar*. Skripsi, Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. 2017. Diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/24458> pada 19 Maret 2018 pukul 5:40 WIB
- Agunggunanto, Edy Yusuf. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol. 13, No. 1. Universitas Diponegoro. Diakses melalui <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/395> pada 4 Oktober 2017 pukul 18:54 WIB
- Apriyani, Sri Astuti. *Strategi Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri dalam Pengelolaan Objek Wisata Umbul Ponggok di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses melalui <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/viewFile/3568/3254> pada 4 November 2017 pukul 7:11 WIB
- Kurniawan, Fandy dkk. *Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No 1, Jurusan Administrasi Publik, FIA, UB. Diakses melalui <https://adiministrasipublik.studentjournal.ub.ac.id> pada 4 November 2017 pukul 6:58 WIB
- Ramadana, Coristya Berlian, dkk. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6. Diakses melalui

<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/189> pada 4 Oktober 2017 pukul 15:41 WIB

### **Peraturan Hukum :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005

Permendesa No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Pujonkidul Nomor 6 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pujonkidul

Peraturan Desa Pujonkidul Nomor 3 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2016

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

### **Website :**

<http://pujonkidul.desa.id/2017/05/31/apbdes-2017/>

<http://www.djpk.depkeu.go.id>

<http://www.sie.pujonkidul.desa.id>

<http://www.bni.co.id>

Diakses melalui <http://www.kemendes.go.id/index.php/view/detil/2130/kepala-des-diminta-laksanakan-4-program-kemendes-pdtt-jika-ingin-dapat-tambahan-dana-desa-2018> pada 6 November 2017 pukul 6:16 WIB

Diakses melalui <https://travel.detik.com/advertorial-news-block-travel/d-3471364/jadi-des-wisata-pujon-raup-pendapatan-desa-terbesar-di-malang> pada 6 November 2017 pukul 7:41 WIB

Diakses melalui <http://bisnis.radarmalang.id/325-desa-tak-punya-bumdes/> pada 3 Oktober 2017 pukul 09:54 WIB

Diakses <http://www.malangtimes.com/baca/21060/20170917/075715/belum-genap-setahun-omzet-desa-wisata-pujon-kidul-kabupaten-malang-sudah-mencapai-rp-35-miliar/> pada 3 Oktober 2017 pukul 12.17 WIB

**Wawancara Informan :**

Wawancara dengan Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujonkidul pada 16 Januari 2018

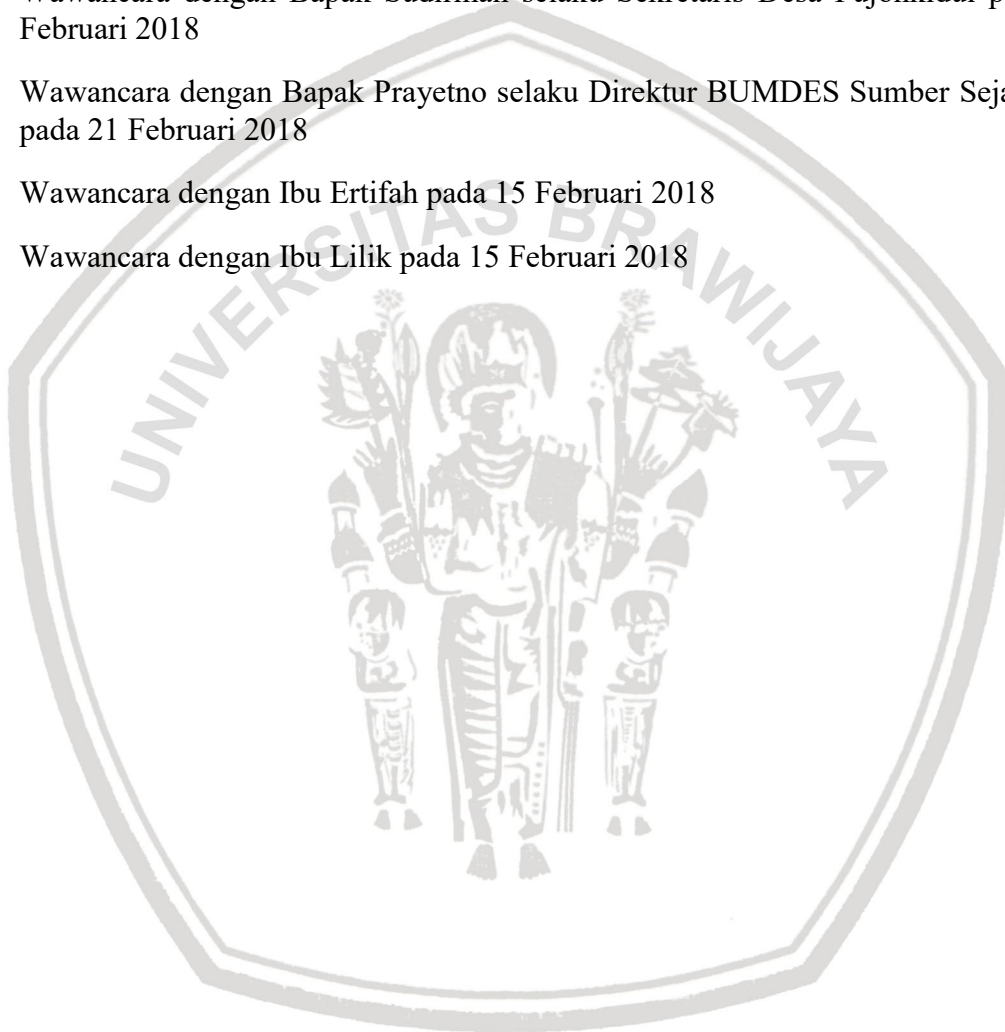
Wawancara dengan Bapak Oni Eko Cahyono selaku Kepala Seksie Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang pada 19 Januari 2018

Wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Sekretaris Desa Pujonkidul pada 2 Februari 2018

Wawancara dengan Bapak Prayetno selaku Direktur BUMDES Sumber Sejahtera pada 21 Februari 2018

Wawancara dengan Ibu Ertifah pada 15 Februari 2018

Wawancara dengan Ibu Lilik pada 15 Februari 2018



## LAMPIRAN



Gambar : peneliti bersama Pak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujonkidul



Gambar : peneliti bersama Pak Oni Eko Cahyono selaku Kasie Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang



Gambar : peneliti bersama dengan Pak Jefri selaku petugas ABB BNI kantor Cabang Pembantu Unit Universitas Brawijaya



Gambar : peneliti bersama Pak Prayetno selaku Ketua BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul





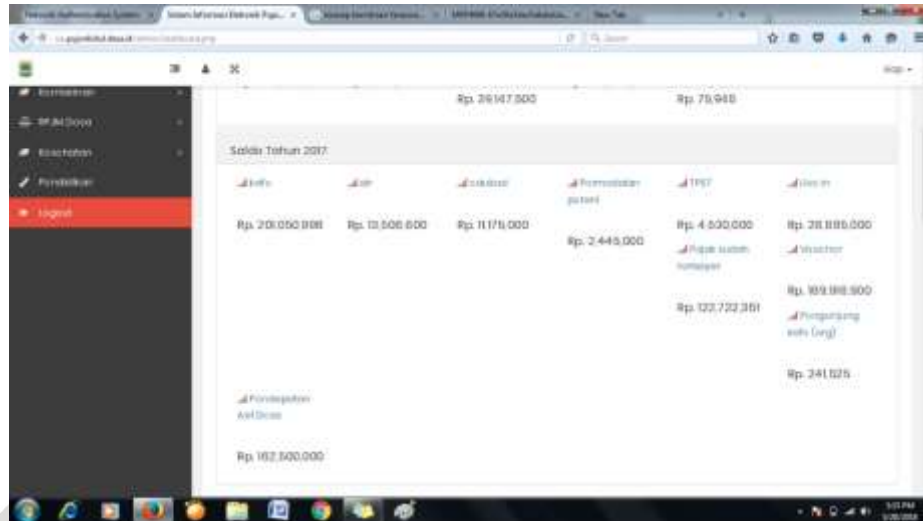
Gambar : Karyawan unit usaha wisata sub *live in*



Gambar : peneliti bersama masyarakat Desa Pujonkidul

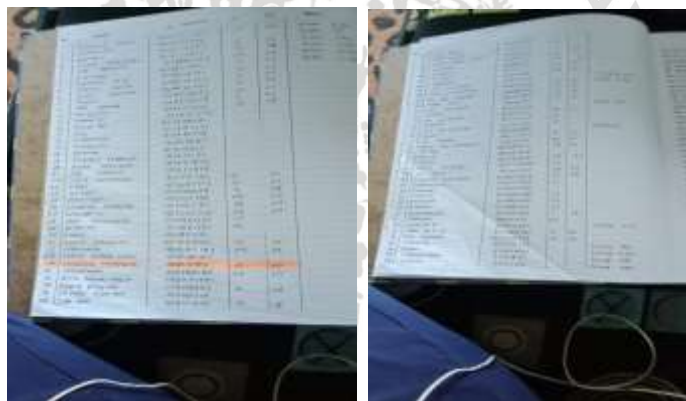


Gambar : peneliti bersama masyarakat Desa Pujonkidul



Pendapatan Asli Desa		Pendapatan Asli Desa		Pendapatan Asli Desa	
Rp. 208.050.988	Rp. 10.506.800	Rp. 11.171.000	Rp. 2.445.000	Rp. 4.500.000	Rp. 38.188.000
			Rp. 122.722.381	Rp. 10.918.500	Rp. 341.025
Pendapatan Asli Desa			Pendapatan Asli Desa		
Rp. 102.500.000					

Gambar : *screenshoot* pendapatan BUMDES Sumber Sejahtera tahun 2017 yang menyumbang pendapatan asli desa



Gambar : daftar nama nasabah BUMDES Sumber Sejahtera



Gambar : Bangunan utama Kafe Sawah yang mendapat bantuan dari CSR BNI



Gambar : papan Agen46 BNI BUMDES Sumber Sejahtera



Gambar : Logo BUMDES Sumber Sejahtera





**PEMERINTAH DESA PUJONKIDUL**

**PERATURAN DESA PUJONKIDUL  
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG**

**NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA PUJONKIDUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PUJONKIDUL**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan, pemberdayaan kegiatan perekonomian desa sehingga dapat meningkatkan pemasukkan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian desa;
- b. bahwa wadah yang mengelola perekonomian desa tersebut pada huruf (a) diatas berdasarkan ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa perlunya menampung aspirasi dan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal dalam pembentukan badan usaha milik desa
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.



- Mengingat
- :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Miliki Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.15 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor .....);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor .....).

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUJONKIDUL  
dan  
KEPALA DESA PUJONKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA PUJONKIDUL TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA  
PUJONKIDUL

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mensepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa Pujonkidul Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pendirian BUM Desa Pujonkidul dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa Pujonkidul dan/atau kerjasama antar-Desa.

### Pasal 3

Tujuan pendirian BUM Desa Pujonkidul:

- a. meningkatkan perekonomian Desa Pujonkidul;
- b. mengoptimalkan aset Desa Pujonkidul agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa Pujonkidul;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa Pujonkidul;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;

- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan warga Desa Pujonkidul;
- f. membuka Lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Pujonkidul; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Pujonkidul dan Pendapatan Asli Desa Pujonkidul.

### BAB III PEMBENTUKAN, NAMA, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH USAHA

#### Pasal 4

1. Pembentukan BUM Desa Pujonkidul dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Desa Pujonkidul.
2. Dengan nama BUM Desa Sumber Sejahtera.
3. BUM Desa Sumber Sejahtera berkedudukan di wilayah Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon.
4. Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUM Desa Sumber Sejahtera dapat berlokasi di luar Desa Pujonkidul.

### BAB IV ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA

#### Pasal 5

Asas-asas yang dipergunakan oleh BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul dalam melaksanakan usahanya :

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;



- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

#### Pasal 6

Fungsi BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul adalah:

- a. meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa Pujonkidul;
- b. membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa Pujonkidul;
- c. membuka lapangan kerja; dan
- d. menggali potensi yang ada di wilayah Desa Pujonkidul.

#### Pasal 7

1. Klasifikasi jenis usaha BUM Desa Sumber Sejahtera adalah meliputi:
  - a. bisnis yang memberikan pelayanan umum seperti: usaha pengelolaan air bersih, usaha listrik Desa, pengolahan sampah dan lainnya;
  - b. bisnis penyewaan barang seperti: penyewaan alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, tanah milik BUM Desa, dan sewaan lainnya;
  - c. bisnis perantara seperti: jasa pembayaran listrik, pasar desa, dan jasa pelayanan lainnya;
  - d. bisnis produksi atau perdagangan umum seperti: sarana produksi dan hasil pertanian, pakan ternak dan hasil peternakan, industri rumahan, kerajinan rakyat dan bisnis produktif lainnya; dan
  - e. bisnis keuangan untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro seperti koperasi simpan pinjam.
2. Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa Pujonkidul.

#### Pasal 8

BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul diwajibkan:

- a. menjalankan usaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. memperhatikan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat Desa Pujonkidul; dan
- c. menjaga kepentingan masyarakat Desa Pujonkidul.

## Pasal 9

BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul dalam menjalankan kegiatannya dilarang:

- a. menjalnlkan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjalankan kegiatan usaha yang menyimpang dari maksud dan tujuan pendirian BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul.
- c. menjalankan kegiatan usahanya bertentangan dengan asas-asas kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 5 peraturan desa ini.

## BAB V KEPEMILIKAN

### Pasal 10

1. BUM Desa Sumber Sejahtera adalah milik Pemerintah Desa Pujonkidul.
2. Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUM Desa Sumber Sejahtera diwakili oleh Kepala Desa Pujonkidul.

## BAB VI ORGANISASI

### Pasal 11

1. Organisasi BUM Desa berada diluar struktur Organisasi Pemerintah Desa.
2. Organisasi Kepengurusan BUM Desa dipilih berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa.

3. Masa bakti Kepengurusan BUMDes selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

## Bagian Kesatu Pengelola

### Pasal 12

1. Pengelola BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa.
2. Pengelola BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas :
  - a. Penasihat;
  - b. Pengawas; dan
  - c. Pelaksana Operasional.
3. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
4. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b, diangkat dari tokoh masyarakat oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD.
5. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c, diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
6. Organisasi kepengurusan BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 13

1. Penasihat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 (dua) huruf a berkewajiban:
  - a. memberikan nasihat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
2. Penasihat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 (dua) huruf a berwenang:
  - a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

## Pasal 14

1. Susunan kepengurusan Badan Pengawas terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
2. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa Sumber Sejahtera sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
3. Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua);
  - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa Sumber Sejahtera; dan
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
4. Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Sumber Sejahtera

## Bagian Kedua Pelaksana Operasional

## Pasal 15

1. Pelaksana Operasional terdiri dari :
  - a. Direksi;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Bendahara.
2. Dalam melaksanakan operasional BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul, pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan BUM Desa.

## Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Direksi, Sekretaris dan Bendahara

## Paragraf satu Direksi

## Pasal 16

Direksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUM Desa Sumber Sejahtera;
- b. Membina pegawai pelaksana operasional;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan BUM Desa Sumber Sejahtera;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUM Desa Sumber Sejahtera;
- e. Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUM Desa Sumber Sejahtera.

#### Pasal 17

1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
2. Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.
3. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa.
4. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku BUM Desa Sumber Sejahtera ditutup untuk disahkan oleh Kepala Desa paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

#### Pasal 18

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa Sumber Sejahtera dengan persetujuan Badan Pengawas;
- c. Mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan;

- d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUM Desa;
- e. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- f. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUM Desa berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan atas pertimbangan Badan Pengawas; dan
- g. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

## Paragraf 2 Sekretaris

### Pasal 19

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran;
- b. mengusahakan kelengkapan organisasi;
- c. memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai;
- d. menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas;
- e. menyusun rencana program kerja organisasi.

### Pasal 20

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai wewenang:

- a. mengambil keputusan dibidang kesekretariatan;
- b. menandatangani surat-surat;
- c. menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUM Desa Sumber Sejahtera; dan
- d. penatausahaan perkantoran.

## Paragraf 3 Bendahara

### Pasal 21

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembukuan keuangan;
- b. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUM Desa Sumber Sejahtera;
- c. menyusun laporan keuangan;
- d. mengendalikan anggaran.



## Pasal 22

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai wewenang :

- a. mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha;
- b. bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

## BAB VII PEGAWAI

### Pasal 23

1. Untuk dapat diangkat menjadi pegawai BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. penduduk Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau bertempat tinggal dan menetap di Desa Pujonkidul sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - c. sekurang-kurangnya berijazah pendidikan SLTA;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - f. dinyatakan sehat oleh dokter negeri;
  - g. usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun; dan
  - h. lulus seleksi.
2. Batas usia pensiun pegawai BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul adalah 55 (lima puluh lima) tahun.

### Pasal 24

Pegawai BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul wajib:

- a. memegang teguh, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan BUM Desa Sumber Sejahtera di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia BUMDes Sumber Sejahtera dan rahasia jabatan.

## Pasal 25

Pegawai BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan BUM Desa Sumber Sejahtera;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan BUM Desa Sumber Sejahtera; dan
- c. mencemarkan nama baik BUM Desa Sumber Sejahtera.

## Pasal 26

1. Pegawai BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul dapat dikenakan hukuman;
2. Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sementara;
  - d. pemberhentian dengan hormat; dan
  - e. pemberhentian dengan tidak hormat.
3. Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

## Pasal 27

1. Pegawai BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul diberhentikan sementara apabila telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/atau tindak pidana.
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

## Pasal 28

1. Pembentukan pengurus BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul dilaksanakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh segenap unsur pemerintah desa dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di desa.

2. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun dan/atau memilih pengurus BUM Desa secara demokratis.
3. Pengurus BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.
4. Calon pengurus BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul harus memenuhi syarat:
  - a. warga Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. bertempat tinggal dan menetap di Desa Pujonkidul sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - c. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 (enam puluh enam) tahun;
  - d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
  - e. pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat;
  - f. tidak pernah tersangkut tindak pidana dan sudah ditetapkan sebagai terdakwa; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.

## BAB IX MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN Pasal 29

Masa bakti kepengurusan BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

### Pasal 30

Pengurus BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul berhenti atau diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal di luar desa;
- d. berakhir masa baktinya;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik; dan
- f. tersangkut tindak pidana dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

### Pasal 31

1. Pengurus BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul berhak mendapat penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa Sumber Sejahtera.
2. Pengurus BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa Sumber Sejahtera selain penghasilan yang sah.

## BAB X PERMODALAN

### Pasal 32

1. Modal Awal BUM Desa Sumber Sejahtera Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pujonkidul.
2. Modal BUM Desa Sumber Sejahtera Terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa Pujonkidul;
  - b. tabungan masyarakat Desa Pujonkidul;
  - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; atau
  - d. pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

### Pasal 33

1. Modal BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 2 (dua) huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
2. Modal BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
3. BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dapat berupa hibah atau bantuan sosial.
4. Modal BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul berasal dari pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau masyarakat.

### Pasal 34

1. Modal BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 4 (empat), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD.
2. Persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

### Pasal 35

Modal BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

## BAB XI BAGI HASIL USAHA

### Pasal 36

1. Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul dapat dibagi hasil usaha BUM Desa Sumber Sejahtera.
2. Pembagian hasil usaha BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
3. Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) untuk penambahan modal usaha, penasihat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.
4. Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) ditentukan sebagai berikut :
 

a. penambahan modal usaha .....	10 %
b. penasihat .....	5 %
c. badan pengawas .....	5 %
d. pelaksana operasional .....	10 %



e. unit usaha .....	10 %
f. pendidikan dan sosial .....	10 %
g. kas cadangan .....	10 %
h. pemilik saham .....	40 %

## BAB XII KERJASAMA

### Pasal 37

1. BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul dapat melakukan kerjasama usaha dengan 1 (satu) atau lebih BUM Desa lain dan/atau dengan pihak ketiga.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD;
  - c. kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD; dan
  - d. kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan saling menguntungkan.

### Pasal 38

Kerjasama usaha BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

## BAB XIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 39

1. Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul kepada Kepala Desa.
2. Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul kepada BPD dalam forum musyawarah.
3. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) paling sedikit memuat:
  - a. laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun;
  - b. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan; dan
  - c. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.
4. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD dan ART.

## BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

## Pasal 40

Pemerintah Desa Pujonkidul wajib membina terhadap perkembangan usaha BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian dan kehidupan masyarakat desa.

### Bagian Kedua Pengawasan

## Pasal 41

BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul

## BAB XV PEMBUBARAN

## Pasal 42

1. BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul dapat dibubarkan karena:
  - a. tidak menguntungkan; dan
  - b. ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembubaran BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Semua kekayaan BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal dan disetor langsung ke kas Desa Pujonkidul.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 44

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka segala hal yang terkait dengan seluruh aspek pelaksanaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di wilayah Desa Pujonkidul diatur melalui Keputusan Kepala Desa dan atau Peraturan Desa ini.

### Pasal 45

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Desa Pujonkidul  
Pada tanggal 7 JULI 2015  
KEPALA DESA PUJONKIDUL

**UDI HARTOKO**

Diundangkan di Pujonkidul  
pada tanggal 31 Juli 2015  
Sekretaris Desa Pujonkidul

**SUDIRMAN**

Nip.19661208 2009 06 1001



**PENJELASAN**

**PERATURAN DESA PUJONKIDUL  
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG**

**NOMOR 2 TAHUN 2015**

## TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA PUJONKIDUL

### I. Umum

#### 1. Dasar Pemikiran

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa



Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam system pemerintahan Indonesia. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## 2. Tujuan dan Asas Pengaturan

### a. Tujuan Pengaturan

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur,

dan sejahtera. Sehingga dengan demikian, tujuan pendirian BUM Desa Pujonkidul adalah:

- 1) meningkatkan perekonomian Desa Pujonkidul;
- 2) mengoptimalkan aset Desa Pujonkidul agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa Pujonkidul;
- 3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa Pujonkidul;
- 4) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- 5) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan warga Desa Pujonkidul;
- 6) membuka Lapangan kerja;
- 7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Pujonkidul; dan
- 8) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Pujonkidul dan Pendapatan Asli Desa Pujonkidul.

b. Asas Pengaturan

Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah:

- 1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat lokal;
- 3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- 5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- 7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan

oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

- 9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

### 3. Materi muatan

Peraturan Desa ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Peraturan Desa ini mengatur materi mengenai maksud dan tujuan, nama kedudukan dan wilayah usaha, asas, fungsi dan jenis usaha, kepemilikan, organisasi, pegawai, tata cara pembentukan kepengurusan, permodalan, kerjasama, laporan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, dan pembubaran

### 4. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa Pujonkidul.

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.

BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Peraturan Desa

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;



- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

## II. Pasal Demi Pasal

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas





Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

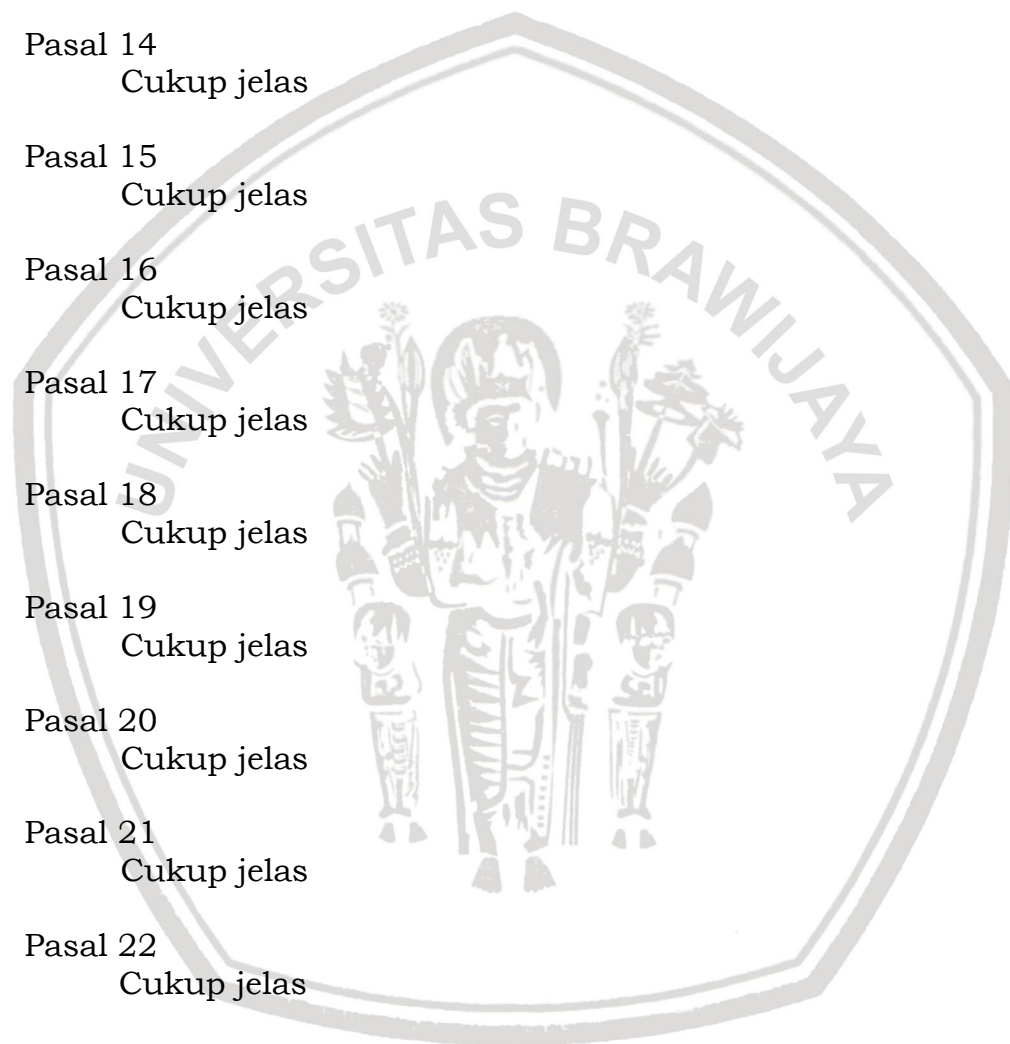
Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas



Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Ayat 1  
Yang dimaksud dengan “kekayaan desa yang dipisahkan” adalah neraca dan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa.

Ayat 2  
Cukup jelas

Ayat 3  
Cukup jelas

Ayat 4  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas



LEMBARAN DESA PUJON KIDUL, KECAMATAN PUJON, KABUPATEN  
MALANG TAHUN 2015 NOMOR 5

=====

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( B P D )  
DESA PUJON KIDUL  
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG  
KEPUTUSAN  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUJON KIDUL**  
NOMOR 2TAHUN 2015

TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN BUMDes  
“.....” SEBAGAI BADAN USAHA MILIK DESA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUJON KIDUL

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai ketentuan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal .... huruf (b) Rancangan peraturan Desa ..... tentang pendirian BUMDes “.....” SEBAGAI Badan Usaha Milik Desa perlu mendapatkan persetujuan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan keputusan BPD

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. BPD
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.15 Tahun 2006 tentang Pedoman pedoman dan mekanisme penyusunan peraturan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor .....);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor .....).

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa tanggal ..... sampai dengan tanggal .....
2. Hasil Rapat Panitia kerja Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal ..... sampai dengan tanggal .....

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..... TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN PERATURAN DESA .....  
TENTANG PENDIRIAN BUMDes ‘.....’ SEBAGAI PERUSAHAAN DESA

#### Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa ..... Untuk ditetapkan  
menjadi peraturan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten  
Malang

#### Pasal 2

Peraturan Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 1 adalah  
Peraturan Desa pendirian BUMDes ”.....’

#### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan  
Ditetapkan di desa .....



Pada Tanggal:

KETUA  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

.....

Tembusan :

Yth.

1. Bapak Kepala Desa .....

2. Bapak Camat .....

3. Bapak Bupati Malang

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA .....

NOMOR : .... Tahun .....

TANGGAL : .....

